

**EFEKTIVITAS PROGRAM REHABILITASI DAN
REKONSTRUKSI PASCA BENCANA BANJIR BANDANG
DI KABUPATEN LUWU UTARA**

SKRIPSI

Oleh

IRMA WAHYUNI

NIM 45 18 042 048



PROGRAM STUDI PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA

FAKULTAS TEKNIK

UNIVERSITAS BOSOWA MAKASSAR

2022

**EFEKTIVITAS PROGRAM REHABILITASI DAN
REKONSTRUKSI PASCA BENCANA BANJIR BANDANG DI
KABUPATEN LUWU UTARA**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Teknik (S.T)

UNIVERSITAS

BOSOWA

Oleh

IRMA WAHYUNI

NIM 45 18 042 048

**PROGRAM STUDI PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS BOSOWA MAKASSAR**

2022

SKRIPSI

EFEKTIVITAS PROGRAM REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI PASCA BENCANA BANJIR BANDANG DI KABUPATEN LUWU UTARA

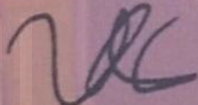
Disusun dan diajukan oleh

IRMA WAHYUNI
NIM. 45 18 042 048

Telah dipertahankan di Depan Panitia Ujian Skripsi
Pada Tanggal 28 Juni 2022

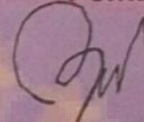
Menyetujui :

Pembimbing I



Dr. Ir. M. Fuad Azis, MT.
NIDN: 99-090051-78

Pembimbing II



Tri Budiharto, ST, M.Sc., M.Eng.
NIDN: 09-050987-02


Mengetahui :

Dekan Fakultas Teknik
Universitas Bosowa Makassar



Dr. H. Nasrullah, ST., MT.
NIDN: 09-080773-01

Ketua Program Studi
Perencanaan Wilayah dan Kota



Dr. S. Kamran Aksa, ST., MT.
NIDN: 09-110774-01

HALAMAN PENERIMAAN

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Teknik Universitas Bosowa Makassar, Nomor: A.1010/SK/FT/UNIBOS/VI/2022 Pada Tanggal 20 Juni 2022 Tentang Pengangkatan Dosen Penguji Ujian Tutup Mahasiswa Prodi Teknik Perencanaan Wilayah dan Kota, Maka:

Pada Hari/Tanggal : Kamis, 11 Agustus 2022

Skripsi Atas Nama : Irma Wahyuni

Nomor Pokok : 4518042048

Telah diterima dan disahkan oleh Panitia Ujian Skripsi Sarjana Negara Fakultas Teknik Universitas Bosowa Makassar, telah dipertahankan dihadapan Tim Penguji Ujian Skripsi Sarjana Negara dan untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana Negara Jenjang Strata Satu (S-1), pada Jurusan Teknik Perencanaan Wilayah Dan Kota, Fakultas Teknik Universitas Bosowa Makassar.

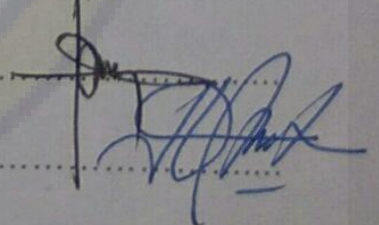
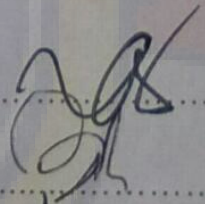
TIM PENGUJI

Ketua : Dr. Ir. M. Fuad azis, MT.

Sekretaris : Tri Budiharto, ST., M.Sc., M.Eng.

Anggota : 1. Dr. Syafri, ST., MT.

2. Ilham Yahya, ST., MSP.

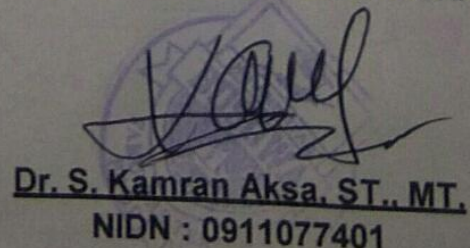


DEKAN FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS BOSOWA MAKASSAR



Dr. Ir. H. Nasrullah, ST., MT.
NIDN : 0908077301

KETUA JURUSAN
TEKNIK PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA



Dr. S. Kamran Aksa, ST., MT.
NIDN : 0911077401

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Irma Wahyuni

NIM : 45 18 042 048

Jurusan : Perencanaan Wilayah dan Kota

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa Skripsi yang saya tulis/ajukan ini benar-benar hasil karya sendiri, dengan arahan komisi pembimbing dan bukan merupakan pengambilan tulisan atau pemikiran orang lain. Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebahagian atau keseluruhan Skripsi ini hasil karya orang lain, saya bersedia menerima segala konsekuensi/sanksi atau perbuatan tersebut.

Makassar, 22 Juni 2022

Yang menyatakan



IRMA WAHYUNI

ABSTRAK

Irma Wahyuni, 2022 *"Efektivitas Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Banjir Bandang di Kabupaten Luwu Utara"*. Dibimbing oleh **M. Fuad Azis** dan **Tri Budiharto**

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui efektivitas program rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana banjir bandang di Kabupaten Luwu Utara, untuk mengetahui apa saja kendala program rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana banjir bandang di Kabupaten Luwu Utara. Serta untuk mengidentifikasi arahan rekomendasi dalam meningkatkan efektivitas program rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana banjir bandang di Kabupaten Luwu Utara

Variabel yang digunakan terdiri dari indikator rehabilitasi dan rekonstruksi yaitu diantaranya (1) Perbaikan Lingkungan Daerah Bencana; (2) Perbaikan Sarana dan Prasarana Umum; (3) Pemberian Bantuan Perbaikan Rumah Masyarakat; (4) Pemulihan Sosial Psikologis; (5) Pelayanan Kesehatan; (6) Pemulihan Sosial Ekonomi Budaya; (7) Pemulihan Fungsi Pemerintahan; (8) Pemulihan Fungsi Pelayanan Publik; (9) Pembangunan Kembali Sarana dan Prasarana; (10) Pembangunan Kembali Sarana Sosial Masyarakat; (11) Pembangkitan Kembali Kehidupan Sosial Budaya Masyarakat; (12) Penerangan Rancang Bangun; (13) Peningkatan Kondisi Sosial Ekonomi Budaya; (14) Peningkatan Fungsi Pelayanan Publik; (15) Peningkatan Pelayanan Utama Dalam Masyarakat. Metode analisis yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dan kuantitatif

Berdasarkan hasil analisis deskriptif kualitatif dan kuantitatif diperoleh efektivitas program rehabilitasi dan rekonstruksi, bahwa program rehabilitasi pasca bencana di Kabupaten Luwu Utara sudah efektif dengan nilai skor efektivitas 80,75 persen sedangkan program rekonstruksi pasca bencana di Kabupaten Luwu Utara juga dikategorikan sudah cukup efektif dengan skor nilai 68,58 persen

Sehingga dari nilai efektivitas tersebut diperoleh kendala program rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana banjir bandang yaitu kebutuhan dana rehabilitasi dan rekonstruksi infrastruktur yang tinggi menjadi salah satu alasan yang menjadi kendala sehingga dibutuhkan arahan yaitu diharapkan anggaran yang telah diestimasikan sesuai kerusakan infrastruktur yang ada cepat terealisasikan pada tepat waktu

Kata Kunci : Efektivitas Program,Pasca Bencana, Rehabilitasi, Rekonstruksi.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrohim

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah Alhamdulillah Rabbil Alamin. Segala puji syukur tak terhingga penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan yang maha Esa, Pencipta Alam semesta beserta isinya dan tempat berlindung bagi umat-Nya. Sholawat serta salam penulis limpahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya hingga akhir zaman. Atas limpah rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini yang berjudul **“Efektivitas Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Banjir Bandang di Kabupaten Luwu Utara”** penelitian ini berisikan tentang Bagaimana efektivitas program rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana banjir bandang di Kabupaten Luwu Utara dan apa saja kendala program rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana banjir bandang di Kabupaten Luwu Utara, serta bagaimana arahan rekomendasi dalam meningkatkan efektivitas program rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana banjir bandang di Kabupaten Luwu Utara

Penghargaan dan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada orang tua tercinta Ayahanda **Ambo Wakkang** dan Ibunda **Hj. Marwah**, serta saudara tercinta yang telah berbahagia di Surga-nya Allah SWT **Alm. Nirwana S.E** yang telah mencurahkan segenap cinta dan kasih sayangnya

serta perhatian moril dan materinya. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat, kesehatan, karunia dan keberkahan di dunia dan di akhirat atas segala didikan serta budi baik dan pengorbanan yang diberikan kepada penulis.

Skripsi ini tidak akan terselesaikan tanpa adanya bantuan dari berbagai pihak. Olehnya dengan segala kerendahan hati dan ketulusan penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada .:

1. Bapak **Dr. Ir. Rudi Latief, ST., M.Si** selaku Ketua Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota Universitas Bosowa Makassar.
2. Bapak **Dr. Ir. M. Fuad Azis, MT** selaku Pembimbing Pertama yang telah bersedia membimbing dan mengarahkan penulis demi kesempurnaan dan penyelesaian skripsi ini.
3. Bapak **Tri Budiharto, ST, M.Sc.,M.Eng** selaku Pembimbing Kedua yang telah bersedia dan membimbing dan mengarahkan penulis demi kesempurnaan dan penyelesaian skripsi ini.
4. Bapak **Jufriadi, ST., MSP** selaku Penasehat Akademik yang sedia memberikan arahan akademik kepada penulis.
5. Masyarakat Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara yang bersedia untuk diwawancarai serta memberikan data dan pengetahuan mengenai lokasi penelitian.

6. Kepada Keluarga Besar penulis, yang telah bersedia membantu dan memberikan dukungan serta semangat dalam menyelesaikan penelitian ini, terima kasih luar biasa.
7. Kepada sahabat-sahabat seperjuangan skripsi, khususnya **Tim Lambe Turah**, yang telah bersedia diskusi dan membantu dalam menyelesaikan penelitian ini dengan selalu memberikan semangat, dan berita Hot News tentang bumbu-bumbu pergosipan yang terviral.
8. Kepada seluruh sahabat seperjuangan **PEACE18** yang sudah memberikan cerita baru, warna baru, pengalaman baru dalam kehidupan penulis dan terima kasih telah mengajarkan arti solidaritas.
9. Kepada seluruh teman-teman seperjuangan KKN51 Desa Sapanang, yang selalu memberikan dukungan dan semangat dalam mengerjakan skripsi ini.
10. Kepada seluruh pihak yang membantu penulis dalam penyelesaian penulisan skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu per satu.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini tentunya masih jauh dari kesempurnaan, baik dari segi sistematika penulisan dan isinya. Oleh karena itu, dengan indra dan hati terbuka penulis sangat mengharapkan kritik dan saran demi penyempurnaan skripsi ini kedepannya. Besar harapan penulis penelitian ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Aamiin.

Makassar, 22 Juni 2022


Irma Wahyuni

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

HALAMAN PENGESAHAN

HALAMAN PERNYATAAN

ABSTRAK

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI..... iv

DAFTAR TABEL viii

DAFTAR GAMBAR ix

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang 1

B. Rumusan Masalah 6

C. Tujuan Penelitian 6

D. Manfaat Penelitian 7

E. Ruang Lingkup Penelitian 8

F. Sistematika Pembahasan..... 8

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Efektivitas..... 10

1. Pengertian Efektivitas 10

2. Pendekatan Efektivitas 11

3. Ukuran Efektivitas 11

4. Faktor-faktor Pengaruh Utama atas Efektivitas 13

B. Penanggulangan Bencana..... 14

1. Pengertian Penanggulangan 14

2. Pengertian Bencana 15

3. Jenis-Jenis Bencana..... 17

4. Penyebab Bencana..... 18

5. Dampak Bencana 19

6. Tahapan-Tahapan Penanggulangan Bencana	20
C. Rehabilitasi.....	26
1. Pengertian Rehabilitasi.....	26
2. Strategi dan Sasaran Rehabilitasi.....	28
D. Rekonstruksi	30
E. Banjir Bandang.....	32
F. Upaya Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana.....	36
G. Manajemen Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana	37
H. Penelitian Terdahulu	39
I. Kerangka Berfikir.....	44
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis dan Sumber Penelitian.....	45
1. Jenis Penelitian.....	45
2. Sumber Penelitian.....	45
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	46
1. Lokasi Penelitian.....	46
2. Waktu Penelitian	47
C. Populasi dan Sampel	47
1. Populasi.....	47
2. Sampel.....	48
D. Teknik Pengumpulan Data.....	50
1. Wawancara dan <i>Interview</i>	51
2. Observasi.....	51
3. Kuisisioner.....	52
4. Dokumentasi.....	52
E. Teknik Analisa Data	53
1. Deskriptif Kualitatif	54
2. Deskriptif Kuantitatif	56
F. Variabel dan Indikator	56

G. Defenisi Operasional.....	59
1. Efektivitas Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi.....	60
2. Rehabilitasi	60
3. Rekonstruksi.....	64
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	
A. Gambaran Umum Kabupaten Luwu Utara	67
1. Letak Geografis dan Administrasi	67
2. Bencana Banjir Bandang yang terjadi di Kabupaten Luwu Utara Tahun 2020.....	69
B. Gambaran Umum Penanggulangan Bencana Kabupaten Luwu Utara.....	75
1. Sejarah dan Latar Belakang Kejadian Bencana Kabupaten Luwu Utara.....	75
2. Tahapan Pelaksanaan Pelayanan Bantuan Penanganan Bencana.....	85
3. Tahapan Pelaksanaan Pelayanan Bantuan Penanganan Bencana	85
C. Hasil Penelitian dan Pembahasan.....	86
1. Karakteristik Informan	86
2. Efektivitas Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Banjir Bandang di Kabupaten Luwu Utara	87
a. Rehabilitasi	88
1) Perbaikan Lingkungan Daerah Bencana.....	89
2) Perbaikan Sarana dan Prasarana Umum.....	93
3) Pemberian Bantuan Perbaikan Rumah Masyarakat...	94
4) Pemulihan Sosial Psikologis	98
5) Pemulihan Pelayanan Kesehatan	100
6) Pemulihan Fungsi Pelayanan Publik.....	100
7) Pemulihan Fungsi Pemerintahan	101
8) Pemulihan Sosial Ekonomi Budaya.....	102

b. Rekonstruksi.....	103
1) Pembangunan Kembali Sarana dan Prasarana	104
2) Pembangunan Kembali Sarana Sosial Masyarakat ...	105
3) Pembangkitan Kembali Kehidupan Sosial Budaya Masyarakat.....	106
4) Penerangan Rancang Bangun Yang Tepat dan Penggunaan Peralatan Yang Lebih Baik Serta Tahan Bencana	107
5) Peningkatan Kondisi Sosial, Ekonomi dan Budaya	108
3. Kendala Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Banjir Bandang Tahun 2020	116
4. Arahan Rekomendasi Dalam Meningkatkan Efektivitas Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Banjir Bandang di Kabupaten Luwu Utara.....	124

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	133
B. Saran.....	134
DAFTAR PUSATAKA	137

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu	39
Tabel 3.1 Jadwal Pelaksanaan Penelitian	47
Tabel 3.2 Variabel dan Indikator Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Banjir Bandang Tahun	57
Tabel 4.1 Rekapitulasi Kejadian Bencana di Kabupaten Luwu Utara Tahun 2020	69
Tabel 4.2 Rekapitulasi Kerusakan Infrastruktur Pasca Bencana Banjir Bandang di Kecamatan Masamba	70
Tabel 4.3 Sejarah Kejadian Bencana di Kabupaten Luwu Utara dalam Rentang Tahun 1995-2017	76
Tabel 4.4 Potensi Bencana di Kabupaten Luwu Utara.....	77
Tabel 4.5 Rekapitulasi Kejadian Bencana di Kabupaten Luwu Utara Tahun 2020	78
Tabel 4.6 Struktur Penanganan Bencana Banjir Bandang.....	85
Tabel 4.7 Jumlah Responden Berdasarkan Jenis Kelamin.....	87
Tabel 4.8 Rasio Efektivitas Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Banjir Bandang Tahun 2020	88
Tabel 4.9 Rekapitulasi Data Penerima Dana Bantuan Stimulan Perbaikan Rusak Sedang dan Rusak Ringan Korban Banjir Bandang	97
Tabel 4.10 Realisasi dan Rekapitulasi Data Kerusakan Infrastruktur di Kecamatan Masamba	109
Tabel 4.11 Efektivitas Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Banjir Bandang di Kabupaten Luwu Utara	112
Tabel 4.12 Kendala Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Banjir Bandang di Daerah Kabupaten Luwu Utara	118
Tabel 4.13 Arahkan Rekomendasi Dalam Meningkatkan Efektivitas Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Banjir Bandang Tahun 2020 Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Utara	124

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Alur Proses PDNA.....	38
Gambar 2.2 Kerangka Berfikir.....	44
Gambar 4.1 Peta Administrasi Kabupaten Luwu Utara.....	68
Gambar 4.2 Peta Daerah Terdampak Banjir Bandang di Kabupaten Luwu Utara	74
Gambar 4.3 Peta Potensi Bencana Banjir Kabupaten Luwu Utara	79
Gambar 4.4 Peta Potensi Cuaca Ekstrim Kabupaten Luwu Utara	80
Gambar 4.5 Peta Potensi Bencana Kekeringan Kabupaten Luwu Utara	81
Gambar 4.6 Peta Potensi Bencana Longsor Kabupaten Luwu Utara ..	82
Gambar 4.7 Peta Potensi Gempa Bumi Kabupaten Luwu Utara	83
Gambar 4.8 Peta Potensi Bencana Tsunami Kabupaten Luwu Utara .	84
Gambar 4.9 Tahapan Pelaksanaan Pelayanan Bantuan Penanganan Bencana.....	85
Gambar 4.10 Perbaikan Kawasan Permukiman Pasca Bencana Banjir Bandang.....	92
Gambar 4.11 Pembangunan Hunian Tetap Korban Bencana Banjir Bandang	97
Gambar 4.12 Kegiatan Trauma Healing Pasca Banjir	99
Gambar 4.13 Pembangunan Kembali Jaringan Jalan dan Jaringan Drainase Pasca Bencana Banjir Bandang	105
Gambar 4.14 Peta Potensi Banjir Bandang Kabupaten Luwu Utara...	132

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bencana merupakan peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam, nonalam, maupun manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Pada umumnya bencana merefleksikan karakteristik tentang gangguan terhadap pola hidup manusia, dampak bencana bagi manusia, dampak terhadap struktur sosial, kerusakan pada aspek sistem pemerintahan, bangunan, dan lain-lain serta kebutuhan masyarakat yang diakibatkan oleh bencana. Defenisi lain menurut *International Strategy For Disaster Reduction (UNISDR-2002, 24)* adalah suatu kejadian yang disebabkan oleh alam atau ulah manusia, terjadi secara tiba-tiba atau perlahan-lahan, sehingga menyebabkan hilangnya jiwa manusia, harta benda dan kerusakan lingkungan, kejadian ini terjadi di luar kemampuan masyarakat dengan segala sumberdayanya (Nurjanah 2012, 11).

Banjir Bandang merupakan bencana yang disebabkan oleh alam berdampak pada infrastruktur dikarenakan banjir campuran dari beberapa material bongkahan yang bervariasi seperti pasir

(lumpur), bebatuan dan limbah kayu dengan ukuran mencapai puluhan meter dan bergerak turun mengikuti gaya gravitasi dari hulu hingga ke hilir sungai. Banjir bandang merupakan peristiwa alam yang dapat mengalir ke jarak yang sangat jauh menyusuri sungai/lembah dan peristiwa alam ini dapat mencapai kecepatan yang sangat tinggi hingga mencapai 85 km/jam. (Utama & Naumar, 2015). Maka dapat dipahami bahwa banjir bandang bisa terjadi akibat ketidakseimbangan statik antara gaya geser yang ditimbulkan oleh aliran lebih besar dari gaya geser massa batasan sungai yang menahannya. Banjir Bandang yang melanda beberapa lokasi yang teridentifikasi di enam kecamatan, yakni Kecamatan Masamba, Sabbang, Baebunta, Baebunta Selatan, Malangke, dan Malangke Barat yang diakibatkan oleh intensitas curah hujan yang tinggi pada tiga hari sebelum terjadinya bencana banjir bandang, mengakibatkan meluapnya air yang ada di sungai Masamba dan sungai Radda yang besar dengan tinggi genangan 1-3 meter, ditambah lagi dengan longsornya tanah pada bagian hulu yang mengakibatkan bencana banjir pada saat itu, tidak hanya air sungai melainkan berbagai campuran pasir, bebatuan dan batang pohon besar yang ikut terseret hingga hilir sungai.

Otonomi daerah memberikan peluang yang besar kepada daerah untuk mengembangkan atau merencana pembangunan

daerah sesuai dengan kebutuhan daerah, menyikapi kondisi geografis Luwu Utara yang rentan terhadap bencana khususnya banjir bandang, maka perencanaan terhadap penanggulangan bencana harus dipahami serta diimplementasikan oleh semua pihak, karena bencana bukan hanya urusan pemerintah melainkan urusan semua pihak di wilayah tersebut dan secara nasional Indonesia telah mensahkan peraturan tentang penanggulangan bencana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 dan kemudian diikuti oleh sub bagian hukum turunannya, bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 17 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana yang mempunyai tugas memberikan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan tanggap darurat, rehabilitasi, dan rekonstruksi secara adil dan setara. Dengan demikian Pemerintah Kabupaten Luwu Utara mengeluarkan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Penanggulangan Bencana.

Kabupaten Luwu Utara merupakan kabupaten yang rentan terhadap bencana, meskipun frekuensinya tidak terlalu banyak namun yang jelas bencana-bencana tersebut jauh sekali sudah menyebabkan kerugian. Kabupaten Luwu Utara merupakan daerah yang rawan bencana terutama bencana alam seperti gempa, tanah

longsor, banjir dan kebakaran yang dapat mengakibatkan kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dampak psikologis dan korban jiwa. Berdasarkan pada artikel dapat diketahui bahwa dari bencana banjir bandang yang melanda Kabupaten Luwu Utara telah menelan banyak korban jiwa tercatat jumlah korban sebanyak 1.592 orang, yang selamat 1.553 orang, meninggal dunia 39 orang, dan 7.062 KK mengungsi. Selain korban jiwa, beberapa fasilitas sarana dan prasarana juga mengalami kerusakan yang terdiri dari sejumlah permukiman warga, 12 unit fasilitas pendidikan, 19 unit rumah ibadah rinciannya 17 masjid, 1 mushollah dan 1 gereja, 5 unit fasilitas kesehatan, dan beberapa fasilitas lainnya. Dalam penanggulangannya pasca bencana rehabilitasi dan rekonstruksi merupakan langkah awal setelah masyarakat terdampak bencana yang telah mendapatkan pertolongan tanggap darurat. Bencana banjir bandang yang melanda Kabupaten Luwu Utara telah memporak-porandakan infrastruktur yang ada, tentunya membuat pemerintah daerah harus melakukan manajemen pasca banjir bandang sebagai langkah awal pemerintah guna menjalankan kembali roda kehidupan. Harapan yang diinginkan oleh masyarakat Kabupaten Luwu Utara melalui BPBD seharusnya Pemkab Luwu Utara bersama dinas terkait seperti Dinas Sosial dan Dinas Pengairan menangani dengan cepat masalah terhadap rehabilitasi

dan rekonstruksi pasca bencana banjir yang berkelanjutan guna pengurangan risiko banjir. Pasca bencana banjir bandang yang terjadi di sejumlah daerah di Kabupaten Luwu Utara pada tahun 2020 salah satunya adalah Kecamatan Masamba yang telah dilakukan pemulihan baik dari aspek sarana maupun prasarana sebagai upaya rehabilitasi dan rekonstruksi yang terdiri dari beberapa sektor yaitu sektor permukiman, infrastruktur, sosial, dan lintas sosial. Namun pasca dua tahun terjadinya bencana tersebut masih banyak terdapat sektor-sektor yang belum tertangani, sehingga perlu adanya penilaian atau pengkajian seberapa efektivitas program rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana banjir bandang di Kabupaten Luwu Utara.

Sesuai dengan hipotesis awal penelitian maka peneliti merasa penting untuk dilakukan penelitian ini, sebagai upaya mendukung peningkatan kinerja pemerintah daerah Kabupaten Luwu Utara dalam rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana banjir. Oleh karena itu untuk mendukung peningkatan kinerja pemerintah daerah Kabupaten Luwu Utara penulis merumuskan suatu karya ilmiah dengan judul **“Efektivitas Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Banjir Bandang di Kabupaten Luwu Utara”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Bagaimana efektivitas program rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana banjir bandang di Kabupaten Luwu Utara ?
2. Apa saja kendala program rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana banjir bandang di Kabupaten Luwu Utara ?
3. Bagaimana arahan rekomendasi dalam meningkatkan efektivitas program rehabilitasi dan rekonstruksi di Kabupaten Luwu Utara?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui efektivitas program rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana banjir bandang di Kabupaten Luwu Utara
2. Untuk mengetahui apa saja kendala program rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana banjir bandang di Kabupaten Luwu Utara
3. Untuk mengidentifikasi arahan rekomendasi dalam meningkatkan efektivitas program rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana banjir bandang di Kabupaten Luwu Utara.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Akademik

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan bagi penulis, lembaga, akademisi, dan juga masyarakat juga sebagai referensi atau perbandingan penelitian selanjutnya khususnya bagi mahasiswa Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota yang akan melakukan kajian mengenai efektivitas program rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana banjir bandang di Kabupaten Luwu Utara.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini agar dijadikan bahan referensi untuk lembaga-lembaga terkait, khususnya bagi pemerintah daerah Kabupaten Luwu Utara, dan diharapkan bisa menjadi solusi untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam hal ini mempercepat pembangunan infrastruktur guna menjalankan kembali tatanan roda kehidupan yang sebelumnya terganggu/tersendak yang diakibatkan oleh bencana banjir bandang, sehingga hasil dari kerja sama ini diharapkan masyarakat bisa menjalani kehidupan seperti sediakala.

E. Ruang Lingkup Penelitian

1. Ruang Lingkup Wilayah

Wilayah penelitian adalah lokasi tempat dimana peneliti mampu menangkap fenomena yang akan diteliti dan harus dipilih dengan cermat sehingga relevan dengan tujuan penelitian. Relevansi data yang dibutuhkan berkenaan dengan upaya rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana banjir bandang, dapat diambil di:

- a. Kantor Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Luwu Utara
- b. Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara
- c. Masyarakat terdampak oleh banjir bandang, serta mengamati langsung kondisi daerah yang terkena dampak pasca bencana banjir di Kabupaten Luwu Utara.

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika penulisan didasarkan pada berbagai tahapan proses penelitian yang tertuang dalam bab-bab yang berbeda, sehingga pembaca dapat dengan mudah mengenali dan memahami substansi dari penelitian ini. Sistematika pembahasannya adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini memuat tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, ruang lingkup penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini berisi landasan teori yang berkaitan dengan tujuan penelitian yang digunakan sebagai dasar pemahaman penulis untuk mencapai tujuan penelitian.

BAB III METODE PENELITIAN

Pada bab ini menguraikan tentang metode dalam melakukan penelitian diantaranya lokasi penelitian, waktu penelitian, populasi dan sampel, Jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, variabel penelitian, metode analisis, definisi operasional penelitian dan kerangka berpikir.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini berisi tentang uraian penyajian data dan informasi serta temuan peneliti yang telah dilakukan di lapangan sesuai dengan judul “Efektivitas Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Banjir Bandang di Kabupaten Luwu Utara”

BAB V PENUTUP

Pada bab ini merupakan penulisan yang menguraikan kesimpulan dan saran.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Efektivitas

1. Pengertian Efektivitas

Efektivitas adalah unsur pokok untuk mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditentukan didalam setiap organisasi, kegiatan, ataupun program. Disebut efektif apabila tercapai tujuan ataupun sasaran seperti yang telah ditentukan. Hal ini sesuai dengan pendapat H. Emerson yang dikutip Soewarno Handyaningrat S. (1994) yang menyatakan bahwa “Efektivitas adalah pengukuran dalam arti tercapainya tujuan yang telah ditentukan sebelumnya”.

Menurut Steers (1985:46) mengemukakan bahwa efektivitas berupa sejauh mana organisasi dapat melaksanakan seluruh tugas pokoknya atau mencapai semua sasarannya. Penilaian umum dengan sebanyak mungkin kriteria tunggal dan menghasilkan penilaian yang umum.

Georgopolous dan Tannembaum (dalam Indrawijaya 2008:228), mengemukakan bahwa “Efektivitas ditinjau dari sudut pencapaian tujuan, dimana keberhasilan suatu organisasi harus mempertimbangkan bukan saja sasaran organisasi tetapi juga mekanisme mempertahankan diri dalam mengejar sasaran.

Dengan kata lain, penilaian efektivitas harus berkaitan dengan masalah sasaran maupun tujuan.

2. Pendekatan Efektivitas

Gibson (1985:28) membagi efektivitas menurut pendekatannya menjadi dua, yaitu pendekatan menurut tujuan dan pendekatan teori sistem, yaitu :

a. Pendekatan menurut tujuan

Pendekatan ini menekankan terhadap pentingnya pencapaian tujuan sebagai kriteria penilaian keefektifan.

b. Pendekatan teori sistem

Teori sistem membahas perilaku organisasi secara *intern* dan *ekstern*. Secara *intern* dapat dilihat bagaimana dan mengapa orang didalam organisasi melaksanakan tugas individual dan kelompok. Secara *ekstern*, dapat menghubungkan transaksi organisasi dengan organisasi atau kelompok lain.

3. Ukuran Efektivitas

Mengukur efektivitas organisasi bukan suatu hal yang sederhana, karena keefektifan dapat dikaji dari berbagai sudut pandang dan tergantung pada siapa yang menilai serta menginterpretasikan. Efektivitas juga dapat diukur dengan membandingkan antara rencana yang telah ditentukan dengan

hasil nyata yang telah diwujudkan. Namun, jika usaha atau hasil pekerjaan dan tindakan yang dilakukan telah tepat sehingga menyebabkan tujuan tidak tercapai atau sasaran yang diharapkan, maka hal itu dikatakan tidak efektif.

Menurut Duncam (dalam Street 1985:53), efektivitas dapat diukur melalui:

a. Pencapaian Tujuan

Pencapaian adalah keseluruhan upaya pencapaian tujuan harus dipandang sebagai suatu proses. Dalam menentukan sebuah tujuan yang baik harus mengandung unsur-unsur SMART (*specific, measurable, achievable, realistic, timebound*). Oleh karena itu, agar pencapaian tujuan akhir semakin terjamin, sebuah tujuan harus dapat dipahami atau jelas, memiliki hasil yang dapat diukur, terdapat target dan ada peningkatan, memiliki sumber daya yang mendukung, dan memiliki periode waktu tertentu.

b. Kemampuan Integrasi

Integrasi adalah pengukuran terhadap tingkat kemampuan suatu organisasi untuk mengadakan sosialisasi, pengembangan konsensus dan komunikasi dengan berbagai macam organisasi lainnya. Integrasi menyangkut proses sosialisasi.

c. Kemampuan Adaptasi

Adaptasi adalah kemampuan organisasi untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Untuk itu digunakan tolak ukur proses pengadaan dan pengisian tenaga kerja.

Dengan menggunakan teori ini diharapkan dapat mengukur efektivitas. Dalam hal ini adalah efektivitas program dalam upaya rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana banjir bandang.

4. Faktor-Faktor Pengaruh Utama atas Efektivitas

Menurut Richard M Steers (1985:209), terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi pencapaian efektivitas, antara lain:

a. Ciri Organisasi

Struktur dan teknologi organisasi dapat mempengaruhi segi-segi tertentu dari efektivitas, dengan berbagai cara. Mengenai struktur, ditemukan bahwa meningkatnya produktivitas dan efisiensi sering merupakan hasil dari meningkatkan spesialisasi fungsi, ukuran organisasi, sentralisasi pengambilan keputusan, dan formalisasi.

b. Ciri Lingkungan

Lingkungan luar dan dalam juga telah dinyatakan berpengaruh atas efektivitas. Bila lingkungan luar meliputi hukum, ekonomi, dan pasar dimana organisasi berusaha

mendapatkan sumber daya dan mendistribusikan keluarannya, lingkungan dalam meliputi kebudayaan, dan sosial yang sangat menentukan perilaku pekerja.

c. Ciri Pekerja

Faktor pengaruh penting yang ketiga atas efektivitas adalah para pekerja itu sendiri. Pada kenyataannya, para anggota organisasi mungkin merupakan faktor yang paling penting atas efektivitas karena perilaku mereka lah yang dalam jangka panjang akan memperlancar atau merintanginya tercapainya tujuan organisasi.

d. Kebijakan dan Praktek Manajemen

Mekanisme ini meliputi penetapan tujuan strategi, pencarian dan pemanfaatan sumber daya secara efisien, menciptakan lingkungan prestasi, proses komunikasi dan pengambilan keputusan, dan adaptasi dan inovasi organisasi.

B. Penanggulangan Bencana

1. Pengertian Penanggulangan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Penanggulangan adalah suatu tahapan, tindakan dan cara menanggulangi. Penanggulangan bencana menurut Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2007 adalah serangkaian upaya

untuk mengatasi pada pencegahan, sebelum, saat, dan sesudah terjadinya bencana atau biasa disebut dengan pra, tahap darurat, dan pasca bencana sesuai dengan ketetapan kebijakan yang sudah ada.

Penanggulangan bencana dilakukan dengan cara bekerja sama dengan instansi. Kerja sama dilakukan agar mempermudah penanggulangan yang dapat dilakukan bersamaan secara langsung menangani bencana tertentu, dan dapat dikerjakan secara tidak langsung yaitu dengan cara saling melengkapi untuk penanggulangan bencana yang terjadi di suatu daerah (Soeladi, 1995).

2. Pengertian Bencana

Bencana menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Pasal 1 angka 1 yaitu peristiwa atau kejadian yang disebabkan oleh faktor alam atau non alam ataupun faktor manusia yang mengancam dan merugikan kehidupan masyarakat seperti kerugian material, hilangnya harta benda, kerusakan lingkungan, dampak psikologis bahkan dapat menyebabkan adanya korban jiwa (Nurjanah dkk 2012, 10).

Dapat digeneralisasi untuk disebut bencana harus dipenuhi beberapa kriteria/kondisi sebagai berikut:

- a. Ada peristiwa;

- b. Terjadi karena faktor alam atau karena ulah manusia;
- c. Terjadi secara tiba-tiba akan tetapi dapat juga terjadi secara perlahan-lahan atau bertahap;
- d. Menimbulkan hilangnya jiwa manusia, harta benda, kerugian sosial-ekonomi, kerusakan lingkungan, dan lain-lain;
- e. Berada diluar kemampuan masyarakat untuk menanggulangnya (Nurjanah dkk 2012, 11).

Menurut *Asian Disaster Reduction Center* (2003) yang dikutip Wijayanto (2012), Bencana merupakan suatu gangguan serius yang dirasakan baik oleh masyarakat yang menimbulkan kerugian secara meluas terhadap berbagai material dan lingkungan (alam) dimana dampak yang terjadi melebihi kemampuan manusia dalam mengatasinya dengan sumber daya yang ada.

Menurut Parker (1992) yang dikutip Dian Wijayanto dalam bukunya "Pengantar Manajemen" (2012), bencana adalah sebuah kejadian yang tidak biasa terjadi diakibatkan oleh alam maupun ulah manusia, salah satunya merupakan imbas dari kesalahan teknologi yang memicu respon dari masyarakat, komunitas, individu serta lingkungan untuk memberikan antusiasme yang bersifat luas.

Sedangkan Haryanto (2001: 35) Mengemukakan : Bencana adalah terjadinya kerusakan pada pola kehidupan normal, yang bersifat merugikan kehidupan manusia, struktur sosial serta munculnya kebutuhan masyarakat.

3. Jenis-Jenis Bencana

Berdasarkan dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana, bencana diklasifikasikan menjadi 3 jenis yaitu sebagai berikut:

- a. Bencana alam adalah bencana yang bersumber dari fenomena alam seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, banjir, topan, tsunami, dan lain-lain.
- b. Bencana Non Alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa non alam berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemik, dan wabah penyakit.
- c. Bencana Sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok, antar komunitas masyarakat dan teror.

Selanjutnya secara umum ada 6 jenis bencana dikelompokkan sebagai berikut:

- a. Bencana geologi seperti longsor/gerakan tanah, letusan gunung api, dan gempa bumi/tsunami.

- b. Bencana *hydro-meteorologi* seperti kebakaran hutan, banjir, banjir bandang, kekeringan, rob/air laut pasang, dan badai/angin topan.
- c. Bencana biologi seperti penyakit tanaman/hewan, dan epidemic.
- d. Bencana kegagalan teknologi seperti kelalaian manusia dalam pengoperasian produk teknologi, kecelakaan transportasi, kesalahan design teknologi, dan kecelakaan/kegagalan industri.
- e. Bencana lingkungan seperti kebakaran (*urban fire*), kebakaran hutan, abrasi pantai, dan pencemaran.
- f. Bencana sosial antara lain konflik sosial, eksodus (pengungsian secara besar-besaran), dan terorisme/ledakan bom (Nurjanah dkk 2012, 20).

4. Penyebab Bencana

Terdapat 3 faktor penyebab terjadinya bencana, yaitu (1) bencana alam karena fenomena alam seperti gempa bumi, tsunami, gunung meletus, (2) faktor non alam yaitu bukan karena fenomena alam dan juga bukan karena perbuatan manusia seperti gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemic, dan wabah penyakit, (3) bencana sosial/manusia yang disebabkan oleh manusia seperti pembangunan fisik berlebihan terutama di kota,

yang tidak atau kurang memperhatikan aspek kelestarian dan keseimbangan alam dan terorisme (Nurjanah DKK 2012, 22).

5. Dampak Bencana

Dampak dari bencana adalah segala sesuatu yang merubah atau merugikan akibat kejadian dari bencana. Dampak yang dirasakan seperti kerusakan atau kehilangan harta benda, luka-luka, kematian, gangguan gaya hidup, kerusakan infrastruktur, kerugian ekonomi, kehilangan mata pencaharian, psikologi terganggu, kehilangan rumah, dan gangguan sistem pemerintahan (Kodoatie Sjarief 2006, 146).

Dampak bencana bervariasi tergantung pada kondisi, kerentanan lingkungan dan masyarakat (Hidayati 2005, 46). Karena berbagai organisasi, baik pemerintah maupun LSM yang telah memberikan bantuan seiring berjalannya waktu, dampak bencana secara fisik perlahan dapat teratasi (Nurrachman Nani 2007, 11).

Banyak persoalan yang dihadapi oleh para korban yang selamat saat terjadinya bencana seperti psikologis yang terganggu penyesuaian diri terhadap konflik fisik, dan kehidupan sosial yang ada setelah terjadinya bencana. Tidak jarang dengan kondisi tersebut dapat menimbulkan konflik batin bagi para korban untuk bisa menerima kenyataan bahwa kondisi sekarang

sudah tidak seperti dulu lagi (Arifin Saru 2008, 5). Bencana menjadi suatu pengalaman traumatik karena bencana dapat merubah diri sendiri dan lingkungan dalam tahap sekejap (Nurrachman Nani 2007, 4).

6. Tahapan-Tahapan Penanggulangan Bencana

Pengertian tahapan adalah sebagai suatu jenjang atau tingkatan (Suharto Edi 2013, 5). Sedangkan penanggulangan adalah suatu tahapan, tindakan dan cara menanggulangi. Penanggulangan bencana menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 adalah serangkaian upaya untuk mengatasi, mulai dari kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi. Tahapan penanggulangan bencana bertujuan untuk meminimalisir dampak suatu bencana yang dimana proses tersebut dilakukan secara berkelanjutan atau berjenjang melalui berbagai kegiatan, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi, agar menimbulkan suatu keadaan tetap aman nyaman tetapi juga tetap terasa berhati-hati dengan bencana. Manajemen bencana bukan saja hanya memberikan pertolongan tetapi juga penanganan bencana yang harus dilakukan dari sebelum bencana terjadi dan juga pasca bencana terjadi.

Manajemen bencana (*Disaster Managemen*) adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari bencana beserta segala aspek yang berkaitan dengan bencana. Cara bekerja manajemen bencana adalah melalui kegiatan-kegiatan yang ada pada setiap kuadran/siklus/bidang kerja yaitu pencegahan, mitigasi, dan kesiapsiagaan, tanggap darurat, serta pemulihan. Tujuannya secara umum untuk melindungi masyarakat beserta harta bendanya dari ancaman bencana (Nurjanah dkk 2012, 42).

Manajemen bencana adalah suatu tahapan yang sudah tersusun yang dilakukan untuk mengurus bencana dengan baik dan aman melalui tiga tahapan (Agus 2012, 20). Adalah sebagai berikut;

a. Pra Bencana

1) Kesiagaan

Menurut Gillespie dan Streeter, Kesiagaan adalah tindakan yang tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan keamanan dan efektifitas respon masyarakat selama bencana sebagai perencanaan, identifikasi sumber daya, sistem peringatan dan pelatihan, simulasi, dan tindakan pra bencana lainnya.

Kesiagaan merupakan tahapan yang sangat berhubungan karena dapat menentukan pertahanan

anggota masyarakat jika suatu saat nantinya menjumpai datangnya bencana.

2) Peringatan Dini

Peringatan dini adalah tahapan dengan cara memberikan peringatan kepada masyarakat sebelum terjadinya bencana, seperti gempa bumi, gunung meletus, banjir atau tsunami. Peringatan dini didasarkan berbagai informasi dari pihak yang berwenang mengenai kemungkinan akan terjadinya suatu bencana, kemungkinan disampaikan kepada semua orang atau golongan terutama bagi mereka yang dimungkinkan terkena bencana (Ramli, 2010).

3) Mitigasi

Mitigasi bencana adalah upaya untuk mencegah atau mengurangi dampak yang ditimbulkan akibat suatu bencana. Mitigasi bencana harus dilakukan secara terencana dan komprehensif melalui berbagai upaya dan pendekatan.

b. Saat Bencana

1) Tanggap Darurat

Tanggap darurat bencana adalah aktivitas yang dilaksanakan dengan cepat ketika saat terjadi bencana

agar tidak ada dampak lebih buruk yang muncul pada saat itu, yang mencakup kegiatan penyelamatan, kebutuhan dasar yang terpenuhi, perlindungan, pemindahan korban, dan pemulihan sarana dan prasarana. Kegiatan tanggap darurat adalah:

- a) Langkah pertama adalah menyelamatkan korban dan manusia (*rescue*);
- b) Menyelamatkan harta benda dan dokumen penting;
- c) Perlindungan masyarakat umum (*salvage*).

2) Penanggulangan Bencana

Semasa menjalankan tanggap darurat, usaha yang dilaksanakan adalah menanggulangi bencana sesuai pada jenis dan sifatnya. Membutuhkan kemahiran dan usaha khusus sesuai dengan keadaan dan skala kejadian. Untuk dapat mengatasi berbagai macam bencana maka tim tanggap darurat patut diorganisir dan dirancang agar bisa mengatasi bermacam-macam jenis bencana.

c. Pasca Bencana Banjir Bandang

Penanggulangan pasca bencana merupakan berbagai upaya kegiatan yang dilakukan seperti kegiatan mitigasi penyelamatan, rehabilitasi, dan rekonstruksi baik itu sebelum

terjadinya bencana dan setelah terjadinya bencana (Zahra Zafira, 2018). Yang kemudian dapat ditarik kesimpulan bahwa penanggulangan pasca bencana dilakukan pada saat terjadinya suatu bencana (pas bencana) atau setelah terjadinya bencana (pasca bencana), hal ini sangat perlu dilakukan sebagaimana telah dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 pada pasal 4 poin a, memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman bencana, maka dapat dipahami bahwa pada poin ini merupakan suatu bentuk upaya keamanan dalam kehidupan masyarakat agar terhindar dari berbagai ancaman bencana alam mengingat kondisi geografis Indonesia yang masuk dalam kategori rawan bencana. Kemudian pada poin c, menjamin terselenggaranya penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinir dan menyeluruh.

Menjamin terselenggaranya penanggulangan pasca bencana mengarah pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 menjelaskan bahwa penanggulangan pasca bencana dilakukan setelah terjadinya bencana. Maka pada saat terjadinya bencana dilakukan kegiatan tanggap darurat, dan setelah kegiatan tanggap darurat dilakukan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi.

1) Tanggap Darurat

Tanggap darurat adalah upaya yang dilakukan pada saat terjadinya suatu bencana, terutama pada penyelamatan korban kemudian dievakuasi dengan melibatkan tim medis.

2) Rehabilitasi

Menurut Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 11 Tahun 2008 tentang pedoman rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana. Rehabilitasi adalah langkah awal yang dilakukan setelah terjadinya bencana untuk perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pasca bencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pasca bencana.

3) Rekonstruksi

Menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 ayat 1 pasal 10 dan pasal 11 tentang Penanggulangan Bencana Rekonstruksi adalah perumusan kebijakan dan usaha serta langkah-langkah nyata yang terencana baik, konsisten dan berkelanjutan untuk membangun kembali

secara permanen semua sarana, prasarana, dan sistem kelembagaan, baik di tingkat pemerintahan maupun masyarakat, dengan sasaran utama tumbuh berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial, dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban, dan bangkitnya peran dan partisipasi masyarakat sipil dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat di wilayah pasca bencana. Lingkup pelaksanaan rekonstruksi terdiri atas program rekonstruksi fisik dan program rekonstruksi non fisik.

Rekonstruksi adalah program jangka menengah dan jangka panjang yang bertujuan untuk perbaikan infrastruktur sosial dan ekonomi yang bertujuan untuk menjalankan kembali roda kehidupan seperti sediakala.

C. Rehabilitasi

1. Pengertian Rehabilitasi

Rehabilitasi menurut Renwick & Friefeld adalah suatu kegiatan multidisipliner yang memfungsikan kembali aspek-aspek fisik, emosi, kognisi, dan sosial sepanjang kehidupan individu sehingga mampu melakukan mobilitas, komunikasi, aktivitas harian, pekerjaan, hubungan sosial, dan kegiatan diwaktu luang. Banjir Bandang : Kegiatan pemulihan kembali

pada korban terdampak harus segera dilaksanakan. Demikian juga dengan material yang mengalami kerusakan segera diperbaiki atau diganti.

Rehabilitasi dapat juga diartikan sebagai segala upaya perbaikan untuk mengembalikan fungsi secara minimal terhadap sarana, prasarana, dan fasilitas umum yang rusak akibat bencana. Dengan pengembalian fungsi tersebut, layanan publik atau masyarakat dapat dilaksanakan. Sasaran utamanya adalah normalisasi atau berjalannya secara wajar berbagai aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat seperti pada kondisi sebelum terjadinya bencana (Nurjanah dkk 2012, 74).

Rehabilitasi Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah pemulihan atau penyembuhan kepada kedudukan (keadaan, nama baik) seperti perbaikan anggota tubuh yang rusak dan sebagainya atas individu (contohnya pasien rumah sakit, dan korban bencana) agar nantinya dapat menjadi manusia yang tetap berguna dan dapat diterima kembali di masyarakat.

Sesuai dengan Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 11 Tahun 2008 tentang pedoman rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana, rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek

pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pasca bencana dengan sasaran utama normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pasca bencana, berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 9 Tahun 2011 tentang Penanggulangan Bencana diatur pada pasal 35 Rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 34 huruf a dilakukan melalui kegiatan meliputi:

- a. Perbaikan lingkungan daerah bencana;
- b. Perbaikan sarana dan prasarana umum;
- c. Pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat;
- d. Pemulihan sosial psikologis;
- e. Pelayanan kesehatan;
- f. Rekonsiliasi dan resolusi konflik;
- g. Pemulihan sosial ekonomi budaya;
- h. Pemulihan keamanan dan ketertiban;
- i. Pemulihan fungsi pemerintahan;
- j. Pemulihan fungsi pelayanan publik.

2. Strategi dan Sasaran Rehabilitasi

Strategi dan sasaran penyelenggaraan kegiatan rehabilitasi adalah sebagai berikut:

Strategi:

- a. Melibatkan dan memberdayakan masyarakat dalam tahapan pelaksanaan rehabilitasi;
- b. Memperhatikan karakter bencana, daerah dan budaya masyarakat setempat;
- c. Mendasarkan pada kondisi aktual di lapangan (tingkat kerugian atau kerusakan serta kendala medan);
- d. Menjadikan kegiatan rehabilitasi sebagai gerakan dalam masyarakat dengan menghimpun masyarakat sebagai korban maupun pelaku aktif kegiatan rehabilitasi dalam kelompok swadaya;
- e. Menyalurkan bantuan pada saat, bentuk dan besaran yang tepat sehingga dapat memicu atau membangkitkan gerakan rehabilitasi dan penanganan bencana yang menyeluruh.

Sasaran Kegiatan Rehabilitasi adalah:

- a. Kelompok manusia dan segenap kehidupan dan penghidupan yang terganggu oleh bencana;
- b. Sumber daya yang mengalami kerusakan akibat bencana sehingga berkurang nilai gunanya;
- c. Ekosistem atau lingkungan alam untuk mengembalikan fungsi ekologisnya.

D. Rekonstruksi

Dalam perencanaan pembangunan nasional rekonstruksi memiliki arti “re” berarti pembaharuan sedangkan “konstruksi” sebagaimana penjelasan diatas memiliki arti suatu sistem atau bentuk. Beberapa pakar mendefenisikan secara sederhana penyusunan atau penggambaran kembali dari bahan-bahan yang ada dan disusun kembali sebagaimana adanya atau kejadian semula (Pusat Bahasa 2005, 9).

Rekonstruksi adalah pengembalian suatu tempatnya yang semula; penyusunan atau penggambaran kembali dari bahan-bahan yang ada dan disusun kembali sebagaimana adanya atau kejadian semula (B.N. Marbun, 1996, 469).

Rekonstruksi adalah perumusan kebijakan dan usaha serta langkah-langkah nyata yang terencana baik, konsisten dan berkelanjutan untuk membangun kembali secara permanen semua sarana, prasarana, dan sistem kelembagaan, baik di tingkat pemerintahan maupun masyarakat, dengan sasaran utama tumbuh berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban, dan bangkitnya peran dan partisipasi masyarakat sipil dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat di wilayah pasca bencana. (Undang-Undang Nomor

24 Tahun 2007 ayat 1 pasal 10 dan pasal 11 tentang Penanggulangan Bencana).

Dari beberapa uraian diatas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana banjir bandang merupakan kegiatan untuk memberikan perbaikan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai dengan jenjang yang mencukupi pada wilayah pasca bencana banjir bandang dengan tujuan utama adalah untuk mengembalikan seperti semula dan usaha serta langkah-langkah nyata yang terencana baik, konsisten dan berkelanjutan untuk yang terencana baik, konsisten dan berkelanjutan untuk membangun kembali secara permanen semua sarana, prasarana, dan sistem kelembagaan, baik di tingkat pemerintahan maupun masyarakat. Kegiatan tersebut untuk memecahkan masalah yang dirasakan oleh perorangan, keluarga dan masyarakat yang dilaksanakan oleh pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, organisasi sosial agar masyarakat yang terkena bencana tersebut dapat hidup normal kembali.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 9 Tahun 2011 tentang Penanggulangan Bencana, diatur dalam pasal 36 Rekonstruksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 34 huruf b dilakukan melalui kegiatan meliputi:

- a. Pembangunan kembali sarana dan prasarana;
- b. Pembangunan kembali sarana sosial masyarakat;
- c. Pembangkitan kembali kehidupan sosial budaya masyarakat;
- d. Penerapan rancang bangun yang tepat dan penggunaan peralatan yang lebih baik serta tahan bencana;
- e. Partisipasi dan peran serta lembaga serta organisasi kemasyarakatan, dunia usaha dan masyarakat;
- f. Peningkatan fungsi kondisi sosial, ekonomi, dan budaya;
- g. Peningkatan fungsi pelayanan publik;
- h. Peningkatan pelayanan utama dalam masyarakat.

E. Banjir Bandang

Banjir dapat diartikan sebagai tergenangnya suatu tempat akibat meluapnya air yang melebihi kapasitas pembuangan air disuatu wilayah dan menimbulkan kerugian ekonomi, sosial, dan fisik. (Rahayu dkk, 2009).

Banjir merupakan peristiwa dimana daratan yang biasanya kering menjadi tergenang air, hal ini disebabkan karena curah hujan yang cenderung tinggi dan kondisi topografi wilayah berupa dataran rendah hingga cekung. Selain itu, terjadinya banjir juga dapat disebabkan oleh limpasan air permukaan yang meluap sehingga volumenya melebihi kapasitas pengaliran sistem drainase atau sistem aliran sungai. Adapun penyebab tanah tidak mampu lagi

menyerap air karena rendahnya kemampuan infiltrasi tanah sehingga terjadinya bencana banjir. Banjir juga dapat terjadi akibat naiknya permukaan air lantaran curah hujan yang di atas normal, tanggul atau bendungan yang bobol, perubahan suhu, terhambatnya aliran air di tempat lain (Ligal, 2008).

Menurut Kodoatie dan Sugiyanto (2002), faktor penyebab terjadinya bencana banjir dapat diklasifikasikan dalam dua kategori, yang pertama banjir alami, kedua banjir tindakan manusia. Banjir alami diakibatkan oleh curah hujan, erosi, fisiografi dan sedimentasi. Sedangkan banjir akibat manusia disebabkan karena aktifitas atau ulah manusia yang menyebabkan perubahan terhadap lingkungan seperti perubahan pada kondisi daerah aliran sungai (DAS).

Peristiwa bencana banjir pada umumnya disebabkan oleh intensitas curah hujan yang sehari-hari dengan curah hujan di atas normal, sehingga mengakibatkan pengaliran air yang begitu tinggi dari anak sungai atau sungai sehingga tidak mampu lagi menampung debit air yang mengakibatkan sungai meluap hingga kedaratan permukiman warga. (Nurjanah, 2013). Tidak hanya disebabkan oleh curah hujan yang tinggi, banjir juga disebabkan oleh alam yang statis, geografis, geomorfologi, topografis, serta aktifitas manusia seperti pembukaan lahan yang tidak sesuai.

Banjir yang disebabkan oleh curah hujan yang tinggi sehingga melebihi kapasitas penyaluran sistem pengaliran air yang terdiri dari sistem sungai yang terbentuk karena proses alam dan aliran air yang dibuat oleh manusia. Seperti halnya kasus banjir bandang yang terjadi pada beberapa daerah di Kabupaten Luwu Utara.

Banjir bandang adalah banjir yang datang secara tiba-tiba yang disebabkan oleh karena tersumbatnya sungai maupun karena penggundulan hutan di sepanjang sungai sehingga merusak rumah-rumah penduduk maupun menimbulkan korban jiwa. Banjir bandang merupakan suatu proses aliran air yang deras dan pekat karena disertai dengan muatan massif bongkah-bongkah bebatuan dan tanah serta batang-batang kayu hidrologi yaitu intensitas hujan yang tinggi, faktor klimatologis, dan juga geologis antara lain longsor dan pembendungan alamiah di daerah hulu (Meon, 2006). Selain berbeda dari segi muatan yang tersangkut dari aliran air tersebut, banjir bandang ini juga berbeda dibandingkan banjir biasa. Sebab, dalam proses banjir ini, terjadi kenaikan debit air secara tiba-tiba dan cepat (Price, 2009).

Banjir bandang dapat dikatakan salah satu bencana alam yang relatif baru dikenal dan akhir-akhir ini muncul dengan intensitas cukup tinggi. Banjir bandang merupakan aliran air dalam jumlah besar yang mengalir dari hulu sungai (sebagai pengirim) ke hilir

(sebagai penerima) dengan kecepatan yang tinggi. Banjir bandang dibedakan dari jenis banjir lainnya karena mempunyai arus aliran yang sangat cepat, mempunyai daya rusak yang besar, genangan airnya yang cepat hilang dan membawa material lumpur yang banyak (viskositas tinggi) serta sering disertai dengan material, batu, dan pepohonan.

Pada umumnya banjir bandang yang merupakan meluapnya air sungai dengan aliran yang begitu deras walaupun tidak begitu dalam dapat menghanyutkan hewan, harta benda, dan bahkan manusia. Aliran air yang membawa berbagai campuran material daya rusaknya akan semakin tinggi, bahkan mampu merobohkan bangunan dan menghanyutkannya. Dan pada saat luapan sudah surut semua kerusakan akan nampak jelas baik itu pada tanaman, perumahan, bahkan tidak dapat dipungkiri akan timbul wabah penyakit.

Relokasi pasca bencana banjir adalah pilihan yang dilakukan oleh masyarakat untuk berpindah dari lingkungan biasa ke sesuatu yang baru dan dilakukan secara sukarela dan secara bersama dengan masyarakat lainnya, karena beberapa faktor yang harus dipertimbangkan. Relokasi lebih dominan kepada tempat tinggal. Relokasi sendiri dilatarbelakangi berbagai macam alasan seperti bencana alam, konflik, pekerjaan dan arahan dari pemerintah.

Relokasi sendiri memiliki beberapa syarat untuk dikategorikan dalam relokasi. Fitrianti (2018: 15-16).

Maksud dari penjelasan diatas adalah relokasi merupakan proses perpindahan tempat tinggal secara massal atau berkelompok secara sukarela atau karena keadaan yang mendesak dari daerah yang bermasalah ke lokasi yang lebih aman. Misalnya sekelompok masyarakat dari beberapa kepala keluarga yang awalnya tinggal di pinggir sungai namun setelah terjadinya banjir bandang yang membuat mereka kehilangan tempat tinggal terpaksa harus pindah ke lokasi yang lebih aman ke tempat yang lebih tinggi seperti pegunungan untuk menghindari kemungkinan yang tidak diinginkan.

F. Upaya Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 Bencana adalah peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan oleh baik itu faktor alam atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.

Kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, serta timbulnya korban jiwa pasca bencana, menurut Peraturan Pemerintah Nomor

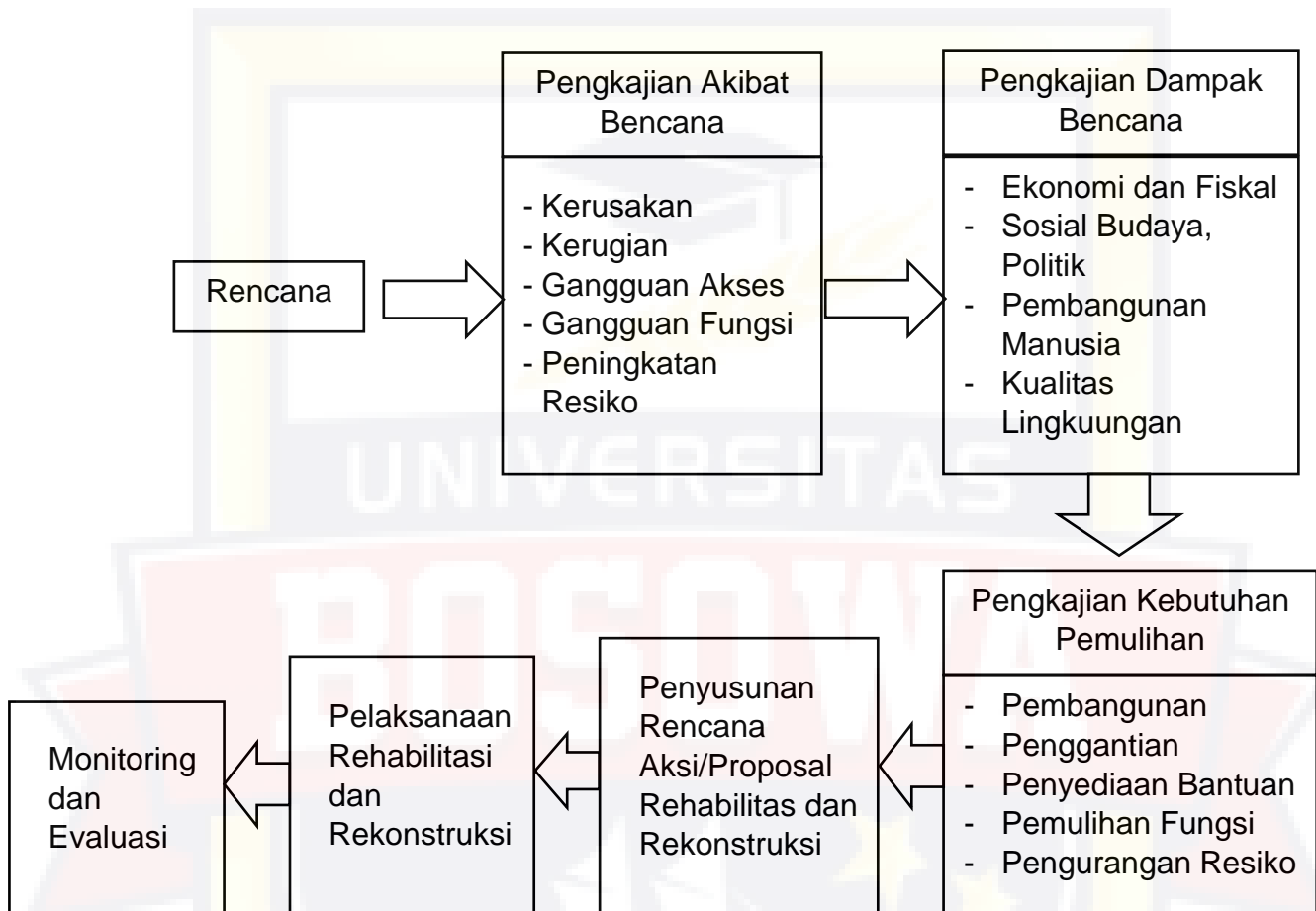
21 Tahun 2008 Pemerintah bertanggung jawab untuk melakukan rehabilitasi dan rekonstruksi.

G. Manajemen Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca

Bencana

Pada saat pasca bencana perlu adanya pengkajian kebutuhan pasca bencana. Mulai dari pengkajian dan penilaian akibat, analisis dampak, dan perkiraan kebutuhan yang menjadi dasar bagi penyusunan rencana aksi rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana.

Untuk pengkajian akibat bencana yaitu kita melihat mulai dari kerusakan, kerugian, gangguan akses, gangguan fungsi, dan peningkatan resiko terjadinya kembali bencana. Pada pengkajian dampak bencana dapat dilihat dari ekonomi dan fisikal, sosial-budaya dan politik, pembangunan manusia, dan kualitas lingkungan. Sedangkan untuk pengkajian kebutuhan yang sekiranya benar perlu dilakukan pembangunan, penggantian, penyediaan bantuan, pemulihan fungsi, serta pengurangan resiko bencana di masa yang akan datang. Yang mana dari pengkajian tersebut diproses melalui rencana aksi dengan koordinasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah.



Gambar 2.1 Alur Proses PDNA

(Sumber: Perka BNPB Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Pedoman JITU PASNA)

H. Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No.	Judul dan Penulis	Rumusan Masalah	Metode Penelitian	Kesimpulan	Perbedaan
1.	Efektivitas Pelaksanaan Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Sektor Permukiman Pascabencana Gempabumi di Pulau Lombok (Embung Suryani)	a. Bagaimana evaluasi efektivitas pelaksanaan kegiatan pemulihan dan peningkatan fisik pascabencana? b. Apa saja kendala dan permasalahan yang dihadapi oleh Kabupaten/kota terdampak dalam pelaksanaan kegiatan pemulihan dan peningkatan fisik pascabencana?	Deskriptif Kualitatif	Secara umum pelaksanaan pemulihan dan peningkatan fisik sektor permukiman dan infrastruktur pasca bencana gempa bumi di Kabupaten/Kota terdampak di NTB dapat dievaluasi berdasarkan 5 indikator yaitu: 1) Tepat perencanaan: jumlah unit, kategori kerusakan; 2) Tepat administrasi: pembentukan pokmas, dokumentasi persyaratan penerima, kesesuaian dengan dokumentasi teknis; 3) Tepat penyerapan anggaran: sesuai dengan RAB dan realisasi; 4) Tepat spesifik teknis: jenis bangunan konvensional, baja, kayu, Risha kualitas material; 5) Tepat waktu: tepat sesuai dengan jadwal realisasi. Adapun permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan pemulihan yaitu masalah administrasi stimulan, banyak ketidaksesuaian dokumen teknis penerima stimulan, tidak memenuhi dokumen persyaratan penerima, dan permasalahan administrasi lainnya.	Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu dalam penelitian ini membahas tentang efektivitas pelaksanaan program rehabilitasi dan rekonstruksi sektor permukiman pascabencana gempa bumi dan hanya fokus membahas satu sektor saja yaitu sektor permukiman. Sedangkan dalam penelitian penulis lebih fokus meneliti tentang efektivitas program dalam upaya rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana banjir bandang dan tidak hanya membahas satu sektor saja namun membahas beberapa sub sektor yaitu sektor permukiman, infrastruktur, sosial, dan lintas sektor. Dan perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis juga terletak di indikator yang digunakan.
2.	Upaya Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah Pasca Bencana Erupsi Gunung Merapi di Kecamatan Kemalang Kabupaten Klaten Provinsi Jawa Tengah (Putri Cep Alam, Herbasuki Nurcahyanto, Susi Sulandari)	Bagaimana upaya penerapan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi Kecamatan Kemalang Kabupaten Klaten dalam sektor infrastruktur, ekonomi, perumahan, dan sosial/	Deskriptif kualitatif	<ul style="list-style-type: none"> • Sektor Perumahan : Bantuan yang pemerintah berikan bertolak belakang dengan Rencana Aksi, Dalam relokasi perumahan, masyarakat desa Balerante tidak menyetujui penawaran pemerintah; • Sektor Infrastruktur : Pemerintah masih belum melakukan pembangunan khusus untuk mengurangi angka risiko bencana di kemungkinan bencana sosial; • Sektor Sosial : Pemerintah belum menyentuh psikis warga yang terkena bencana, sehingga masyarakat masih trauma . 	Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu dalam penelitian ini membahas tentang upaya rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah pasca bencana erupsi gunung merapi dan lebih fokus mengkaji di sektor perumahan, infrastruktur dan sosial. Sedangkan dalam penelitian penulis membahas tentang efektivitas program dalam upaya rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana banjir bandang.

Lanjutan

No.	Judul dan Penulis	Rumusan Masalah	Metode Penelitian	Kesimpulan	Perbedaan
3.	Peran BPBD Dalam Manajemen Bencana Erupsi Gunung Semeru di Kabupaten Lumajang (Alnizae Zagarino)	Bagaimana peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lumajang dalam manajemen bencana erupsi Gunung Semeru di Kabupaten Lumajang?	Deskriptif Kualitatif	Dalam manajemen bencana erupsi Gunung Semeru di Kabupaten Lumajang, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lumajang, berperan penuh dalam proses penanganan bencana. Adapun proses penanggulangan bencana sesuai SOP yang berlaku ada tiga tahapan pertama adalah pra bencana, dalam tahap pra bencana, penanggulangan bencana dilakukan dengan pencegahan dan kesiapsiagaan. BPBD membentuk destana atau desa tangguh bencana. Kedua adalah saat tanggap darurat, pada tahap ini penyelenggara penanggulangan bencana meliputi pembuat posko untuk tempat evakuasi para pengungsi terdampak, dan ketiga adalah pasca bencana, pada tahap ini BPBD membentuk tim Jitupasna (Kajian kebutuhan pasca bencana).	Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu dalam penelitian ini membahas tentang penanggulangan bencana dalam manajemen bencana erupsi Gunung Semeru di Kabupaten Lumajang, sedangkan dalam penelitian penulis meneliti tentang efektivitas program dalam upaya rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana banjir bandang oleh pemerintah daerah Kabupaten Luwu Utara
4.	Efektivitas dan Efisiensi Peran Pemerintah Dalam Tanggap Darurat Banjir di Kabupaten Sragen (Aulia Nuriasari dan Jawoto Sih Setyono)	Bagaimana kinerja dalam tanggap darurat banjir di Kabupaten Sragen dari tahun 2007-2012?	Deskriptif Kuantitatif	Efektivitas dan efisiensi peran pemerintah dalam tanggap darurat banjir di Kabupaten Sragen diperoleh temuan studi bahwa kinerja lembaga penanganan banjir dalam tanggap darurat memiliki tingkat efektivitas sebesar 6,975 dan tingkat efisiensi sebesar 6,937 sehingga termasuk dalam golongan efektif dan efisien.	Adapun perbedaan dengan penelitian penulis yaitu peneliti lebih fokus membahas dari segi efektivitas program dalam upaya rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana banjir bandang, sedangkan dalam penelitian sebelumnya lebih mengkaji tentang efektivitas dan efisiensi peran pemerintah dalam tanggap darurat banjir. Jadi jelas perbedaannya satu mengkaji tentang program dan satunya lagi mengkaji tentang peran atau lembaganya.

Lanjutan

No.	Judul dan Penulis	Rumusan Masalah	Metode Penelitian	Kesimpulan	Perbedaan
5.	Peran BPBD dalam program rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana kebakaran di Krukut Tamansari Jakarta Barat (Dea Riska)	Bagaimana peran BPBD Provinsi DKI Jakarta dalam melaksanakan program rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana kebakaran di Krukut Tamansari Jakarta Barat ?	Deskriptif Kualitatif	Pada penanggulangan pasca bencana kebakaran di Krukut BPBD berperan sebagai koordinator yang mengkoordinir prosesnya rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana yang bekerja sama dengan lembaga terkait seperti; Dinas Perumahan dan Lingkungan, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Dinas Perhubungan, PMI, PLN, Tokoh Agama dan lain sebagainya. BPBD mengkoordinir para pihak terkait dengan cara; BPBD mengambil keputusan dan penentu suatu kebijakan didalam penanggulangan bencana.	Adapun perbedaan dari penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu dalam penelitian ini membahas tentang peran BPBD dalam program rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana kebakaran, dan metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, sedangkan dalam penelitian penulis membahas tentang efektivitas program dalam upaya rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana banjir bandang, dan penulis menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dan kuantitatif.
6.	Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Dalam Penanggulangan Bencana Banjir di Kota Pekanbaru (Nurmalan Harahap)	Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Dalam Penanggulangan Bencana Banjir Kota Pekanbaru?	Deskriptif Kualitatif	Kinerja BPBD Kota Pekanbaru dilihat dari indikator masukan dinilai masih kurang terlaksana dengan baik, hal ini ditandai dengan belum ada pembagian tugas dari masing-masing personil dalam menanggulangi banjir di Pekanbaru, Indikator keluaran masih belum terlaksana karena belum ada dilakukan pendidikan dan pelatihan kepada masyarakat terkait penanggulangan bencana banjir, dan kinerja BPBD dalam indikator dampak dinilai kurang terlaksana dengan baik karena belum adanya terbentuk masyarakat yang benar-benar peduli dengan lingkungan.	Perbedaan penelitian penulis dalam hal ini adalah metode analisis yang digunakan dimana, dalam penelitian ini hanya menggunakan analisis deskriptif kualitatif dan perbedaan juga terletak dari segi indikator yang digunakan, sedangkan dalam penelitian penulis menggunakan metode analisis campuran/gabungan dari deskriptif kualitatif dan kuantitatif, dan indikator yang digunakan yaitu indikator perda rehabilitasi dan rekonstruksi Kabupaten Luwu Utara.

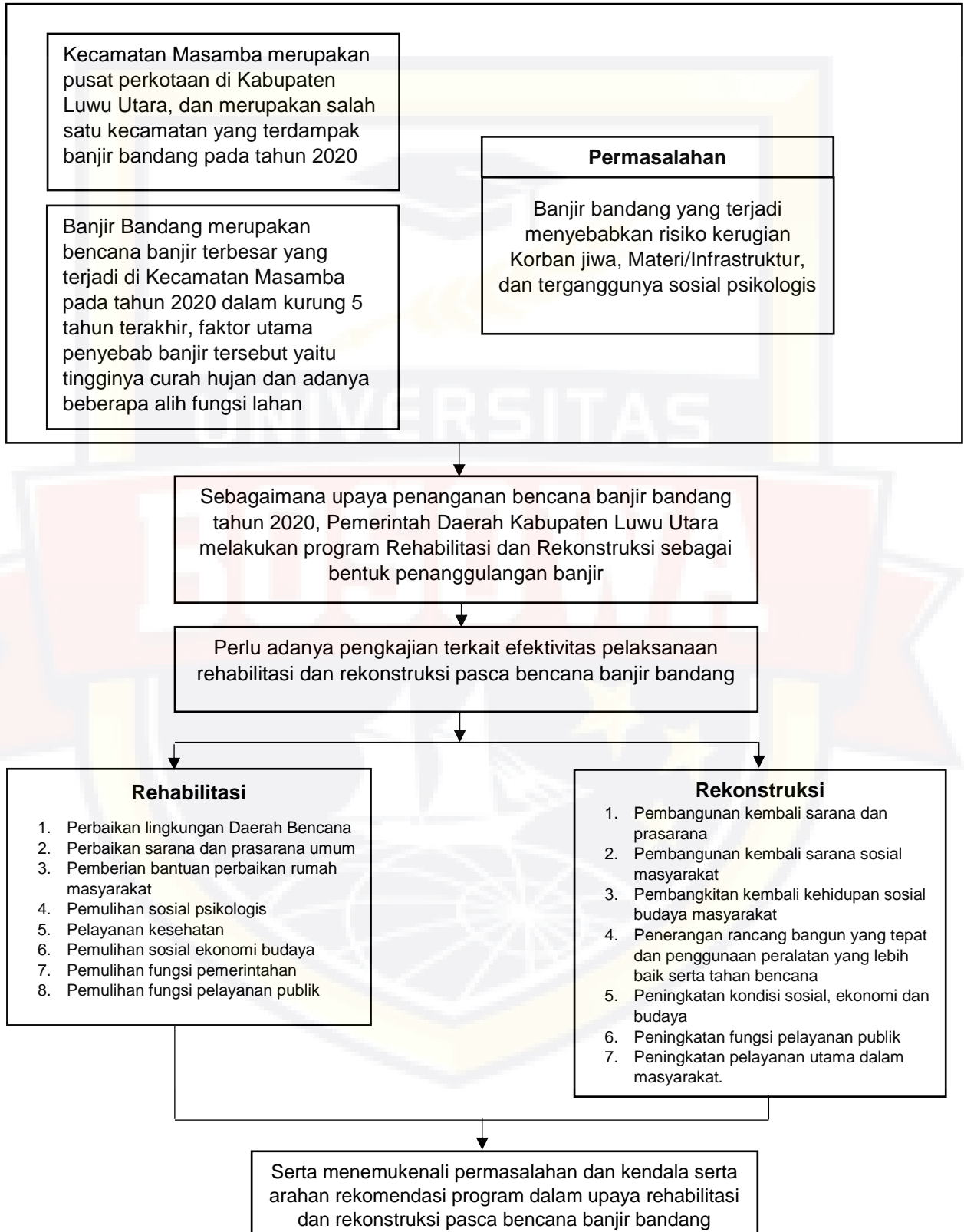
Lanjutan

No.	Judul dan Penulis	Rumusan Masalah	Metode Penelitian	Kesimpulan	Perbedaan
7.	<p>Efektivitas Komunikasi BPBD Kabupaten Banjar Dalam Mengurangi Resiko Bencana Banjir di Kabupaten Banjar</p> <p>(Muhammad Yunus Jarmie)</p>	<p>Bagaimana Efektivitas Komunikasi BPBD Kabupaten Banjar Dalam Mengurangi Resiko Bencana Banjir di Kabupaten Banjar?</p>	<p>Deskriptif Kuasalitas</p>	<p>Teknik komunikasi yang digunakan petugas BPBD Kabupaten Banjar berupa pemberian informasi melalui sosialisasi dan diskusi melalui forum Pengurangan Resiko Banjir (PRB) berbasis masyarakat, dan praktek penanggulangan bencana banjir melalui simulasi bencana banjir pada kejadian berikutnya.</p>	<p>Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu dalam penelitian ini lebih fokus membahas tentang efektivitas komunikasi BPBD dalam mengurangi resiko banjir, dan metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kuasalitas, sedangkan dalam penelitian penulis lebih fokus meneliti tentang efektivitas program dalam upaya rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana banjir dengan menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dan kuantitatif.</p>
8.	<p>Implementasi Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Korban Banjir di Kota Manado</p> <p>(Nastasia Thalia Sigarlaki, Sarah Sambiran)</p>	<p>Bagaimana implementasi program rehabilitasi dan rekonstruksi korban banjir di Kota Manado Studi di Kecamatan Paal Dua?</p>	<p>Deskriptif Kualitatif</p>	<p>Berdasarkan pengamatan terhadap proses pelaksanaan implementasi program dan faktor-faktor yang mendukung dan menghambat keberhasilan pelaksanaan program, maka pelaksanaan dari pada program rehabilitasi dan rekonstruksi bencana banjir belum berjalan dengan baik, karena masih banyak masalah seperti penyaluran yang tidak merata, pendataan yang tidak baik yang terjadi di lapangan, serta masih banyak kekurangan yang perlu diperhatikan untuk diperbaiki.</p>	<p>Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu dalam penelitian ini lebih membahas tentang implementasi program rehabilitasi dan rekonstruksi terhadap korban banjir, sedangkan dalam penelitian penulis lebih membahas terhadap efektivitas program dalam upaya rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana banjir bandang, dan metode penelitian yang digunakan yaitu kualitatif dan kuantitatif.</p>

Lanjutan

No.	Judul dan Penulis	Rumusan Masalah	Metode Penelitian	Kesimpulan	Perbedaan
9.	Peran BPBD Dalam Penanggulangan Bencana Banjir di Kelurahan Lewaja Kecamatan Enrekang Kabupaten Enrekang (Henrika Riantika)	Bagaimana peran BPBD dalam penanggulangan bencana banjir di Kelurahan Lewaja Kecamatan Enrekang Kabupaten Enrekang?	Kualitatif	Peran BPBD dalam penanggulangan resiko banjir di Kelurahan Lewaja Kecamatan Enrekang Kabupaten Enrekang sudah baik, yaitu bahwa penanggulangan bencana dilakukan secara cepat dan tepat sesuai dengan tuntutan keadaan. Adanya kondisi yang baik dengan instansi atau dinas terkait sebagai upaya penanggulangan bencana yang didasarkan pada kondisi yang baik dan saling mendukung serta dalam penanggulangan bencana melibatkan berbagai pihak secara seimbang.	Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu dalam penelitian ini membahas tentang peran BPBD dalam penanggulangan bencana banjir, sedangkan dalam penelitian penulis lebih fokus membahas terhadap efektivitas program dalam upaya rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana banjir oleh pemerintah daerah Kabupaten Luwu Utara.
10.	Analisis Penanggulangan Bencana Banjir Oleh BPBD Kota Bengkulu (Gunawan Pratama)	Bagaimana penanggulangan yang dilakukan oleh BPBD terhadap banjir di Kota Bengkulu?	Deskriptif Kualitatif	Penanggulangan bencana banjir oleh BPBD Kota Bengkulu belum berjalan dengan maksimal, masih terdapat permasalahan dan kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan tersebut. Hal tersebut ditandai dengan pencegahan bencana banjir, penanganan darurat bencana banjir, rehabilitasi dan rekonstruksi bencana banjir masih banyak ditemukan permasalahan.	Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu dalam penelitian ini membahas tentang bagaimana menganalisis penanggulangan bencana banjir yang dilakukan oleh BPBD Kota Bengkulu dengan cara menggunakan metode deskriptif kualitatif. Sedangkan dalam penelitian penulis lebih membahas tentang efektivitas program dalam upaya rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana banjir oleh pemerintah daerah Kabupaten Luwu Utara, dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif dan kuantitatif.

I. Kerangka Berfikir



Gambar 2.2 Kerangka Berfikir

(Sumber: Penulis, 2022)

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sumber Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian deskriptif yang menggambarkan dan menjabarkan tentang fenomena sosial yang diangkat dalam suatu penelitian. Dilakukan dengan mengklasifikasi dan mencari seluas-luasnya tentang fenomena sosial.

Pendekatan dari penelitian ini merupakan pendekatan kualitatif dan kuantitatif yang digunakan untuk menggambarkan tanggapan responden terhadap efektivitas program rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana banjir bandang di Kabupaten Luwu Utara.

2. Sumber Penelitian

a. Data Primer

Data primer adalah data-data yang diperoleh secara langsung dari sumber-sumber, pihak-pihak yang menjadi objek penelitian ini antara lain data yang didapat langsung dari pemerintah daerah tepatnya kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Luwu Utara atau lebih khusus Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi BPBD Kabupaten Luwu

Utara, serta dinas terkait seperti dinas sosial, dinas pengairan, PUPR, dan dinas lainnya. Selain itu peneliti juga melakukan pengamatan langsung di daerah yang terdampak banjir bandang.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data-data yang diperoleh dari arsip-arsip atau dokumen-dokumen yang terdapat di instansi-instansi di daerah Kabupaten Luwu Utara terutama yang berkenaan dengan arsip-arsip laporan, buku-buku literature, internet, dan data yang menunjang.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Lokasi adalah tempat dimana peneliti mampu menangkap fenomena yang akan diteliti dan harus dipilih dengan cermat sehingga relevan dengan tujuan penelitian. Relevansi data yang akan dibutuhkan berkenaan dengan upaya rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana banjir, dapat diambil di:

- a. Kepala Koordinator rehabilitasi dan rekonstruksi Kabupaten Luwu Utara
- b. Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara

c. Masyarakat yang terdampak banjir, serta mengamati langsung kondisi daerah yang terkena dampak pasca bencana banjir bandang.

2. Waktu Penelitian

Adapun waktu yang dilakukan untuk proses penyusunan tugas akhir dengan judul Efektivitas Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Banjir Bandang di Kabupaten Luwu Utara, selama terhitung dari:

Tabel 3.1 Jadwal Pelaksanaan Penelitian

No.	Agenda	Waktu																				
		Februari				Maret				April				Mei				Juni				
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
1	Persiapan	■																				
2	Penyusunan Bab I, II, III		■	■	■	■																
3	Survey Pengambilan Data						■	■														
4	Penyusunan Bab IV dan V							■	■													
5	Seminar Hasil								■													
6	Asistensi										■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
7	Tutup																					■

Sumber: Hasil Rangkuman Jadwal Penelitian, 2022

C. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi adalah keseluruhan obyek penelitian yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti atas semua kasus

individu dan gejala yang ada di daerah penelitian (Sumaatmadja, 1988 : 112).

Populasi dalam penelitian ini adalah Kepala koordinator rehabilitasi dan rekonstruksi Kabupaten Luwu Utara, Bapak Camat Kecamatan Masamba, masyarakat yang terkait atau mengetahui pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi di Kecamatan Masamba, dan masyarakat yang terdampak banjir bandang di Kecamatan Masamba.

2. Sampel

Sampel penelitian adalah sebagian dari populasi yang mewakili populasi yang bersangkutan (Sumaatmadja, 1988 :12).

Teknik pengambilan sampel dilakukan dengan metode *purposive sumpling*. Metode *purposive sumpling* adalah peneliti memilih informan atau narasumber yang dianggap mengetahui dan memahami permasalahan yang akan diteliti secara mendalam dan dapat dipercaya menjadi sumber data data yang tepat.

Adapun subjek penelitian yang akan diambil adalah:

- a. Kepala Koordinator rehabilitasi dan rekonstruksi Daerah Kabupaten Luwu Utara;
- b. Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi BPBD Kabupaten Luwu Utara;

- c. Kepala Camat Masamba, dan para perangkat daerah Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara
- d. Tokoh masyarakat yang terkait atau mengetahui pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi
- e. Masyarakat yang terdampak banjir bandang di Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara.

Mengingat banyaknya jumlah populasi yang tidak diketahui dalam penelitian ini, maka peneliti akan menggunakan rumus Cochran sebagai metode untuk menentukan ukuran jumlah sampel yang tepat dalam penelitian ini. Rumus Cochran merupakan salah satu rumus yang digunakan untuk menentukan ukuran jumlah sampel pada suatu populasi yang jumlahnya tidak diketahui (Sugiyono dalam Dalame dan Rustam, 2020). Adapun rumus Cochran sebagaimana yang diperoleh dalam Utarsih., dkk (2020), adalah sebagai berikut:

$$No = \frac{Z^2 \cdot pq}{e^2}$$

Dimana:

- No = Ukuran sampel/jumlah sampel yang diperlukan
- Z = Tingkat kepercayaan/tingkat keyakinan sampel yang dibutuhkan, pada $\alpha = 5\%$ (derajat keyakinan ditentukan 95%) maka $Z = 1,96$

p = Proporsi kebenaran/pejuang benar, yang dimana dalam penelitian ini adalah sebesar 50%.

q = Proporsi kesalahan/pejuang salah, yang dimana dalam penelitian ini adalah sebesar 50%.

e =Tingkat ketepatan/tingkat kesalahan maksimum yang dapat di tolerir, yang dimana dalam penelitian ini adalah sebesar 10%.

Dengan demikian, maka penarikan sampel dalam penelitian ini dapat di formasikan sebagai berikut:

$$No = \frac{(1,96)^2 \times (50\%)(50\%)}{(10\%)^2}$$

$$No = \frac{3,84 \times 0,25}{0,01}$$

$$No = \frac{0,96}{0,01}$$

No = 96,04 atau dibulatkan menjadi 96

Berdasarkan perhitungan tersebut di atas, maka jumlah sampel minimal yang harus digunakan dalam penelitian ini adalah sebanyak 96 responden.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dimaksudkan menjelaskan cara atau metode dalam pengumpulan data, sehingga mendapatkan data yang akurat dan sistematis. Teknik pengumpulan data dari penelitian ini adalah:

1. Wawancara dan *Interview*

Penelitian ini melakukan wawancara dengan objek penelitian seperti yang telah disebutkan yaitu Kepala Koordinator rehabilitasi dan rekonstruksi daerah atau yang mewakili, dan tokoh masyarakat di Kecamatan Masamba yang terdampak banjir bandang dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan terkait tentang penanggulangan bencana banjir yang telah dilakukan oleh pemerintah dan dampak yang dirasakan masyarakat mengenai bencana banjir yang seringkali terjadi di daerahnya.

2. Observasi

Observasi dalam penelitian ini dimaksudkan untuk melihat secara langsung tentang fenomena sosial yang diteliti oleh peneliti, sehingga dapat diketahui secara jelas bagaimana berlangsungnya kejadian tersebut. Teknik observasi langsung dilakukan dengan cara melakukan pengamatan terhadap objek penelitian sehingga dapat diperoleh data sesuai dengan tujuan penelitian.

Hamdi menjelaskan maksud dari observasi bahwa observasi dengan melakukan pengamatan meliputi kegiatan pemuatan perhatian terhadap suatu objek dengan menggunakan seluruh panca indera. Jadi observasi dapat dilakukan melalui

penglihatan, penciuman, pendengaran, pengecap, dan perabaan. Maka dari penjelasan tersebut bahwa observasi tidak hanya sebatas mengamati objek penelitian akan tetapi dapat dilakukan dengan menggunakan seluruh panca indra.

3. Kuisisioner

Kuisisioner merupakan teknik pengumpulan yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan tertulis kepada responden untuk dijawabnya. Pada tahap ini, peneliti membagi kuisisioner satu persatu dan mendampingi responden satu persatu, hal ini dilakukan peneliti agar memudahkan responden dalam menjawab tiap pertanyaan pada kuisisioner, kuisisioner dalam penelitian ini ditujukan untuk masyarakat yang terdampak banjir bandang di Kecamatan Masamba. Adapun jenis kuisisioner yang digunakan yaitu kuisisioner tertutup.

4. Dokumentasi

Dokumentasi atau arsip adalah data yang sangat penting, untuk itu peneliti melakukan pengumpulan data dengan dokumentasi. Dokumentasi merupakan pencarian data tentang kejadian yang telah terjadi yang berhubungan dengan masalah dalam penelitian.

E. Teknik Analisa Data

Teknik analisa data adalah proses mencari serta menyusun secara terstruktur atau sistematis data dari hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data dan memilih mana yang penting serta mana yang perlu dipelajari untuk membuat kesimpulan sehingga mudah untuk dipahami (Sugiyono, 2017).

Setelah data dikumpulkan langkah selanjutnya adalah melakukan analisa data yang kemudian disajikan sebagai kesimpulan. Data yang dianalisa berupa data primer dan data sekunder yang didapat dari sumber data melalui teknik pengumpulan data. Tujuannya adalah untuk memberikan gambaran fakta yang terjadi di lapangan sehingga data tersebut memiliki nilai dan makna untuk dijadikan sebuah kesimpulan dalam penelitian. Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif kualitatif dan kuantitatif, maka setelah proses penelitian dari pengumpulan data dan pengelolaan data yang telah dilakukan maka selanjutnya yaitu dilakukan penarikan kesimpulan dengan cara mendeskripsikan dan menggambarkan hasil penelitian. Adapun teknik analisa data yang digunakan antara lain:

1. Deskriptif Kualitatif

Metode deskriptif dilakukan dengan cara mendeskripsikan hasil temuan penelitian dengan menyederhanakan data-data yang telah diverifikasi sesuai dengan aturan dalam metode penelitian. Kemudian membuatnya kedalam bentuk catatan-catatan dan penyuntingan sebagai jawaban dari rumusan masalah dapat terjawab sesuai dengan tujuan penelitian. Penelitian kualitatif menyajikan kesimpulan dengan cara membuat gambaran secara detail sesuai dengan hasil temuan dari penelitian yang telah dilakukan sehingga hasil tersebut dapat dipertanggungjawabkan dan mempunyai kesimpulan yang kuat sesuai dengan apa yang diperoleh.

a. Reduksi Data

Reduksi data merupakan suatu bentuk kegiatan analisis untuk memperjelas atau mempertegas, memperpendek, dan membuat fokus dari data-data yang kemudian menghilangkan data yang dianggap tidak penting. Dengan cara mengedit data tersebut sehingga menghasilkan data sesuai dengan kebutuhan penelitian. Teknik ini merupakan teknik yang akan dilakukan secara terus-menerus selama penelitian berlangsung.

b. Display Data

Display data merupakan rangkaian teknik analisa data dengan cara membuat kesimpulan data-data dari lapangan. Dari data-data tersebut kemudian menggolongkan kedalam tabel sehingga data dapat disajikan untuk kemudian ditarik suatu kesimpulan dari data-data yang telah didapatkan.

c. Klasifikasi Data

Klasifikasi data merupakan suatu kegiatan mendeteksi data-data yang telah diperoleh kemudian dikelompokkan sesuai dengan jenis dari data tersebut. Memilih data yang sesuai dengan jenisnya kemudian mengklasifikasikan sesuai dengan penggolongan data tersebut. Setelah mengklasifikasi data kemudian dijadikan alternatif untuk dijadikan suatu hasil kesimpulan. Pengelolaan data ini bertujuan untuk mengambil alternatif-alternatif terbaik kemudian dijadikan bahan penyampaian informasi dan pengambilan keputusan.

d. Pengambilan Kesimpulan

Setelah seluruh data semua terkumpul baik melihat dengan cara observasi, wawancara, dan dokumentasi, langkah selanjutnya adalah perlu diolah dan dianalisis untuk menjawab penelitian. Untuk menjawab rumusan masalah diatas penulis menggunakan analisis data deskriptif kualitatif

pada penelitian ini, bukan bermaksud untuk menghubungkan satu variabel dengan variabel lainnya. Maksud utama adalah memberikan gambaran dan menjelaskan atau mendeskripsikan objek atau permasalahan. Dengan kata lain penelitian deskriptif adalah untuk merencanakan secara terstruktur atau sistematis faktual dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat masyarakat pada daerah tertentu.

2. Deskriptif Kuantitatif

Analisis deskriptif kuantitatif digunakan untuk mencari rata-rata pada tiap variabel yaitu kualitas, kecukupan, kejelasan, kesesuaian, dan siklus waktu. Selain itu total skor dalam tiap variabel digunakan untuk mengetahui posisi variabel nilai minimum dan maksimum. Setelah dilakukan analisis deskriptif kuantitatif dilakukan analisis skoring dan pembobotan. Pada penelitian ini masing-masing variabel akan diberikan bobot untuk mengetahui tingkat efektivitas program rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana banjir bandang di Kabupaten Luwu Utara.

F. Variabel dan Indikator

Variabel dan indikator yang digunakan dalam penelitian ini terkait rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana banjir bandang tahun 2020 menggunakan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara

Nomor 9 Tahun 2011 tentang Penanggulangan Bencana dan Modul Manajemen Penanggulangan Bencana Pelatihan Penanggulangan Bencana Banjir untuk lebih jelasnya sebagaimana pada tabel berikut:

Tabel 3.2 Variabel dan Indikator Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Banjir Bandang

No	Program	Indikator Program	Kegiatan
	Rehabilitasi		
1	Perbaikan lingkungan daerah bencana	<ul style="list-style-type: none"> • Perbaikan lingkungan fisik kawasan permukiman • Perbaikan lingkungan fisik kawasan usaha 	<ul style="list-style-type: none"> • Perbaikan lingkungan fisik Kawasan, meliputi: <ul style="list-style-type: none"> - Jumlah Permukiman yang rusak - Kebutuhan Lahan • Perbaikan lingkungan fisik kawasan usaha <ul style="list-style-type: none"> - Jumlah pertokoan yang rusak
2	Perbaikan sarana dan prasarana umum	<ul style="list-style-type: none"> • Prasarana jaringan jalan • Prasarana jaringan air bersih • Prasarana jaringan sanitasi dan limbah • Prasarana jaringan irigasi • Sarana peribadatan • Sarana pendidikan • Sarana kesehatan • Sarana perkantoran 	<ul style="list-style-type: none"> • Perbaikan Jaringan Jalan <ul style="list-style-type: none"> - Jalan Nasional - Jalan Kabupaten - Jalan Lingkungan • Perbaikan Jaringan Bersih <ul style="list-style-type: none"> - Jaringan Pipa tersier - Jaringan pipa transmisi - Jaringan pipa pelintas - Jaringan pipa distribusi - Bendung • Perbaikan Jaringan Sanitasi & Limbah <ul style="list-style-type: none"> - Perbaikan IPAL Hibah Saing - Perbaikan IPAL Komunal DAK • Perbaikan Jaringan Irigasi <ul style="list-style-type: none"> - Perbaikan saluran irigasi primer • Perbaikan sarana peribadatan <ul style="list-style-type: none"> - Jumlah peribadatan masjid yang rusak • Perbaikan sarana pendidikan <ul style="list-style-type: none"> - TK - SD - SMP - SMA • Perbaikan sarana kesehatan <ul style="list-style-type: none"> - Puskesmas - Lab Kesehatan Daerah - Psc 119 Luwu Utara • Perbaikan sarana perkantoran <ul style="list-style-type: none"> - Perbaikan jumlah perkantoran yang rusak
3	Pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> • Masyarakat terdampak bencana banjir bandang di Kecamatan Masamba 	<ul style="list-style-type: none"> - Rusak Ringan - Rusak Sedang - Rusak Berat
4	Pemulihan sosial psikologis	<ul style="list-style-type: none"> • Pemulihan psikologis masyarakat pasca bencana banjir bandang 	Kegiatan Trauma healing

5	Pelayanan Kesehatan	<ul style="list-style-type: none"> • Pemulihan kembali SDM kesehatan • Pemulihan sarana dan prasarana kesehatan 	<ul style="list-style-type: none"> • Aktifnya kembali SDM pasca bencana • Perbaiki sejumlah sarana dan prasarana yang mengalami kerusakan
6	Pemulihan sosial ekonomi budaya	<ul style="list-style-type: none"> • Pemulihan sosial ekonomi budaya masyarakat Kecamatan Masamba pasca banjir bandang 	Perbaiki pertokoan masyarakat yang rusak
7	Pemulihan fungsi pemerintahan	<ul style="list-style-type: none"> • Keaktifan kembali petugas pemerintahan • Terselamatkan dan terjaganya dokumen-dokumen • Konsolidasi dan pengaturan tugas pokok dan fungsi petugas pemerintahan • Pengaturan kembali tugas-tugas instansi yang saling terkait 	<ul style="list-style-type: none"> • Keaktifan kembali petugas pemerintahan <ul style="list-style-type: none"> - Melakukan tugas dan tanggung jawab pemerintahan • Terselamatkan dan terjaganya dokumen-dokumen • Konsolidasi dan pengaturan tugas pokok dan fungsi petugas pemerintahan • Pengaturan kembali tugas-tugas instansi yang saling terkait
8	Pemulihan fungsi pelayanan publik	<ul style="list-style-type: none"> • Pelayanan kesehatan • Pelayanan pendidikan • Pelayanan perekonomian • Pelayanan peribadatan • Pelayanan pemerintahan 	<ul style="list-style-type: none"> • Aktifnya kembali pelayanan kesehatan <ul style="list-style-type: none"> - Perbaiki fasilitas yang rusak • Aktifnya kembali kegiatan pendidikan <ul style="list-style-type: none"> - Perbaiki sekolah-sekolah yang terdampak • Pelayanan peribadatan <ul style="list-style-type: none"> - Perbaiki masjid yang terdampak • Pelayanan pemerintahan
Rekonstruksi			
1	Pembangunan kembali sarana dan prasarana	<ul style="list-style-type: none"> • Prasarana jaringan jalan • Prasarana jaringan drainase • Prasarana jaringan air bersih • Prasarana jaringan sanitasi dan limbah • Prasarana jaringan irigasi • Pembangunan jembatan • Sarana peribadatan • Sarana pendidikan • Sarana kesehatan • Sarana perkantoran 	<ul style="list-style-type: none"> • Pembangunan Jaringan Jalan <ul style="list-style-type: none"> - Jalan Nasional - Jalan Kabupaten - Jalan Lingkungan • Pembangunan Jaringan Drainase <ul style="list-style-type: none"> - Drainase kompleks perumahan - Drainase atau saluran pembuangan - Drainase dan pendestrian • Pembangunan Jaringan Bersih <ul style="list-style-type: none"> - Jaringan Pipa tersier - Jaringan pipa transmisi - Jaringan pipa pelintas - Jaringan pipa distribusi - Bendung • Pembangunan Jaringan Sanitasi & Limbah <ul style="list-style-type: none"> - IPAL Hibah Saing - IPAL Komunal DAK • Pembangunan Jaringan Irigasi <ul style="list-style-type: none"> - Pembangunan saluran irigasi primer • Pembangunan jembatan yang rusak • Pembangunan sarana peribadatan <ul style="list-style-type: none"> - Jumlah peribadatan masjid yang rusak • Pembangunan sarana pendidikan <ul style="list-style-type: none"> - TK - SD - SMP - SMA • Pembangunan sarana kesehatan <ul style="list-style-type: none"> - Puskesmas - Lab Kesehatan Daerah - Psc 119 Luwu Utara

			<ul style="list-style-type: none"> • Pembangunan sarana perkantoran - Pembangunan jumlah perkantoran yang rusak
2	Pembangunan kembali sarana sosial masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> • Pembangunan fasilitas sosial dan fasilitas umum pasca bencana banjir bandang 	Pembangunan kembali fasilitas sosial yang rusak
3	Pembangkitan kembali kehidupan sosial budaya masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> • Pembangkitan kembali kehidupan masyarakat • Menghilangkan rasa trauma masyarakat 	<ul style="list-style-type: none"> • Pemberian bantuan baik berupa uang maupun material • Pemberian kegiatan trauma healing
4	Penerangan rancang bangun yang tepat dan penggunaan peralatan yang lebih baik serta tahan bencana	<ul style="list-style-type: none"> • Memperhatikan peraturan bangunan, peraturan perencanaan, pedoman dan manual rancang bangun • Mengembangkan rancang bangun hasil penelitian dan pengembangan • Menyesuaikan dengan tata ruang • Memperhatikan kondisi dan kerusakan daerah • Menyesuaikan dengan tingkat kerawanan bencana 	Melakukan pembangunan kembali dengan memiliki persyaratan terhadap ketahanan terhadap bencana
5	Peningkatan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya	<ul style="list-style-type: none"> • Menormalisasikan kehidupan masyarakat pasca bencana 	Melakukan pembangunan kembali baik itu tempat tinggal maupun sarana dan prasarana yang mengalami kerusakan
6	Peningkatan fungsi pelayanan publik	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan fungsi sarana dan prasarana pelayanan publik • Mengaktifkan kembali fungsi pelayanan publik pada instansi • Pengaturan kembali fungsi pelayanan publik 	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan fungsi sarana dan prasarana pelayanan publik • Mengaktifkan kembali fungsi pelayanan publik pada instansi • Pengaturan kembali fungsi pelayanan publik
7	Peningkatan pelayanan utama dalam masyarakat		Mengembangkan pola-pola pelayanan masyarakat yang efektif dan efisien

Sumber : Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 dalam SAKIP BPBD Kabupaten Luwu Utara Tahun 2020

G. Defenisi Operasional

Defenisi operasional merupakan unsur penelitian untuk mengukur variabel sehingga diketahui indikator-indikator dari variabel tersebut. Penelitian ini tentunya terdapat indikator-indikator dari variabel sehingga diketahui batasan dari variabel dari permasalahan dalam penelitian, untuk menghindari salah pengertian menafsirkan istilah-istilah yang akan digunakan dalam judul penelitian ini. Defenisi operasional dari penelitian ini adalah

Efektivitas Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Banjir Bandang di Kabupaten Luwu Utara, Meliputi:

1. Efektivitas Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi

Efektivitas adalah pengukuran dalam arti tercapainya tujuan yang telah ditentukan sebelumnya, efektivitas yang dimaksud adalah efektivitas program rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana banjir bandang di Kabupaten Luwu Utara. Untuk mendapatkan nilai efektivitas program rehabilitasi dan rekonstruksi diukur melalui

2. Rehabilitasi

Rehabilitasi adalah segala upaya perbaikan untuk mengembalikan fungsi secara minimal terhadap sarana, prasarana, dan fasilitas umum yang rusak akibat bencana. Rehabilitasi yang dimaksud dalam hal ini yaitu rehabilitasi yang dilakukan pada saat pasca bencana banjir bandang di Kabupaten Luwu Utara. Adapun indikatornya adalah sebagai berikut:

a. Perbaikan lingkungan daerah bencana

Perbaikan lingkungan daerah bencana adalah perbaikan lingkungan fisik, meliputi; perbaikan lingkungan fisik kawasan permukiman dan kawasan usaha. Indikator yang harus dicapai pada perbaikan lingkungan adalah kondisi lingkungan yang memenuhi persyaratan teknis, sosial,

ekonomi, dan budaya serta ekosistem. Perbaikan lingkungan daerah bencana yang dimaksud dalam hal ini yaitu perbaikan lingkungan daerah pasca bencana banjir bandang.

b. Perbaikan sarana dan prasarana umum

Perbaikan sarana dan prasarana umum adalah jaringan infrastruktur dan fasilitas fisik yang menunjang kegiatan kehidupan sosial dan perekonomian masyarakat. Prasarana umum atau jaringan infrastruktur fisik disini mencakup; jaringan jalan/perhubungan, jaringan air bersih, jaringan listrik, jaringan komunikasi, jaringan sanitasi dan limbah, jaringan irigasi/pertanian. Perbaikan sarana prasarana umum yang dimaksud dalam hal ini yaitu perbaikan sarana dan prasarana pasca banjir bandang yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Luwu Utara.

c. Pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat

Yang menjadi target pemberian bantuan adalah masyarakat korban bencana rumah atau lingkungannya mengalami kerusakan struktural hingga tingkat sedang akibat bencana, dan masyarakat korban berkehendak untuk tetap tinggal di tempat semula. Pemberian bantuan perbaikan rumah dimaksud dalam hal ini yaitu bantuan perbaikan rumah

terhadap korban bencana banjir bandang di Kabupaten Luwu Utara.

d. Pemulihan sosial psikologis

Pemulihan sosial psikologis adalah pemberian bantuan terhadap masyarakat yang terkena dampak bencana banjir bandang agar dapat berfungsi kembali secara normal. Sedangkan kegiatan psikososial adalah kegiatan mengaktifkan elemen-elemen masyarakat agar dapat kembali menjalankan fungsi sosial secara normal. Pemulihan sosial psikologis bertujuan agar masyarakat mampu melakukan tugas sosial seperti sebelum terjadi bencana, serta tercegah dari mengalami dampak psikologis lebih lanjut yang mengarah kepada gangguan kesehatan mental.

e. Pelayanan kesehatan

Pemulihan pelayanan kesehatan adalah aktivitas memulihkan kembali segala bentuk pelayanan kesehatan sehingga minimal terjadi kondisi seperti sebelum terjadi bencana banjir bandang. Pemulihan sistem pelayanan kesehatan adalah semua usaha yang dilakukan untuk memulihkan kembali fungsi sistem pelayanan kesehatan yang meliputi SDM kesehatan, sarana/prasarana kesehatan, dan kepercayaan masyarakat.

f. Pemulihan sosial ekonomi budaya

Pemulihan sosial ekonomi budaya adalah upaya untuk memfungsikan kembali kegiatan dan lembaga sosial, ekonomi dan budaya masyarakat di daerah bencana banjir bandang. Kegiatan ini ditujukan untuk menghidupkan kembali kegiatan dan lembaga sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat di daerah bencana banjir bandang seperti sebelum terjadinya bencana.

g. Pemulihan fungsi pemerintahan

Indikator yang harus dicapai pada pemulihan fungsi pemerintahan adalah:

- 1) Keaktifan kembali petugas pemerintahan;
- 2) Terselamatkan dan terjaganya dokumen-dokumen negara dan pemerintahan;
- 3) Konsolidasi dan pengaturan tugas pokok dan fungsi petugas pemerintahan;
- 4) Pengaturan kembali tugas-tugas instansi/lembaga yang saling terkait.

h. Pemulihan fungsi pelayanan publik.

Pemulihan fungsi pelayanan publik adalah berlangsungnya kembali berbagai pelayanan publik ini meliputi; pelayanan kesehatan, pelayanan pendidikan,

pelayanan perekonomian, pelayanan perkantoran umum/pemerintah, dan pelayanan peribadatan.

3. Rekonstruksi

Rekonstruksi adalah kegiatan untuk memberikan perbaikan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai pada jenjang yang mencukupi. Rekonstruksi yang dimaksud dalam hal ini yaitu rekonstruksi yang dilakukan pada saat pasca bencana banjir bandang di Kabupaten Luwu Utara. Adapun indikatornya adalah sebagai berikut:

a. Pembangunan kembali sarana dan prasarana

Pembangunan kembali sarana dan prasarana yang dimaksud dalam hal ini yaitu pembangunan baru sarana dan prasarana untuk memenuhi kebutuhan ekonomi sosial dan budaya pasca terjadinya bencana banjir bandang di Kabupaten Luwu Utara.

b. Pembangunan kembali sarana sosial masyarakat

Pembangunan kembali sarana sosial masyarakat adalah kegiatan pembangunan baru fasilitas sosial dan fasilitas umum untuk memenuhi kebutuhan aktivitas sosial dan kemasyarakatan pasca bencana banjir bandang.

c. Pembangkitan kembali kehidupan sosial budaya masyarakat

Pembangkitan kembali kehidupan sosial budaya masyarakat ditujukan untuk menata kembali kehidupan dan mengembangkan pola-pola kehidupan ke arah kondisi kehidupan sosial budaya kehidupan masyarakat yang lebih baik untuk menghilangkan rasa traumatik masyarakat terhadap bencana banjir bandang.

- d. Penerangan rancang bangun yang tepat dan penggunaan peralatan yang lebih baik serta tahan bencana

Penerangan rancang bangun yang dimaksud dalam hal ini yaitu meningkatkan stabilitas kondisi dan fungsi sarana dan prasarana yang mampu mengantisipasi dan tahan bencana, dan mengurangi kemungkinan kerusakan yang lebih parah akibat bencana.

- e. Peningkatan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya

Peningkatan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya adalah untuk menormalisasikan kondisi dan kehidupan yang lebih baik pasca bencana banjir bandang.

- f. Peningkatan fungsi pelayanan publik

Peningkatan fungsi pelayanan publik untuk penataan dan peningkatan fungsi pelayanan publik kepada masyarakat untuk mendorong kehidupan masyarakat di Luwu Utara pasca bencana banjir bandang ke arah yang lebih baik.

g. Peningkatan pelayanan utama dalam masyarakat.

Membantu meningkatkan pelayanan utama dalam masyarakat yang dilakukan dalam mengembangkan pola-pola pelayanan masyarakat yang efektif dan efisien.



BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

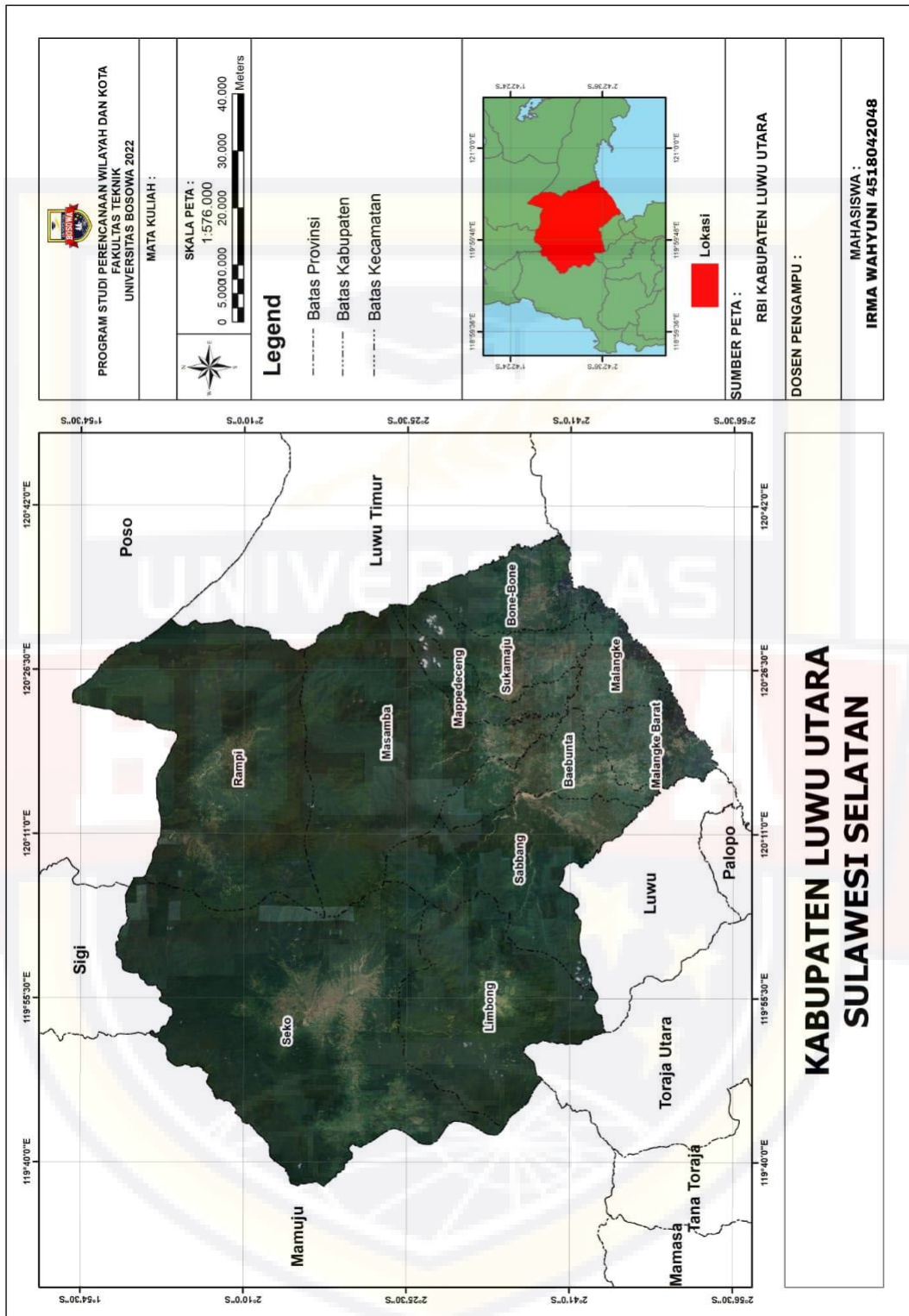
A. Gambaran Umum Kabupaten Luwu Utara

1. Letak Geografis dan Administrasi

Kabupaten Luwu Utara terletak antara $010^{\circ}53'19''$ - $020^{\circ}55'36''$ Lintang Selatan dan $1190^{\circ}47'46''$ - $1200^{\circ}37'4''$ Bujur Timur, dengan batas-batas administrasi sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Sulawesi Tengah
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Luwu Timur
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Luwu dan Teluk Bone
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Tana Toraja dan Sulawesi Barat

Kabupaten Luwu Utara merupakan kabupaten terluas di Sulawesi Selatan dengan luas wilayah kabupaten mencapai 7.502,58 km persegi yang meliputi 15 kecamatan dan 174 desa. Kecamatan terluas di Kabupaten Luwu Utara adalah Kecamatan Seko dengan luas 2.109,19 km persegi atau mencakup 21% dari luas Kabupaten Luwu Utara. Sedangkan kecamatan dengan luas terkecil adalah Kecamatan Sukamaju Selatan dengan luas 47,27 km persegi. Untuk lebih jelasnya sebagaimana pada gambar peta administrasi berikut:



Gambar 4.1 Peta Administrasi Kabupaten Luwu Utara

Kabupaten Luwu Utara pada dasarnya dapat dibagi menjadi 2 wilayah berdasarkan topografinya yaitu wilayah dataran rendah sebanyak 12 kecamatan dengan ketinggian 15-70 meter di atas permukaan laut dan dataran tinggi sebanyak 3 kecamatan dengan ketinggian diatas 1.000 meter diatas permukaan laut. Kabupaten Luwu Utara terdiri dari 15 kecamatan yaitu Kecamatan Sabbang, Sabbang Selatan, Baebunta, Baebunta Selatan, Malangke, Malangke Barat, Sukamaju, Sukamaju Selatan, Bone-Bone, Tanalili, Mappedeceng, Rampi, Rongkong, Seko, dan Masamba.

2. Bencana Banjir Bandang yang terjadi di Kabupaten Luwu Utara Tahun 2020

Tabel 4.1 Rekapitulasi Kejadian Bencana Banjir Bandang di Kabupaten Luwu Utara Tahun 2020

No	Tanggal Kejadian	Jenis Bencana	Lokasi	Kab/Kota	Jumlah		Penyebab
					KK	Jiwa	
1	14/5/2020	Banjir Bandang	Kelurahan Bone, Bone Tua, Ds. Kamiri Kecamatan Masamba	Luwu Utara	237	431	Hujan deras intensitas tinggi
2	17/5/2020	Banjir Bandang	Dusun Maipi	Luwu Utara	8	26	Hujan deras intensitas tinggi
3	13/7/2020	Banjir Bandang	Kec. Masamba, Kec. Sabbang, Kec. Baebunta, Kec. Baebunta Selatan, Kec. Malangke, Kec. Malangke Barat	Luwu Utara	6.590	20.609	Hujan deras intensitas tinggi

Sumber: Kantor BPBD Kabupaten Luwu Utara, Tahun 2022

Dari kejadian bencana banjir bandang di atas dampak kerugian yang paling dirasakan masyarakat atas kejadian tersebut adalah rusaknya tempat tinggal mereka yang memaksa harus mengungsi hingga beberapa waktu. Upaya awal yang terus diupayakan Pemerintah Kabupaten Luwu Utara dalam penanganan penyintas banjir bandang ini adalah penyediaan sarana permukiman tetap agar mereka dapat segera kembali beraktifitas dan bekerja untuk melanjutkan kehidupan normalnya disamping melakukan penanganan dan pemulihan darurat infrastruktur terdampak. Adapun data kerusakan infrastuktur yaitu:

Tabel 4.2 Rekapitulasi Kerusakan Infrastruktur Pasca Bencana Banjir Bandang di Kecamatan Masamba

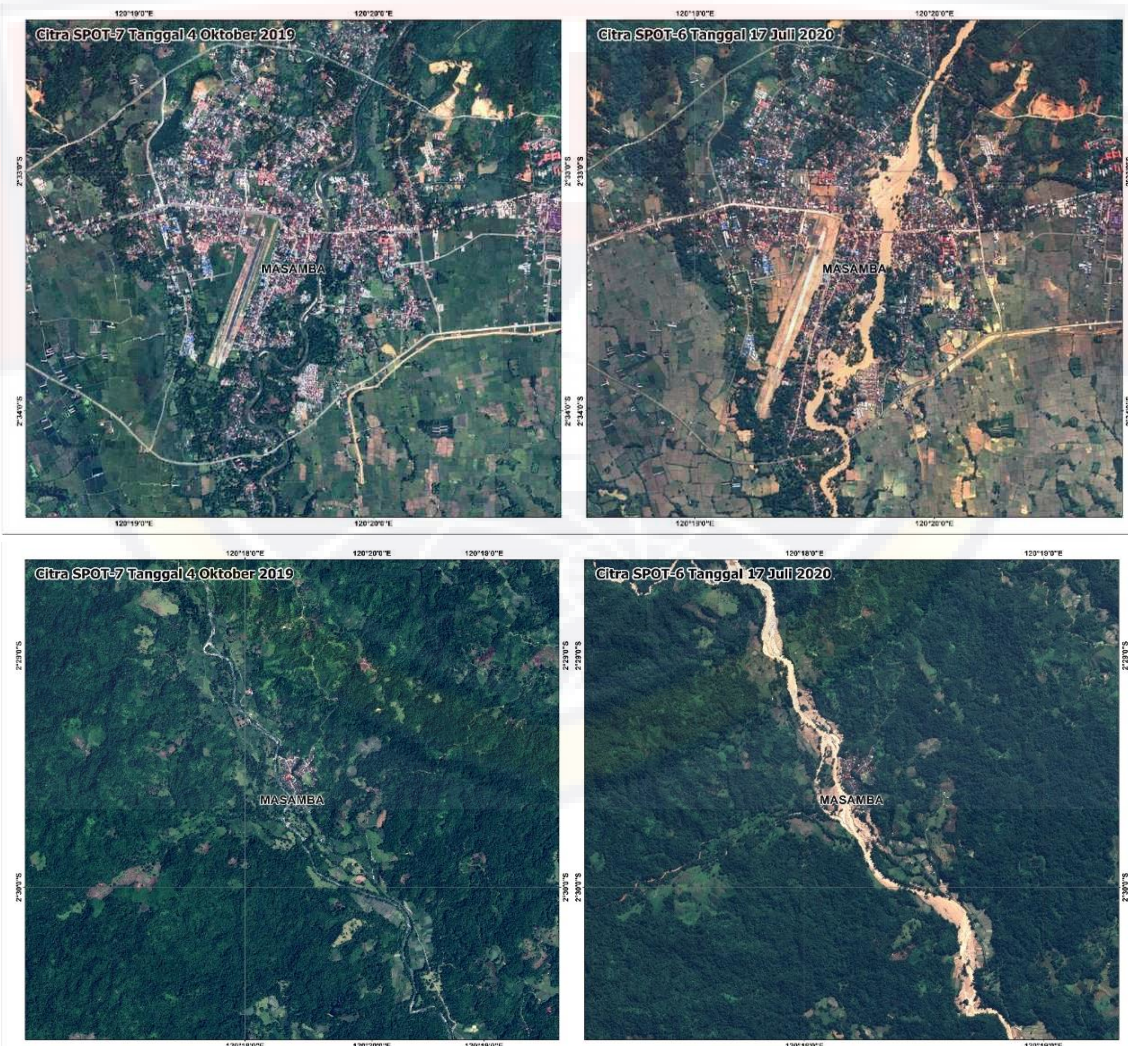
Sektor/Sub Sektor	Sarana & Prasarana	Volume	Data Kerusakan			
			Berat	Sedang	Ringan	Satuan
1. Permukiman						
Prasarana Lingkungan						
Fasilitas Umum						
a	Sambungan Rumah (SR)	1200	1200	-	-	Unit
b	Pipa Tersier D.4 Inch	2000	2000	-	-	M
c	Pipa Tersier D.3 Inch	1000	1000	-	-	M
d	Pipa Tersier D.2 Inch	2000	2000	-	-	M
Sanitasi						
a	Bangunan IPAL Komunal Hibah Saiig di Kel. Bone dan Kel. Bone Tua	320	320	-	-	SR
b	Bangunan IPAL Komunal DAK di Kel. Bone dan Kel. Bone Tua	100	100	-	-	SR
2. Infrastruktur						
Transportasi Darat						
Jalan Nasional						
a	Ruas Batas Kab. Luwu Utara – Batas Ka. Luwu Timur	360	360	-	-	M

Sektor/Sub Sektor	Sarana dan Prasarana	Volume	Data Kerusakan			
			Berat	Sedang	Ringan	Satuan
Jalan Kabupaten						
a	Ruas Balebo – Maipi	2000	2000	-	-	M
b	Ruas Masamba – Pincara	3000	3000	-	-	M
c	Jalan dalam kota	8500	8500	-	-	M
d	Jalan Lingkar Selatan Ruas Baliase – Radda Baliase (Baliase- Laba)	7800	7800	-	-	M
e	Jalan Lingkar Selatan Ruas Baliase – Radda (Laba- Radda)	5600	5600	-	-	M
Jalan Lingkungan						
a	Jalan lingkungan kompleks Perum. Griya Cendana Putih	1500	-	-	1500	M
b	Jalan lingkungan di Kel. Bone	600	600	-	-	M
c	Jalan lingkungan di Kel. Bone Tua	1410	1410	-	-	M
Bangunan Drainase						
a	Drainase Kompleks Perum. Griya Cendana Permai	3000	3000	-	-	M
b	Drainase/Saluran Pembuangan di Kel. Bone dan Kel. Bone Tua	10962	10962	-	-	M
c	Drainase + Pendestrian di Kel. Bone	1850	1850	-	-	M
d	Drainase Lingkar Sa'pek Kel. Bone					
e	Drainase Ibu Kota Masamba					
Jembatan						
a	Jembatan Beton Balebo/Tandung	28	28	-	-	M
b	Jembatan Gantung Pelangi Maipi	35	35	-	-	M
c	Jembatan Gantung Maipi	45	45	-	-	M
d	Jembatan Gantung Kamiri	38	38	-	-	M
e	Jembatan Beton Kamiri	8	8	-	-	M
f	Jembatan Gantung D.L Kurri-Kasambi	40	40	-	-	M
g	Jembatan Gantung Lumi	100	100	-	-	M
h	Jembatan Gantung Laba	55	55	-	-	M
Transportasi Udara						
a	Bandara Andi Jemma (Landasan Pacu)	800	-	-	800	M
Sumber Daya Air						
a	Jembatan Pipa Transmisi D. 12 Inch	48	48	-	-	M
b	Jaringan Pipa Transmisi D. 12 Inch	2490	2490	-	-	M

Sektor/Sub Sektor	Sarana dan Prasarana	Volume	Data Kerusakan			
			Berat	Sedang	Ringan	Satuan
c	Jaringan Pipa Pelintas D. 12 Inch	40	40	-	-	M
d	Jaringan Pipa Pelintas D. 6 Inch	80	80	-	-	M
e	Jaringan Pipa Distribusi D. 6 Inch	500	500	-	-	M
f	Bendung/Intake PDAM	25	25	-	-	M
g	Bendung D.I Kurri-Kasambi	30	30	-	-	M
h	Bendung D.I Kappuna-Lebannu	800	800	-	-	M
l	Saluran Irigasi Primer D.I Kurri-Kurri – Kasambi	500	500	-	-	M
j	Saluran Irigasi Primer D.I Kappuna-Lebannu	800	800	-	-	M
k	Bronjong Sungai Masamba	200	200	-	-	M
3. Sosial						
Kesehatan						
a	Puskesmas Masamba	1	-	-	1	Unit
b	Lab. Kesehatan Daerah	1	-	-	1	Unit
c	PSC 119 Luwu Utara	1	-	1	-	Unit
Peribadatan						
a	Masjid Jami Bone Tua	1	-	-	1	Unit
b	Masjid Potaden	1	1	-	-	Unit
c	Masjid Jalajja	1	-	-	1	Unit
d	Masjid Lombok	1	1	-	-	Unit
e	Masjid Kemenag Luwu Utara	1	-	-	1	Unit
f	Masjid Perum. Griya Cendana Permai	1	-	-	1	Unit
g	Masjid Raya Syuhada	1	-	-	1	Unit
h	Masjid Lontang	1	1	-	-	Unit
i	Mushollah Sa'pek Selatan	1	1	-	-	Unit
j	Masjid Sa'pek Selatan	1	-	-	1	Unit
k	Mushollah Desa Maipi	1	1	-	-	Unit
Pendidikan						
a	Madrasah Aliyah Negeri	1	-	-	1	Unit
b	Madrasah Tsanawiyah Negeri	1	-	-	1	Unit
c	DDI Masamba	1	-	-	1	Unit
d	SMP Negeri 1 Masamba	1	-	-	1	Unit
e	SD Negeri 1 Masamba	1	-	-	1	Unit
f	TK Aisyah	1	-	-	1	Unit
g	Pondok Pesantren Al-Fatah	1	1	-	-	Unit
h	SD Negeri Matoto	1	-	-	1	Unit
i	TK Griya Cendana	1	-	-	1	Unit
j	TK Aisyiyah Pongo	1	-	-	1	Unit
4. Lintas Sektor						

Sektor/Sub Sektor	Sarana dan Prasarana	Volume	Data Kerusakan			
			Berat	Sedang	Ringan	Satuan
Pemerintahan						
a	Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah	1	-	-	1	Unit
b	Kantor Kementerian Agama Kab. Luwu Utara	1	-	-	1	Unit
c	UPTD Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1	-	-	1	Unit
d	Dewan Pendidikan Kab. Luwu Utara	1	-	-	1	Unit
e	Kantor Lurah Bone	1	-	-	1	Unit
f	Koramil Masamba	1	-	-	1	Unit
g	Kantor Pos Masamba	1	-	-	1	Unit
h	Kantor Perpajakan	1	-	-	1	Unit
i	Kantor Bawaslu Luwu Utara	1	-	-	1	Unit
j	Rumah Jabatan Bupati Luwu Utara	1	-	-	1	Unit
k	Rumah Jabatan Wakil Bupati Luwu Utara	1	-	1	-	Unit
l	Mess Kejaksaan Negeri Luwu Utara	1	-	-	1	Unit
Keuangan dan Perbankan						
a	Bank BRI Cab. Masamba	1	-	1	-	Unit

Sumber: Kantor BPBD Kabupaten Luwu Utara, Tahun 2022



Gambar 4.2 Peta Daerah Terdampak Banjir Bandang di Kabupaten Luwu Utara

B. Gambaran Umum Penanggulangan Bencana Kabupaten Luwu Utara

1. Sejarah dan Latar Belakang Kejadian Bencana Kabupaten Luwu Utara

Bertolak dari sejarah kejadian bencana di Kabupaten Luwu Utara, sejarah telah mencatat bahwa Kabupaten Luwu Utara merupakan kabupaten yang tidak terlepas dari ancaman bencana. Meskipun frekuensinya tidak terlalu banyak namun yang jelas bencana-bencana ini jelas sekali sudah menyebabkan kerugian. Salah satu informasi untuk mendapatkan catatan sejarah kejadian bencana Kabupaten Luwu Utara diperoleh dari data Data dan Informasi Bencana Indonesia (DIBI) yang dikeluarkan oleh BNPB. Catatan data DIBI ini memberikan informasi tentang jenis dan jumlah kejadian serta dampak yang ditimbulkan. Untuk data kejadian bencana di Kabupaten Luwu Utara diketahui dari tahun 1995-2017. Berdasarkan hal tersebut, maka catatan sejarah kejadian bencana di Kabupaten Luwu Utara dalam rentang tahun 1995-2017 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.3 Sejarah Kejadian Bencana di Kabupaten Luwu Utara dalam Rentang Tahun 1995-2017

Jenis Bencana	Jumlah	Korban (Jiwa)			Rumah (unit)				Kerusakan Fasilitas (Unit)			Sawah (ha)
		Meninggal & Hilang	Luka-Luka	Menderita dan mengungsi	Rusak Berat	Rusak Sedang	Rusak Ringan	Terendam	Kesehatan	Peribadatan	Pendidikan	
Banjir	37	7	1	33,421	395	2	2,332	24,392	21	7	60	7,059
Puting Beliung	8	-	2	-	2	-	-	-	-	1	-	-
Kekeringan	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,777
Jumlah	49	7	3	33,421	399	2	2,334	24,392	21	8	60	8,837

Sumber: Data dan Informasi Bencana Indonesia, 2018

Kejadian bencana di Kabupaten Luwu Utara selama 23 tahun terakhir terdiri dari bencana banjir, tanah longsor, puting beliung, dan kekeringan. Tahun 2009 terjadi bencana banjir dan tanah longsor, tahun 2010 terjadi bencana banjir dan tanah longsor, tahun 2011 terjadi banjir dan tanah longsor, tahun 2012 terjadi bencana banjir dan tanah longsor, 2013 terjadi bencana banjir, tahun 2014 terjadi bencana banjir, tahun 2015 terjadi bencana puting beliung, tahun 2016 terjadi bencana banjir, tahun 2017 terjadi bencana banjir, tahun 2018 terjadi bencana banjir dan tanah longsor. Pada tahun 2020, Kabupaten Luwu Utara sebagaimana yang terjadi di seluruh dunia, mengalami bencana non alam berupa wabah penyakit Covid-19. Selain itu, pada tahun yang sama, Kabupaten Luwu Utara juga mengalami bencana banjir bandang dan tanah longsor yang sangat berdampak kepada berbagai aspek kehidupan masyarakat di Kabupaten Luwu Utara.

Potensi bencana dapat diketahui berdasarkan kondisi geografis, klimatologis, dan demografis. Kondisi Kabupaten Luwu Utara bagian tengah yang dilewati Zona Sesar Palu-Koro (ZSPK) menjadi salah satu pemicu terjadinya potensi bencana geologi seperti gempa bumi, dan tsunami. Pada sisi lainnya, kondisi klimatologis berupa curah hujan menjadi salah satu penyebab munculnya potensi bencana kelompok hidrometeorologi berupa kejadian bencana banjir, gelombang ekstrim, kebakaran lahan dan hutan, kekeringan dan cuaca ekstrim.

Berdasarkan kondisi tersebut, maka beberapa potensi bencana yang pernah terjadi di Kabupaten Luwu Utara yaitu banjir, tanah longsor, cuaca ekstrim, gelombang ekstrim dan abrasi, banjir bandang, dan gempa bumi. Sementara itu, potensi bencana lainnya yang belum pernah terjadi di antaranya yaitu tsunami, kekeringan, dan kebakaran hutan dan lahan. Potensi terjadinya bencana di Kabupaten Luwu Utara dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4.4 Potensi Bencana di Kabupaten Luwu Utara

No	Jenis Bencana	Bahaya	
		Luas (Ha)	Kelas
1	Banjir	124.035,70	Tinggi
2	Banjir Bandang	12.106,30	Tinggi
3	Cuaca Ekstrim	272.390,82	Tinggi
4	Gelombang Ekstrim dan Abrasi	1.272,99	Sedang
5	Gempa Bumi	750.258,00	Tinggi

No	Jenis Bencana	Bahaya	
		Luas (Ha)	Kelas
6	Kebakaran Hutan dan Lahan	581.841,38	Tinggi
7	Kekeringan	750.258,00	Tinggi
8	Tanah Longsor	591.961,15	Tinggi
9	Tsunami	5.675,56	Rendah

Sumber: Kajian Resiko Bencana BNPB

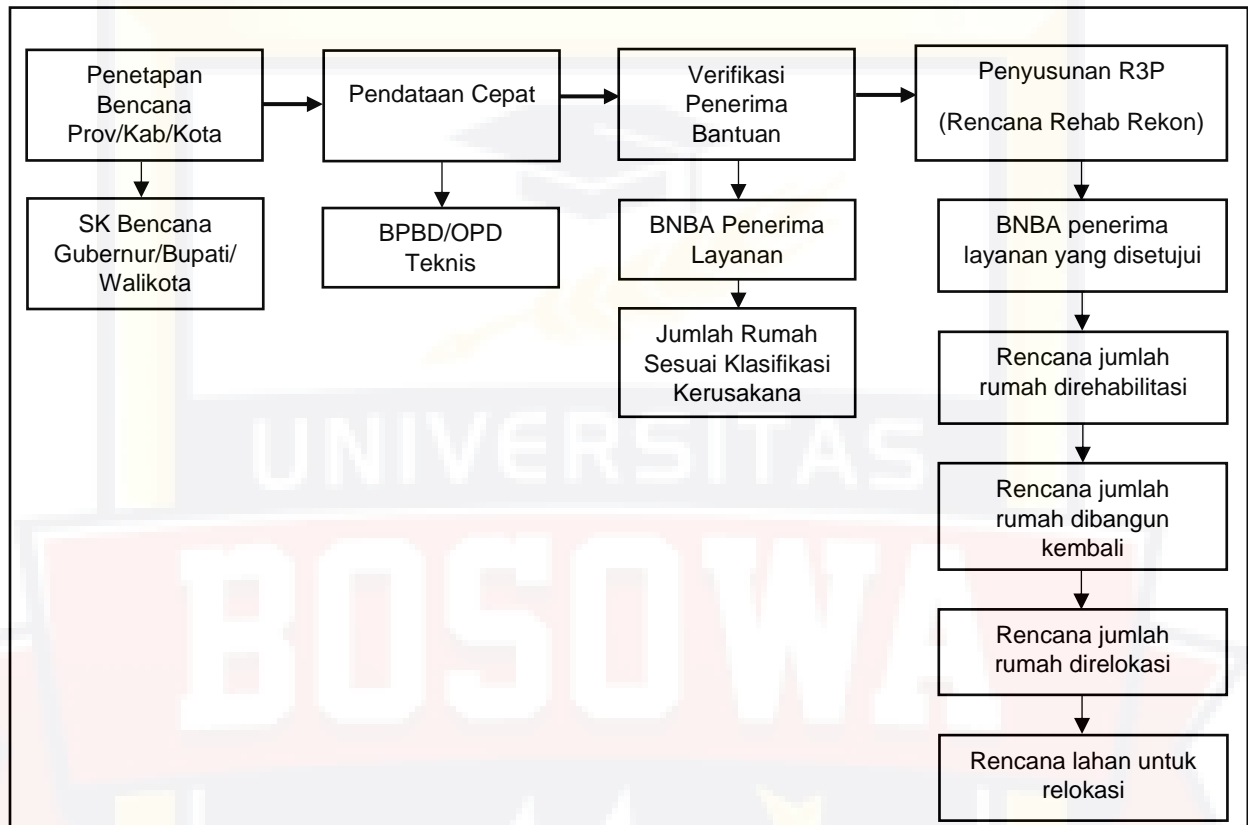
Selama tahun 2020, selain bencana non alam apendemik Covid-19, telah terjadi 89 kejadian bencana yang berdampak pada 111 desa/kelurahan di Kabupaten Luwu Utara. Banjir merupakan jenis bencana terbanyak. Hal ini merupakan risiko yang disebabkan 8 (delapan) sungai besar yang mengalir di Kabupaten Luwu Utara dan tersebar di banyak kecamatan. Untuk lebih jelasnya sebagaimana pada tabel berikut.

Tabel 4.5 Rekapitulasi Kejadian Bencana di Kabupaten Luwu Utara Tahun 2020

No	Jenis Kejadian Bencana	Kejadian	Desa Terdampak
1	Banjir	47	30
2	Angin Puting Beliung/Cuaca Ekstrim	7	7
3	Tanah Longsor	5	5
4	Kebakaran	14	14
5	Kebakaran Lahan	-	-
6	Orang Hilang	5	5
7	Pohon Tumbang	7	7
8	Penemuan Mayat	3	3
9	Orang Hanyut	1	1
10	Banjir Bandang	3	39
Jumlah		89	111

Sumber: Kantor BPBD Kabupaten Luwu Utara, Tahun 2022

2. Tahapan Pelaksanaan Pelayanan Bantuan Penanganan Bencana



Gambar 4.9 Tahapan Pelaksanaan Pelayanan Bantuan Penanganan Bencana

3. Struktur Penanganan Bencana Banjir Bandang

Tabel 4.6 Struktur Penanganan Bencana Banjir Bandang

No	Sektor	Dinas Terkait
1	Jalan	OPD Bina Marga
2	Jembatan	OPD Bina Marga
3	Perumahan	PUPR
4	Irigasi	Pengairan
5	Drainase	Pengairan
6	Sanitasi Air	Pengairan
7	Lahan	Tata Ruang
8	Kesehatan	Kesehatan
9	Pendidikan	Pendidikan

Sumber: Kantor BPBD Kabupaten Luwu Utara

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Karakteristik Informan

Dalam pembahasan ini penulis akan membahas data-data yang diperoleh dari lokasi penelitian di lapangan yang terdiri dari beberapa pernyataan informan yang dihasilkan setelah melakukan observasi, wawancara, dan dokumentasi yang akan dibahas secara berurut.

Pada bagian pertama penulis membahas mengenai karakteristik atau identitas dari informan yang masing-masing informan diantaranya yaitu : Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi, Staf Kecamatan Masamba, Lurah Bone, Lurah Bone Tua, dan masyarakat Kecamatan Masamba yang terkena dampak bencana banjir bandang, serta beberapa staf dinas terkait. Dilanjutkan peneliti akan membahas tentang efektivitas program rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana banjir bandang di Kabupaten Luwu Utara.

a. Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Berdasarkan hasil rekapitulasi dan pengolahan data kuesioner yang telah dilakukan terhadap 96 responden. Terdiri dari 41 responden adalah laki-laki dan 55 adalah responden perempuan. Untuk lebih jelasnya sebagaimana diuraikan pada tabel berikut:

Tabel 4.7 Jumlah Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin Responden	Jumlah (Jiwa)	Persentase (%)
1	Laki-Laki	41	42,70
2	Perempuan	55	57,29
Total		96	100

Sumber: Hasil Pengolahan Data Tahun 2022

2. Efektivitas Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Banjir Bandang di Kabupaten Luwu Utara

Penilaian efektivitas program rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana banjir bandang di Kabupaten Luwu Utara menggunakan kriteria efektivitas yaitu Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 dalam Sakip Kabupaten Luwu Utara Tahun 2020. Kriteria tersebut digunakan untuk menilai bagaimana realisasi ketercapaian program dan kegiatan berdasarkan tujuannya, serta mengetahui faktor-faktor internal yang mempengaruhi ketercapaian program dan kegiatan tersebut. Semakin besar kontribusi hasil terhadap pencapaian tujuan semakin efektif program atau kegiatan tersebut. Penilaian kriteria efektivitas program rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana banjir bandang di Kabupaten Luwu Utara didasarkan pada program dan kegiatan yang telah terlaksana dibandingkan dengan program dan kegiatan yang belum terlaksana. Sementara untuk mengetahui efektivitas program rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana banjir bandang di Kabupaten Luwu Utara

menggunakan skala penilaian terhadap kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Utara, menggunakan Permendagri Nomor 54 Tahun 2010, sebagai berikut:

Tabel 4.8 Rasio Efektivitas Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Banjir Bandang

Rasio Efektivitas	Tingkat Capaian
> 91	Sangat Efektif
76-91	Efektif
66-75	Cukup Efektif
51-65	Kurang Efektif
< 50	Sangat Kurang Efektif

Sumber: Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 dalam Sakip Kabupaten Luwu Utara Tahun 2020

Untuk mengetahui efektivitas program rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana banjir bandang di Kabupaten Luwu Utara, peneliti mengambil beberapa indikator dan dianalisis berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan terhadap informan penelitian.

Target rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana banjir bandang tahun 2020 mencakup empat sektor yaitu : sektor permukiman, sektor infrastruktur, sektor sosial, dan lintas sektor. Adapun program-program rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana banjir bandang adalah sebagai berikut.

a. Rehabilitasi

Rehabilitasi merupakan perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai

tingkat yang memadai, pada wilayah pasca bencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pasca bencana. Program rehabilitasi pasca bencana banjir bandang di Kabupaten Luwu Utara merupakan poin selanjutnya yang peneliti teliti untuk mengetahui bagaimana Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Utara menjalankan tugasnya sesuai dengan Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 11 Tahun 2008 tentang pedoman rehabilitasi dan rekonstruksi. Adapun hasil observasi dan wawancara yang dilakukan peneliti terkait program rehabilitasi yaitu:

1) Perbaikan Lingkungan Daerah Bencana

Perbaikan lingkungan daerah bencana adalah perbaikan lingkungan fisik yang meliputi perbaikan lingkungan fisik kawasan permukiman dan kawasan usaha. Lahan yang digunakan untuk perumahan dan kawasan permukiman harus memenuhi persyaratan yang layak huni untuk dapat berkelanjutan (*sustainable*). (Tri Budiharto, 2021).

Berkaitan dengan hal ini, berikut ditampilkan hasil wawancara penulis dengan Kepala Bidang Rehabilitasi

dan Rekonstruksi Kabupaten Luwu Utara Bapak Ismar Sukma, ST menyatakan bahwa:

“Efektivitas kinerja badan penanggulangan bencana daerah dalam upaya rehabilitasi pasca bencana banjir bandang mengenai perbaikan lingkungan daerah bencana pada kawasan permukiman dominan sudah diperbaiki baik yang ditangani oleh masyarakat maupun yang ditangani oleh pemerintah, untuk korban banjir sudah mulai dilakukan penanganan dengan memberikan bantuan stimulan perbaikan rumah rusak sedang sebanyak 25 juta per unit rumah, dan rusak ringan sebanyak 10 juta per unit rumah. Perbaikan rumah yang terdampak di Kecamatan Masamba sebanyak 1005 unit rumah, sementara dibangun oleh BNPB 805 unit rumah, dan untuk rumah masyarakat yang mengalami rusak berat diberikan Hunian Tetap (HUNTAP), sementara ini masih dalam tahap perbaikan rumah-rumah masyarakat yang terdampak banjir bandang. Dan untuk kawasan usaha belum semua tertangani karena dananya baru ada akhir tahun 2021 kemarin sehingga proses penyalurannya masih sementara berjalan, ada sekitar 2434 rumah akan dilakukan rehabilitasi baik itu rumah dan usaha

masyarakat di Kelurahan Bone dan Kelurahan Bone Tua, namun pada kawasan usaha masyarakat sudah mulai membenahi baik menggunakan dana sendiri atau bantuan stimulan". (Hasil wawancara penulis tanggal 14 maret 2022).

Demikian juga apa yang dikemukakan oleh Lurah Bone Tua sebagai salah satu kelurahan di Kecamatan Masamba yang mengalami kerusakan parah, dalam hal ini Bapak Rismar dalam wawancara dengan penulis :

"Perbaikan lingkungan fisik pada kawasan permukiman lumayan sudah efektif sekitar 65% sudah dilakukan perbaikan, ada masyarakat yang melakukan perbaikan sendiri dan ada juga belum melakukan perbaikan sama sekali karena terkendala dianggaran, kendala yang dihadapi pemerintah yaitu karena bencana banjir bandang kemarin berada pada situasi covid-19 yang membutuhkan anggaran sehingga perbaikan tersebut harus menunggu anggaran selanjutnya, target untuk menangani perbaikan tersebut adalah tahun ini namun tergantung lagi dari BPBD. Sementara untuk kawasan usaha ada yang terdampak seperti pubrik coklat yang tidak bisa digunakan

lagi karena tertimbun pasir dan tanah". (Hasil wawancara penulis tanggal 14 maret 2022).

Dari uraian-uraian tersebut di atas menunjukkan bahwa perbaikan lingkungan fisik pada kawasan permukiman dan kawasan usaha pasca banjir bandang sudah ada dilakukan perbaikan dan masih ada dalam tahap proses perbaikan, walaupun ada beberapa kendala yang dihadapi pemerintah seperti terkendala anggaran namun pemerintah menargetkan perbaikan kawasan permukiman dan beberapa kawasan usaha sampai bulan desember tahun ini.



**Gambar 4.10 Perbaikan Kawasan Permukiman Pasca
Bencana Banjir Bandang**

(Sumber: Hasil Survey Lapangan Tahun 2022)

2) Perbaiki Sarana dan Prasarana Umum

Kemudian hasil wawancara penulis menyangkut perbaikan sarana dan prasarana umum dalam upaya rehabilitasi pasca banjir bandang, secara umum dapat dikategorikan cukup efektif, walaupun ada beberapa belum dilakukan peningkatan seperti sebelum terjadinya bencana banjir bandang. Hal ini diakui oleh Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi Kabupaten Luwu Utara Bapak Ismar Sukma, ST, yang berhasil dikonfirmasi penulis.

“Dalam upaya perbaikan sarana dan prasarana pasca banjir bandang dominan sudah dilakukan perbaikan baik itu dari aspek sarana maupun prasarana, seperti jaringan jalan yang ada beberapa sempat terputus tapi sudah diusahakan dilakukan perbaikan melalui dana rr yang kita usul ke BNPB, namun sekarang semua akses sudah bisa dilalui hanya perlu dilakukan peningkatan dari krikil menjadi aspal di beberapa jaringan jalan lingkungan yang ada di Kecamatan Masamba. Sedangkan aspek sarana baik itu peribadatan, pendidikan, kesehatan, dan perkantoran sudah kembali digunakan, hanya ada beberapa sarana seperti peribadatan terdapat 2 unit di

Kecamatan Masamba sudah tidak bisa digunakan lagi karena tertimbun pasir dan tanah". (Hasil wawancara penulis tanggal 14 maret 2022).

3) Pemberian Bantuan Perbaikan Rumah Masyarakat

Bantuan pemerintah sebagai stimulan untuk membantu masyarakat memperbaiki rumah mereka yang mengalami kerusakan akibat bencana untuk dapat dihuni kembali. Bantuan pemerintah sebagaimana dimaksud dapat berupa bahan material, komponen rumah atau hunian tetap (HunTap) atau uang yang besarnya ditetapkan berdasarkan hasil verifikasi dan evaluasi tingkat kerusakan rumah yang dialami.

Bantuan pemerintah untuk perbaikan rumah masyarakat sebagaimana dilihat dari tingkat kerusakan yang dialami, dimana tingkat kerusakan ringan diberikan bantuan uang sebanyak Rp 10.000.000 per unit rumah, rusak sedang sebanyak Rp 25.000.000 per unit rumah, dan rusak berat diberikan hunian tetap (HunTap) dari pemerintah dengan memperhatikan karakter daerah dan budaya masyarakat melalui koordinasi BPBD. Tujuan pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat dimaksudkan untuk memperbaiki kondisi rumah

masyarakat agar dapat mendukung kehidupan masyarakat, seperti komponen rumah, prasarana, dan sarana lingkungan perumahan yang memungkinkan berlangsungnya kehidupan sosial dan ekonomi yang memadai sesuai dengan standar pembangunan perumahan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Berikut kutipan wawancara dengan Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi Bapak Ismar Sukma ST:

“Kami sudah melakukan upaya pemberian bantuan perbaikan rumah kepada masyarakat yang terdampak baik bantuan berupa uang tunai maupun hunian tetap (huntau). Sementara ini di Kecamatan Masamba sendiri masih dalam proses pembangunan hunian tetap di beberapa lokasi yaitu di Porodda, Sepakat, dan Pombakka tetapi belum semuanya masyarakat yang terdampak banjir bandang mendapatkan bantuan karena masih ada beberapa masyarakat yang terkendala divalidasi data selain itu, kita juga masih terkendala anggaran namun kami upayakan akhir bulan tahun ini”.
(Hasil wawancara penulis tanggal 14 maret 2022).

Demikian juga apa yang dikemukakan oleh salah satu korban yang terdampak banjir bandang di Kelurahan Bone Tua sebagai salah satu kelurahan di Kecamatan Masamba yang mengalami kerusakan parah, dalam hal ini Ibu Sabni dalam wawancara dengan penulis :

“saya sebagai salah satu korban yang sudah mendapatkan bantuan hunian tetap dari pemerintah di daerah Sepakat, walaupun di sana sudah ada pembangunan tetapi karena listrik dan air belum ada makanya saya masih memilih tinggal di kontrakan dan belum tau pasti kapan pemerintah menyediakan semua fasilitas tersebut, namun masih banyak juga masyarakat yang terdampak seperti saya belum mendapatkan bantuan sama sekali mungkin karena terkendala lahan dan biaya, karena rumah rusak parah yang akan dibangun oleh pemerintah kan lumayan banyak”.

Dari uraian-uraian di atas menunjukkan bahwa sudah ada pemberian bantuan rumah kepada masyarakat baik itu berupa uang tunai maupun hunian tetap di beberapa lokasi yang sudah disediakan oleh pemerintah. Namun beberapa kendala yang dihadapi pemerintah seperti anggaran mengakibatkan belum semua masyarakat yang

terdampak mendapatkan bantuan. Adapun data penerima bantuan perbaikan rumah pasca banjir bandang di Kecamatan Masamba, adalah sebagai berikut.

Tabel 4.9 Rekapitulasi Data Penerima Dana Bantuan Stimulan Perbaikan Rusak Sedang dan Rusak Ringan Korban Banjir Bandang di Kecamatan Masamba

No	Desa/Kelurahan	Rusak Sedang				Rusak Ringan				Jumlah
		Terdampak	Data Lengkap KK-Nik	Hasil Validasi BNPB RI	Tidak Valid	Terdampak	Data Lengkap KK-Nik	Hasil Validasi BNPB RI	Tidak Valid	
1	Kel. Bone Tua	42	41	38	3	438	372	355	18	393
2	Kel. Bone	157	115	112	3	497	423	406	17	518
3	Desa Baloli	5	5	5	-	-	-	-	-	5
4	Desa Laba	-	-	-	-	201	184	172	12	172
5	Desa Pombakka	-	-	-	-	18	18	17	1	17

Sumber: Kantor BPBD Kabupaten Luwu Utara, 2022

Dari tabel 4.9 di atas dapat dilihat bahwa rekapitulasi data dana penerima bantuan stimulan perbaikan rusak sedang dan rusak ringan korban banjir bandang di Kecamatan Masamba terdiri dari 5 (lima) kelurahan yaitu Kelurahan Bone Tua, Kelurahan Bone, Desa Baloli, Desa Laba, dan Desa Pombakka dengan jumlah data yang tervalidasi dari BNPB RI yaitu sebanyak 1105 unit rumah.



Gambar 4.11 Pembangunan Hunian Tetap Korban Bencana Banjir Bandang

(Sumber: Hasil Survey Lapangan Tahun 2022)

4) Pemulihan Sosial Psikologis

Untuk membantu masyarakat yang terkena dampak bencana, memulihkan kembali kehidupan sosial dan kondisi psikologis pada keadaan normal seperti kondisi sebelum bencana. Kegiatan membantu masyarakat terkena dampak bencana sebagaimana dimaksud dilakukan melalui upaya pelayanan sosial psikologis seperti konseling dan pendampingan. Berikut wawancara penulis dengan Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi Kabupaten Luwu Utara.

“ waktu pas di tenda pengungsian ada dilakukan trauma healing bagi korban banjir khususnya anak-anak yang terdampak yang menangani ibu dan anak, ada juga beberapa relawan-relawan dari luar daerah yang membantu untuk menghibur anak-anak di pengungsian beberapa bulan waktu itu pasca bencana, tapi kami rasa untuk psikosial sudah berjalan sangat baik dan bahkan saat ini masyarakat sudah beraktivitas seperti sediakala”.

Demikian juga apa yang dikemukakan oleh salah satu korban yang terdampak banjir bandang di Kelurahan Bone Tua sebagai salah satu kelurahan di Kecamatan

Masamba yang mengalami kerusakan parah, dalam hal ini Ibu Hasmiati dalam wawancara dengan penulis :

“kalo rasa trauma sudah tidak ada karena sudah sering mengalami banjir makanya sudah terbiasa tidur dalam keadaan banjir, dan untuk masyarakat sendiri sudah beraktivitas lagi karena kalo tidak bekerja apa lagi mau dimakan”. (Hasil wawancara penulis tanggal 16 maret 2022).

Dari urian di atas terlihat bahwa kondisi psikologis masyarakat pasca banjir bandang sudah pulih kembali, namun tidak bisa dipungkiri dari beberapa hasil wawancara penulis dengan masyarakat yang terdampak masih ada juga yang mengalami trauma pasca banjir bandang, apalagi ketika dalam keadaan hujan masih ada masyarakat yang merasa panik.



**Gambar 4.12 Kegiatan Trauma Healing
Pasca Banjir Bandang**

(Sumber: Dokumentasi Instagram Akbarhendar)

5) Pemulihan Pelayanan Kesehatan

Pelayanan kesehatan yang ditujukan untuk membantu masyarakat yang terkena dampak bencana dalam rangka memulihkan kondisi kesehatan masyarakat melalui pemulihan sistem pelayanan kesehatan masyarakat. Kegiatan pemulihan kondisi kesehatan masyarakat terkena dampak bencana sebagaimana dimaksud dilakukan dengan membantu perawatan lanjut korban bencana yang sakit dan mengalami luka, menyediakan obat-obatan, menyediakan peralatan kesehatan, menyediakan tenaga medis dan paramedis, dan memfungsikan kembali sistem pelayanan kesehatan termasuk sistem rujukan.

“BPBD berkoordinasi dengan dinas kesehatan sudah dilaksanakan pos kesehatan puskesmas di Kecamatan Masamba dan ada juga beberapa relawan yang ikut serta membantu menyediakan peralatan kesehatan kepada warga yang membutuhkan di lokasi pengungsian” (Hasil wawancara penulis tanggal 14 maret 2022).

6) Pemulihan Fungsi Pelayanan Publik

Untuk memulihkan kembali fungsi pelayanan kepada masyarakat pada kondisi seperti sebelum terjadi bencana,

kegiatan pemulihan fungsi pelayanan publik sebagaimana dimaksud dilakukan melalui upaya-upaya rehabilitasi dan pemulihan fungsi sarana dan prasarana pelayanan publik.

Berikut hasil wawancara penulis dengan kepala bidang rehabilitasi dan rekonstruksi Bapak Ismar Sukma ST:

“Untuk pelayanan publik sendiri baik itu sarana dan prasarana sudah dilakukan pemulihan dan semua sistem pelayanan di Kecamatan Masamba sudah efektif kembali”

(Hasil wawancara penulis tanggal 14 maret 2022).

7) Pemulihan Fungsi Pemerintahan

Pemulihan fungsi pemerintahan yang dimaksud dalam hal ini adalah aktifnya kembali petugas pemerintahan, terjaganya dokumen-dokumen pemerintahan, dan pengaturan kembali tugas-tugas instansi yang saling terkait pasca bencana banjir bandang. Untuk mengetahui hal tersebut sebagaimana hasil wawancara penulis dengan Lurah Bone Tua Bapak Rismar.

“Beberapa bulan pasca bencana fungsi pemerintahan di Kecamatan Masamba sudah aktif kembali dan mengenai dokumen-dokumen yang ada saya rasa aman dan terjaga tidak ada yang hilang dan tercecer pasca bencana kemarin”

8) Pemulihan Sosial Ekonomi Budaya

Pemulihan sosial ekonomi budaya adalah upaya untuk memfungsikan kembali kegiatan dan lembaga sosial ekonomi dan budaya masyarakat di Kecamatan Masamba pasca bencana banjir bandang. Berikut wawancara penulis dengan salah satu masyarakat yang terdampak banjir bandang Ibu Kurni.

“Pasca banjir bandang kemarin pendapatan ekonomi menurun bahkan 2 bulan pasca bencana tidak ada pemasukan sama sekali, tapi masyarakat sendiri sudah mulai beraktifitas kembali seperti dulu” (Hasil wawancara penulis tanggal 16 maret 2022).

Demikian juga apa yang dikemukakan oleh salah satu korban yang terdampak banjir bandang di Kelurahan Bone Tua sebagai salah satu kelurahan di Kecamatan Masamba yang mengalami kerusakan parah, dalam hal ini Ibu Hasmiati dalam wawancara dengan penulis :

“Belum stabil sekali perekonomian masyarakat pasca bencana, untuk pertokoan warga yang berdampak kemarin sudah berpencar untuk cari tempat lain untuk menjual tetapi ada juga yang sudah membangun kembali

*tempat mereka untuk melakukan aktifitas seperti dulu”
(Hasil wawancara penulis tanggal 16 maret 2022).*

Dari uraian-uraian tersebut di atas menunjukkan bahwa untuk pemulihan dari aspek sosial ekonomi budaya masyarakat sudah mulai efektif kembali namun ada beberapa masyarakat yang mengalami penurunan dari segi pendapatan pasca bencana banjir bandang.

b. Rekonstruksi

Rekonstruksi adalah perumusan kebijakan dan usaha serta langkah-langkah nyata yang terencana baik, konsisten, dan berkelanjutan untuk membangun kembali secara permanen semua sarana dan prasarana dan sistem kelembagaan baik di tingkat pemerintahan maupun masyarakat, dengan sasaran utama tumbuh berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial budaya, tegaknya hukum dan ketertiban, dan bangkitnya peran dan partisipasi masyarakat sipil dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat di wilayah pasca bencana.

Rekonstruksi fisik merupakan tindakan untuk memulihkan kondisi fisik melalui pembangunan kembali secara permanen sarana dan prasarana permukiman, pemerintahan serta pelayanan masyarakat (Peribadatan,

kesehatan, pendidikan, perkantoran, dll), sarana dan prasarana ekonomi (jaringan jalan, air bersih, drainase, telekomunikasi, listrik, dll) yang rusak akibat bencana banjir bandang agar dapat kembali ke kondisi semula atau bahkan lebih baik dari kondisi sebelum bencana. Adapun hasil observasi dan wawancara yang dilakukan peneliti terkait program rekonstruksi yaitu:

1) Pembangunan Kembali Sarana dan Prasarana

Pembangunan kembali sarana dan prasarana proses ini dilakukan oleh lembaga/institusi terkait, di bawah koordinasi BPBD bersama-sama dengan masyarakat, proses ini dilakukan dengan memperhatikan arahan tata ruang yang ada, atau arahan tata ruang yang diperbaharui yang sudah memperhatikan aspek pengurangan risiko bencana di masa yang akan datang. Berikut wawancara penulis dengan Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi Bapak Ismar Sukma ST:

“Pembangunan sarana dan prasarana yang kita mulai tata dulu seperti jaringan jalan yang rusak khususnya jalan kewenangan provinsi yang sudah bagus, dan juga ada beberapa drainase yang rusak sudah mulai diperbaiki begitupun jembatan penghubung beberapa daerah yang

*sempat terputus sudah ditangani langsung oleh BPBD”
(Hasil wawancara penulis tanggal 14 maret 2022).*



Gambar 4.13 Pembangunan Kembali Jaringan Jalan dan Jaringan Drainase Pasca Bencana Banjir Bandang

(Sumber: Hasil Survey Tahun 2022)

2) Pembangunan Kembali Sarana Sosial Masyarakat

Proses pembangunan kembali sarana sosial masyarakat dilaksanakan oleh institusi terkait di bawah koordinasi BPBD, bersama-sama dengan masyarakat melalui suatu penyusunan Rencana Teknis kegiatan pembangunan yang ingin diwujudkan, Penyusunan Rencana Teknis seperti di atas dilakukan melalui survei investigasi dan desain dengan memperhatikan kondisi lingkungan, sosial ekonomi, budaya, adat istiadat dan standar konstruksi bangunan.

Perencanaan teknis yang disusun sebagaimana dimaksud di atas harus memenuhi ketentuan teknis mengenai standar teknik konstruksi bangunan, penetapan kawasan, dan arahan pemanfaatan ruang.

“Untuk di Kecamatan Masamba sendiri ada lima desa atau kelurahan yang terdampak banjir bandang kemarin, jadi untuk membangun kembali rumah yang terdampak parah kemarin itu sudah diberi masukan arahan dari dinas perumahan kepada masyarakat membangun rumah yang aman dan nyaman, bagi masyarakat yang ingin membangun rumahnya kembali di sekitar bantaran sungai tidak kami izinkan karena daerah tersebut sudah masuk zona merah jadi kami berikan hunian tetap di lokasi-lokasi yang sudah disediakan oleh pemerintah”. (Hasil wawancara penulis tanggal 14 maret 2022).

3) Pembangkitan Kembali Kehidupan Sosial Budaya Masyarakat

Pembangkitan kembali kehidupan sosial budaya masyarakat ditujukan untuk menata kembali kehidupan dan mengembangkan pola-pola kehidupan ke arah kondisi kehidupan sosial budaya kehidupan masyarakat yang lebih baik untuk menghilangkan rasa traumatik

masyarakat terhadap bencana banjir bandang, berikut wawancara penulis dengan salah satu staf di Kantor Camat Masamba Ibu Rosmiati:

“Mengenai hal tersebut saya kira kehidupan masyarakat sudah kembali efektif seperti sediakala pasca bencana kemarin mengingat juga sudah hampir 2 tahun pasca kejadian banjir, saya kira sudah efektif lagi hanya saja masih ada segelintir orang yang masih merasa was-was atau khawatir ketika hujan kembali menguyur masamba karena ia masih mengingat kejadian-kejadian kemarin”. ”.

(Hasil wawancara penulis tanggal 14 maret 2022).

4) Penerangan Rancang Bangun Yang Tepat dan Penggunaan Peralatan Yang Lebih Baik Serta Tahan Bencana

Penerangan rancang bangun dan penggunaan peralatan yang lebih baik dan tahan bencana dilaksanakan oleh BPBD, melalui cara memperhatikan peraturan bangunan, peraturan perencanaan, pedoman dan manual rancang bangun yang ada, mengembangkan rancang bangun hasil penelitian dan pengembangan; menyesuaikan dengan tata ruang; memperhatikan kondisi dan kerusakan daerah, memperhatikan kearifan lokal, dan menyesuaikan

terhadap tingkat kerawanan bencana pada daerah yang bersangkutan. Berikut wawancara penulis dengan Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi Bapak Ismar Sukma ST:

“Mengenai hal tersebut kita berharap bangunan yang kita berikan untuk masyarakat terdampak itu memiliki persyaratan ketahanan terhadap bencana alam, sehingga kita betul butuh aplikator (penyedia rumah) khususnya gempa maka kita betul-betul memiliki sertifikat itu dalam hal ini rumah tahan gempa, harus juga memiliki rekomendasi oleh kementerian PUPR terkait rumah yang tahan bencana atau gempa makanya harus ada sertifikat tentang hal itu”. (Hasil wawancara penulis tanggal 14 maret 2022).

5) Peningkatan Kondisi Sosial, Ekonomi dan Budaya

Peningkatan kondisi sosial, ekonomi dan budaya adalah untuk menormalisasikan kondisi dan kehidupan yang lebih baik pasca bencana banjir bandang. Mengenai hal tersebut sudah ada upaya yang dilakukan pemerintah maupun masyarakat untuk menormalisasikan kondisi tersebut dengan berbagai upaya yang dilakukan seperti pemberian bantuan oleh pemerintah kepada masyarakat baik itu berupa uang tunai maupun bahan material.

Dari uraian-uraian di atas mengenai program-program rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana banjir bandang dan untuk mengetahui capaian dari indikator tersebut berikut realisasi dari rekapitulasi kerusakan infrastruktur di Kecamatan Masamba pada tabel berikut:

Tabel 4.10 Realiasi dari Rekapitulasi Data Kerusakan Infrastruktur di Kecamatan Masamba

Sektor/Sub Sektor	Sarana & Prasarana	Volume	Data Kerusakan				Perbaikan
			Berat	Sedang	Ringan	Satuan	
1. Permukiman							
Prasarana Lingkungan							
Fasilitas Umum							
a	Sambungan Rumah (SR)	1200	1200	-	-	Unit	√
b	Pipa Tersier D.4 Inch	2000	2000	-	-	M	√
c	Pipa Tersier D.3 Inch	1000	1000	-	-	M	√
d	Pipa Tersier D.2 Inch	2000	2000	-	-	M	√
Sanitasi							
a	Bangunan IPAL Komunal Hibah Saiig di Kel. Bone dan Kel. Bone Tua	320	320	-	-	SR	-
b	Bangunan IPAL Komunal DAK di Kel. Bone dan Kel. Bone Tua	100	100	-	-	SR	-
Pembangunan Rumah							
a	Rumah Rusak		-	155	950	Unit	351 √
2. Infrastruktur							
Transportasi Darat							
Jalan Nasional							
a	Ruas Batas Kab. Luwu Utara – Batas Ka. Luwu Timur	360	360	-	-	M	√
Jalan Kabupaten							
a	Ruas Balebo – Maipi	2000	2000	-	-	M	-
b	Ruas Masamba – Pincara	3000	3000	-	-	M	-
c	Jalan dalam kota	8500	8500	-	-	M	√
d	Jalan Lingkar Selatan Ruas Baliase – Radda Baliase (Baliase- Laba)	7800	7800	-	-	M	√

Sektor/Sub Sektor	Sarana dan Prasarana	Volume	Data Kerusakan			Satuan	Perbaikan
			Berat	Sedang	Ringan		
e	Jalan Lingkar Selatan Ruas Baliase – Radda (Laba-Radda)	5600	5600	-	-	M	√
Jalan Lingkungan							
a	Jalan lingkungan kompleks Perum. Griya Cendana Putih	1500	-	-	1500	M	50% √
b	Jalan lingkungan di Kel. Bone	600	600	-	-	M	50% √
c	Jalan lingkungan di Kel. Bone Tau	1410	1410	-	-	M	50% √
Bangunan Drainase							
a	Drainase Kompleks Perum. Griya Cendana Permai	3000	3000	-	-	M	√
b	Drainase/Saluran Pembuangan di Kel. Bone dan Kel. Bone Tua	10962	10962	-	-	M	-
c	Drainase + Pendestrian di Kel. Bone	1850	1850	-	-	M	-
d	Drainase Lingkar Sa'pek Kel. Bone						-
e	Drainase Ibu Kota Masamba						√
Jembatan							
a	Jembatan Beton Balebo/Tandung	28	28	-	-	M	√
b	Jembatan Gantung Pelangi Maipi	35	35	-	-	M	-
c	Jembatan Gantung Maipi	45	45	-	-	M	-
d	Jembatan Gantung Kamiri	38	38	-	-	M	-
e	Jembatan Beton Kamiri	8	8	-	-	M	-
f	Jembatan Gantung D.L Kurri-Kasambi	40	40	-	-	M	-
g	Jembatan Gantung Lumi	100	100	-	-	M	-
h	Jembatan Gantung Laba	55	55	-	-	M	√
Transportasi Udara							
a	Bandara Andi Jemma (Landasan Pacu)	800	-	-	800	M	√
Sumber Daya Air							
a	Jembatan Pipa Transmisi D. 12 Inch	48	48	-	-	M	√
b	Jaringan Pipa Transmisi D. 12 Inch	2490	2490	-	-	M	√
c	Jaringan Pipa Pelintas D. 12 Inch	40	40	-	-	M	√
d	Jaringan Pipa Pelintas D. 6 Inch	80	80	-	-	M	√

Sektor/Sub Sektor	Sarana dan Prasarana	Volume	Data Kerusakan				Perbaikan
			Berat	Sedang	Ringan	Satuan	
e	Jaringan Pipa Distribusi D. 6 Inch	500	500	-	-	M	√
f	Bendung/Intake PDAM	25	25	-	-	M	√
g	Bendung D.I Kurri-Kasambi	30	30	-	-	M	-
h	Bendung D.I Kappuna-Lebannu	800	800	-	-	M	-
l	Saluran Irigasi Primer D.I Kurri-Kurri – Kasambi	500	500	-	-	M	-
j	Saluran Irigasi Primer D.I Kappuna-Lebannu	800	800	-	-	M	-
k	Bronjong Sungai Masamba	200	200	-	-	M	-
3. Sosial							
Kesehatan							
a	Puskesmas Masamba	1	-	-	1	Unit	√
b	Lab. Kesehatan Daerah	1	-	-	1	Unit	√
c	PSC 119 Luwu Utara	1	-	1	-	Unit	√
Peribadatan							
a	Masjid Jami Bone Tua	1	-	-	1	Unit	√
b	Masjid Potaden	1	1	-	-	Unit	√
c	Masjid Jalajja	1	-	-	1	Unit	√
d	Masjid Lombok	1	1	-	-	Unit	√
e	Masjid Kemenag Luwu Utara	1	-	-	1	Unit	√
f	Masjid Perum. Griya Cendana Permai	1	-	-	1	Unit	√
g	Masjid Raya Syuhada	1	-	-	1	Unit	√
h	Masjid Lontang	1	1	-	-	Unit	-
i	Mushollah Sa'pek Selatan	1	1	-	-	Unit	√
j	Masjid Sa'pek Selatan	1	-	-	1	Unit	√
k	Mushollah Desa Maipi	1	1	-	-	Unit	√
Pendidikan							
a	Madrasah Aliyah Negeri	1	-	-	1	Unit	√
b	Madrasah Tsanawiyah Negeri	1	-	-	1	Unit	√
c	DDI Masamba	1	-	-	1	Unit	√
d	SMP Negeri 1 Masamba	1	-	-	1	Unit	√
e	SD Negeri 1 Masamba	1	-	-	1	Unit	√
f	TK Aisyah	1	-	-	1	Unit	√
g	Pondok Pesantren Al-Fatah	1	1	-	-	Unit	√
h	SD Negeri Matoto	1	-	-	1	Unit	√
i	TK Griya Cendana	1	-	-	1	Unit	√
j	TK Aisyiyah Pongo	1	-	-	1	Unit	-
4. Lintas Sektor							
Pemerintahan							

Sektor/Sub Sektor	Sarana dan Prasarana	Volume	Data Kerusakan				Perbaikan
			Berat	Sedang	Ringan	Satuan	
a	Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah	1	-	-	1	Unit	√
b	Kantor Kementerian Agama Kab. Luwu Utara	1	-	-	1	Unit	√
c	UPTD Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1	-	-	1	Unit	√
d	Dewan Pendidikan Kab. Luwu Utara	1	-	-	1	Unit	√
e	Kantor Lurah Bone	1	-	-	1	Unit	√
f	Koramil Masamba	1	-	-	1	Unit	-
g	Kantor Pos Masamba	1	-	-	1	Unit	-
h	Kantor Perpajakan	1	-	-	1	Unit	√
i	Kantor Bawaslu Luwu Utara	1	-	-	1	Unit	√
j	Rumah Jabatan Bupati Luwu Utara	1	-	-	1	Unit	-
k	Rumah Jabatan Wakil Bupati Luwu Utara	1	-	1	-	Unit	-
l	Mess Kejaksaan Negeri Luwu Utara	1	-	-	1	Unit	√
Keuangan dan Perbankan							
a	Bank BRI Cab. Masamba	1	-	1	-	Unit	√

Sumber: Kantor BPBD Kabupaten Luwu Utara, Tahun 2022

Tabel 4.11 Efektivitas Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Banjir Bandang di Kabupaten Luwu Utara

Program	Indikator Program	Kegiatan	Skor (%)
Rehabilitasi			
Perbaikan lingkungan daerah bencana	• Perbaikan lingkungan fisik kawasan permukiman	• Perbaikan lingkungan fisik Kawasan Permukiman, meliputi: - Perbaikan Jumlah Permukiman yang rusak - Kebutuhan Lahan	31,76 41,21
	• Perbaikan lingkungan fisik kawasan usaha	• Perbaikan lingkungan fisik kawasan usaha - Jumlah pertokoan yang rusak	40
Perbaikan sarana dan prasarana umum	• Prasarana jaringan jalan	• Perbaikan Jaringan Jalan - Jalan Nasional - Jalan Kabupaten - Jalan Lingkungan	100 60 50
	• Prasarana jaringan air bersih	• Perbaikan Jaringan Air Bersih - Jaringan Pipa tersier - Jaringan pipa transmisi - Jaringan pipa pelintas - Jaringan pipa distribusi	100 100 100 100
	• Prasarana jaringan sanitasi dan limbah	- Bendung • Perbaikan Jaringan Sanitasi & Limbah	33,33

	<ul style="list-style-type: none"> • Prasarana jaringan irigasi • Sarana peribadatan • Sarana pendidikan • Sarana kesehatan 	<ul style="list-style-type: none"> - Perbaiki IPAL Hibah Saing - Perbaiki IPAL Komunal DAK • Perbaiki Jaringan Irigasi <ul style="list-style-type: none"> - Perbaiki saluran irigasi primer • Perbaiki sarana peribadatan <ul style="list-style-type: none"> - Jumlah peribadatan masjid yang rusak • Perbaiki sarana pendidikan <ul style="list-style-type: none"> - TK - SD - SMP - SMA • Perbaiki sarana kesehatan <ul style="list-style-type: none"> - Puskesmas - Lab Kesehatan Daerah - Psc 119 Luwu Utara • Perbaiki sarana perkantoran <ul style="list-style-type: none"> - Perbaiki jumlah perkantoran yang rusak 	<p>80</p> <p>30</p> <p>90,90</p> <p>60,66</p> <p>100</p> <p>100</p> <p>100</p> <p>60,66</p>
Pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> • Masyarakat terdampak bencana banjir bandang di Kecamatan Masamba 	<ul style="list-style-type: none"> - Rusak Ringan - Rusak Sedang - Rusak Berat 	<p>50</p> <p>50</p> <p>50</p>
Pemulihan sosial psikologis	<ul style="list-style-type: none"> • Pemulihan psikologis masyarakat pasca bencana banjir bandang 	Kegiatan Trauma healing	90
Pelayanan Kesehatan	<ul style="list-style-type: none"> • Pemulihan kembali SDM kesehatan • Pemulihan sarana dan prasarana kesehatan 	<ul style="list-style-type: none"> • Aktifnya kembali SDM pasca bencana • Perbaiki sejumlah sarana dan prasarana yang mengalami kerusakan 	<p>100</p> <p>100</p>
Pemulihan sosial ekonomi budaya	<ul style="list-style-type: none"> • Pemulihan sosial ekonomi budaya masyarakat Kecamatan Masamba pasca banjir bandang 	Perbaiki pertokoan masyarakat yang rusak	50
Pemulihan fungsi pemerintahan	<ul style="list-style-type: none"> • Keaktifan kembali petugas pemerintahan • Terselamatkan dan terjaganya dokumen-dokumen • Konsolidasi dan pengaturan tugas pokok dan fungsi petugas pemerintahan • Pengaturan kembali tugas-tugas instansi yang saling terkait 	<ul style="list-style-type: none"> • Keaktifan kembali petugas pemerintahan <ul style="list-style-type: none"> - Melakukan tugas dan tanggung jawab pemerintahan • Terselamatkan dan terjaganya dokumen-dokumen • Konsolidasi dan pengaturan tugas pokok dan fungsi petugas pemerintahan • Pengaturan kembali tugas-tugas instansi yang saling terkait 	<p>100</p> <p>100</p> <p>100</p> <p>100</p>
Pemulihan fungsi	<ul style="list-style-type: none"> • Pelayanan kesehatan 	<ul style="list-style-type: none"> • Aktifnya kembali pelayanan kesehatan <ul style="list-style-type: none"> - Perbaiki fasilitas yang rusak 	100

pelayanan publik	<ul style="list-style-type: none"> • Pelayanan pendidikan • Pelayanan perekonomian • Pelayanan peribadatan • Pelayanan pemerintahan 	<ul style="list-style-type: none"> • Aktifnya kembali kegiatan pendidikan <ul style="list-style-type: none"> - Perbaikan sekolah-sekolah yang terdampak • Kembalinya sisten perekonomian • Pelayanan peribadatan <ul style="list-style-type: none"> - Perbaikan masjid yang terdampak • Pelayanan pemerintahan 	<p>100</p> <p>100</p> <p>100</p> <p>100</p>
Jumlah			80,75%
Rekonstruksi			
Pembangunan kembali sarana dan prasarana	<ul style="list-style-type: none"> • Prasarana jaringan jalan • Prasarana jaringan drainase • Prasarana jaringan air bersih • Prasarana jaringan sanitasi dan limbah • Prasarana jaringan irigasi • Pembangunan jembatan • Sarana peribadatan • Sarana pendidikan • Sarana kesehatan • Sarana perkantoran 	<ul style="list-style-type: none"> • Pembangunan Jaringan Jalan <ul style="list-style-type: none"> - Jalan Nasional - Jalan Kabupaten - Jalan Lingkungan • Pembangunan Jaringan Drainase <ul style="list-style-type: none"> - Drainase kompleks perumahan - Drainase atau saluran pembuangan - Drainase dan pendestrian - Drainase dalam kota • Pembangunan Jaringan Bersih <ul style="list-style-type: none"> - Jaringan Pipa tersier - Jaringan pipa transmisi - Jaringan pipa pelintas - Jaringan pipa distribusi - Bendung • Pembangunan Jaringan Sanitasi & Limbah <ul style="list-style-type: none"> - Pembuatan Septic Tank - IPAL Hibah Saing - IPAL Komunal DAK • Pembangunan Jaringan Irigasi <ul style="list-style-type: none"> - Pembangunan saluran irigasi primer • Pembangunan jembatan yang rusak • Pembangunan sarana peribadatan <ul style="list-style-type: none"> - Jumlah peribadatan masjid yang rusak • Pembangunan sarana pendidikan <ul style="list-style-type: none"> - TK - SD - SMP - SMA • Pembangunan sarana kesehatan <ul style="list-style-type: none"> - Puskesmas - Lab Kesehatan Daerah - Psc 119 Luwu Utara • Pembangunan sarana perkantoran <ul style="list-style-type: none"> - Pembangunan jumlah perkantoran yang rusak 	<p>100</p> <p>60</p> <p>50</p> <p>100</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>100</p> <p>100</p> <p>100</p> <p>100</p> <p>100</p> <p>33,33</p> <p>70</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>25</p> <p>90,90</p> <p>60,66</p> <p>100</p> <p>100</p> <p>100</p> <p>100</p> <p>100</p> <p>100</p> <p>100</p> <p>100</p> <p>60,66</p>
Pembangunan kembali sarana sosial masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> • Pembangunan fasilitas sosial dan fasilitas umum pasca bencana banjir bandang 	<ul style="list-style-type: none"> • Pembangunan kembali fasilitas sosial yang rusak 	<p>60</p>
Pembangkitan kembali kehidupan sosial budaya masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> • Pembangkitan kembali kehidupan masyarakat • Menghilangkan rasa trauma masyarakat 	<ul style="list-style-type: none"> • Pemberian bantuan baik berupa uang maupun material • Pemberian kegiatan trauma healing 	<p>50</p> <p>90</p>

Penerangan rancang bangun yang tepat dan penggunaan peralatan yang lebih baik serta tahan bencana	<ul style="list-style-type: none"> • Memperhatikan peraturan bangunan, peraturan perencanaan, pedoman dan manual rancang bangun • Mengembangkan rancang bangun hasil penelitian dan pengembangan • Menyesuaikan dengan tata ruang • Memperhatikan kondisi dan kerusakan daerah • Menyesuaikan dengan tingkat kerawanan bencana 	Melakukan pembangunan kembali dengan memiliki persyaratan terhadap ketahanan terhadap bencana	50
Peningkatan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya	<ul style="list-style-type: none"> • Menormalisasikan kehidupan masyarakat pasca bencana 	Melakukan pembangunan kembali baik itu tempat tinggal maupun sarana dan prasarana yang mengalami kerusakan	60
Peningkatan fungsi pelayanan publik	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan fungsi sarana dan prasarana pelayanan publik • Mengaktifkan kembali fungsi pelayanan publik pada instansi • Pengaturan kembali fungsi pelayanan publik 	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan fungsi sarana dan prasarana pelayanan publik • Mengaktifkan kembali fungsi pelayanan publik pada instansi • Pengaturan kembali fungsi pelayanan publik 	90 100 80
Peningkatan pelayanan utama dalam masyarakat		Mengembangkan pola-pola pelayanan masyarakat yang efektif dan efisien	75
Jumlah			68,58%

Sumber: Hasil analisis peneliti, 2022

Berdasarkan tabel 4.11 di atas mengenai efektivitas program rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana banjir bandang di Kabupaten Luwu Utara, terlihat bahwa upaya program rehabilitasi yang dilakukan pemerintah daerah Kabupaten Luwu Utara sudah efektif dengan skor nilai efektivitas 80,75 persen. Meskipun demikian, masih terdapat beberapa program kegiatan

yang belum sepenuhnya efektif hal tersebut dikarenakan masih banyaknya infrastruktur yang masih perlu dilakukan perbaikan sedangkan anggaran yang ada sangat terbatas. Selain itu upaya program rekonstruksi yang dilakukan pemerintah daerah Kabupaten Luwu Utara juga dikategorikan sudah cukup efektif dengan skor nilai 68,58 persen. Meskipun demikian, masih ada beberapa indikator rehabilitasi dan rekonstruksi kawasan pasca bencana membutuhkan waktu yang lama. Kerusakan yang terjadi dan rehabilitasi rekonstruksi yang akan dilakukan belum dapat dipastikan dilakukan pada tahun yang sama, dan jumlah kebutuhan dana rehabilitasi dan rekonstruksi infrastruktur yang tinggi juga menjadi alasan lainnya.

3. Kendala Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Banjir Bandang

Dalam menjalankan tugas fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah beserta dinas-dinas terkait belumlah maksimal. Hal tersebut terkendala oleh berbagai macam permasalahan yang berpengaruh terhadap kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Utara antara lain:

- a. Perlunya peningkatan kualitas dan kuantitas aparatur serta sarana dan prasarana pendukung tugas fungsi BPBD dalam penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;

- b. Perlunya upaya peningkatan dan pengurangan risiko bencana;
- c. Masih rendahnya koordinasi lintas sektor
- d. Masih rendahnya alokasi anggaran pemerintah daerah dalam Penanggulangan Bencana;
- e. Besarnya anggaran yang dibutuhkan dalam rangka rehabilitasi dan rekonstruksi kawasan pasca bencana banjir bandang;
- f. Pendanaan yang belum maksimal dalam merekonstruksi dan merehabilitasi kawasan;
- g. Perbedaan skill personil BPBD Kabupaten Luwu Utara
- h. Masih kurangnya kesadaran masyarakat bahwa bencana merupakan urusan bersama.

Demikian juga tabel kendala program dalam rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana banjir bandang Tahun 2020 oleh pemerintah daerah Kabupaten Luwu Utara, sebagai berikut.

**Tabel 4.12 Kendala Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Banjir Bandang
di Kabupaten Luwu Utara**

Program	Indikator Program	Kegiatan	Skor (%)	Masalah
Rehabilitasi				
Perbaikan lingkungan daerah bencana	<ul style="list-style-type: none"> Perbaikan lingkungan fisik kawasan permukiman Perbaikan lingkungan fisik kawasan usaha 	<ul style="list-style-type: none"> Perbaikan lingkungan fisik Kawasan Permukiman, meliputi: <ul style="list-style-type: none"> Perbaikan Jumlah Permukiman yang rusak Kebutuhan Lahan Perbaikan lingkungan fisik kawasan usaha <ul style="list-style-type: none"> Jumlah pertokoan yang rusak 	31,76 41,21 40	<ul style="list-style-type: none"> Masalah dari perbaikan kawasan permukiman yaitu anggaran yang sangat terbatas sedangkan rumah yang perlu dilakukan perbaikan cukup banyak yaitu 1105 unit rumah dengan jumlah anggaran dibutuhkan sebanyak Rp 63.350.000.000. Selain itu permasalahan lainnya yaitu keterbatasan lahan untuk membangun rumah masyarakat yang terdampak dengan kebutuhan lahan masih ada sekitar 4 ha di Kecamatan Masamba. Masalah dari perbaikan kawasan usaha yaitu masalah anggaran, dikarenakan anggaran mengenai perbaikan kawasan usaha baru ada akhir bulan tahun 2021 kemarin, sehingga proses penyalurannya masih sementara berjalan.
		<ul style="list-style-type: none"> Perbaikan Jaringan Jalan <ul style="list-style-type: none"> Jalan Nasional Jalan Kabupaten Jalan Lingkungan Perbaikan Jaringan Air Bersih <ul style="list-style-type: none"> Jaringan Pipa tersier Jaringan pipa transmisi Jaringan pipa pelintas Jaringan pipa distribusi Bendung Perbaikan Jaringan Sanitasi & Limbah <ul style="list-style-type: none"> Perbaikan IPAL Hibah Saing Perbaikan IPAL Komunal DAK Perbaikan Jaringan Irigasi <ul style="list-style-type: none"> Perbaikan saluran irigasi primer Perbaikan sarana peribadatan <ul style="list-style-type: none"> Jumlah peribadatan masjid yang rusak 	100 60 50 100 100 100 100 33,33 80 30 90,90	<ul style="list-style-type: none"> Masalah dari perbaikan jaringan jalan dalam hal ini jalan kabupaten dan lingkungan hanya perlu dilakukan peningkatan perbaikan jalan dari krikil ke aspal namun sampai saat ini belum dilakukan perbaikan karena kerusakan yang ada lumayan parah sehingga membutuhkan anggaran yang banyak Masalah perbaikan jaringan air bersih yaitu belum dilakukannya perbaikan pada beberapa bendung yang ada di Kecamatan Masamba yang mengalami kerusakan pasca banjir bandang seperti bendung Kurri-Kasambi, dan Kappuna-Lebannu dimana memerlukan anggaran sebanyak Rp 624.000.000 yang ditargetkan tahun 2021 namun sampai sekarang belum dilakukan perbaikan karena minimnya anggaran yang ada. Permasalahan dari jaringan sanitasi dan limbah yaitu belum dilakukan perbaikan pada IPAL yang ada di

	<ul style="list-style-type: none"> • Sarana pendidikan • Sarana kesehatan • Sarana perkantoran 	<ul style="list-style-type: none"> • Perbaikan sarana pendidikan <ul style="list-style-type: none"> - TK 60,66 - SD 100 - SMP 100 - SMA 100 • Perbaikan sarana kesehatan <ul style="list-style-type: none"> - Puskesmas 100 - Lab Kesehatan Daerah 100 - Psc 119 Luwu Utara 100 • Perbaikan sarana perkantoran <ul style="list-style-type: none"> - Perbaikan jumlah perkantoran yang rusak 60,66 	<p>Kelurahan Bone dan Bone Tua dikarenakan lokasi IPAL hancur tertimbun lumpur dan pasir</p> <ul style="list-style-type: none"> • Permasalahan jaringan irigasi yaitu belum dilakukan perbaikan irigasi yang terdampak yaitu irigasi primer Kurri-Kasambi dan Kappuna-Lebannu karena terkendala dianggarkan dengan kebutuhan anggaran sebanyak Rp 16.000.000.000 . • Dari 11 unit peribadatan yang terdampak pasca banjir bandang hanya terdapat 1 masjid yang tidak dilakukan perbaikan karena kondisi masjid masih tertimbun tanah dan pasir selain itu karena letaknya berada di bantaran sungai masamba dan masuk dalam kategori zona merah sehingga tidak dilakukan perbaikan. • Dari 10 unit pendidikan yang terdampak baik itu TK SD, SMP, dan, SMA hanya 1 sekolah yang belum dilakukan perbaikan yaitu TK Asyiyah dengan kebutuhan anggaran sebanyak Rp 303.199.000 dan terget dilakukan perbaikan tahun ini. • Masalah dari sarana perkantoran yaitu masalah anggaran yang dibutuhkan untuk dilakukan rehabilitasi sangat banyak dikarenakan ada beberapa unit perkantoran pemerintahan yang perlu dilakukan perbaikan. 	
Pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> • Masyarakat terdampak bencana banjir bandang di Kecamatan Masamba 	<ul style="list-style-type: none"> - Rusak Ringan 50 - Rusak Sedang 50 - Rusak Berat 50 	<p>Kendala dalam pemberian bantuan perbaikan rumah yaitu terkendala di anggaran, selain itu ada beberapa prosedur yang harus dilakukan masyarakat untuk mendapatkan bantuan seperti melengkapi beberapa persyaratan dan wajib melalui uji validasi BNPB RI</p>	
Pemulihan sosial psikologis	<ul style="list-style-type: none"> • Pemulihan psikologis masyarakat pasca bencana banjir bandang 	Kegiatan Trauma healing	90	<p>Kegiatan pemulihan psikologis masyarakat sudah 90% dikategorikan efektif adapun 10% masalahnya yaitu masih terdapat beberapa masyarakat yang masih trauma atau ketakutan ketika kondisi hujan.</p>
Pelayanan Kesehatan	<ul style="list-style-type: none"> • Pemulihan kembali SDM kesehatan 	<ul style="list-style-type: none"> • Aktifnya kembali SDM pasca bencana 100 • Perbaikan sejumlah sarana dan prasarana yang mengalami kerusakan 100 		Tidak terdapat masalah

	<ul style="list-style-type: none"> • Pemulihan sarana dan prasarana kesehatan 			
Pemulihan sosial ekonomi budaya	<ul style="list-style-type: none"> • Pemulihan sosial ekonomi budaya masyarakat Kecamatan Masamba pasca banjir bandang 	Perbaikan pertokoan masyarakat yang rusak	50	Kendala yang dihadapi dalam perbaikan pertokoan masyarakat yaitu terkendala di anggaran karena banyaknya toko-toko yang terdampak mengakibatkan butuh anggaran yang banyak untuk melakukan perbaikan selain itu, kawasan pertokoan yang berada dekat dari bantaran sungai tidak diperbolehkan melakukan pembangunan lagi karena berada pada zona merah sehingga membuat masyarakat harus mencari tempat yang baru.
Pemulihan fungsi pemerintahan	<ul style="list-style-type: none"> • Keaktifan kembali petugas pemerintahan • Terselamatkan dan terjaganya dokumen-dokumen • Konsolidasi dan pengaturan tugas pokok dan fungsi petugas pemerintahan • Pengaturan kembali tugas-tugas instansi yang saling terkait 	<ul style="list-style-type: none"> • Keaktifan kembali petugas pemerintahan <ul style="list-style-type: none"> - Melakukan tugas dan tanggung jawab pemerintahan • Terselamatkan dan terjaganya dokumen-dokumen • Konsolidasi dan pengaturan tugas pokok dan fungsi petugas pemerintahan • Pengaturan kembali tugas-tugas instansi yang saling terkait 	100 100 100 100	Tidak terdapat masalah
Pemulihan fungsi pelayanan publik	<ul style="list-style-type: none"> • Pelayanan kesehatan • Pelayanan pendidikan • Pelayanan perekonomian • Pelayanan peribadatan • Pelayanan pemerintahan 	<ul style="list-style-type: none"> • Aktifnya kembali pelayanan kesehatan <ul style="list-style-type: none"> - Perbaikan fasilitas yang rusak • Aktifnya kembali kegiatan pendidikan <ul style="list-style-type: none"> - Perbaikan sekolah-sekolah yang terdampak • Kembalinya sisten perekonomian • Pelayanan peribadatan <ul style="list-style-type: none"> - Perbaikan masjid yang terdampak • Pelayanan pemerintahan 	100 100 100 100	Tidak terdapat masalah
Jumlah			80,75%	

Rekonstruksi			
Pembangunan kembali sarana dan prasarana	<ul style="list-style-type: none"> • Prasarana jaringan jalan 	<ul style="list-style-type: none"> • Pembangunan Jaringan Jalan <ul style="list-style-type: none"> - Jalan Nasional 100 - Jalan Kabupaten 60 - Jalan Lingkungan 50 	<ul style="list-style-type: none"> • Jaringan jalan yang sudah dilakukan pembangunan sampai saat itu yaitu jaringan jalan provinsi/nasional sedangkan jalan kabupaten dan lingkungan belum dilakukan pembangunan karena anggaran yang dibutuhkan sangat banyak dikarenakan kondisi kerusakan yang ada cukup parah dan baru ditargetkan dilakukan pembangunan tahun ini. • Dari 4 titik kerusakan jaringan drainase yang ada baru 2 titik yang sudah dilakukan pembangunan yaitu drainase dalam kota dan drainase kompleks perumahan Griya Cendana Permai, dan 2 titik lagi belum dilakukan pembangunan padahal terget dilakukan tahun 2021 namun sampai sekarang belum dilakukan pembangunan karena anggaran yang dibutuhkan terlalu tinggi. • Permasalahan jaringan air bersih yaitu belum dilakukan pembangunan bendung yang ada di Kecamatan Masamba yang rusak akibat banjir bandang dan sampai sekarang belum ada terget kapan mau dilakukan pembangunan karena selain itu anggaran juga menjadi salah satu penghambat dikarenakan banyaknya infrastruktur lain yang perlu juga dilakukan perbaikan. • Permasalahan sarana pendidikan yaitu belum dilakukan pembangunan kembali pada ruang kelas sekolah yang ada di TK Asiyah karena terkendala di anggaran. • Banyaknya sarana perkantoran yang perlu dilakukan pembangunan kembali akibat banjir bandang dengan kebutuhan anggaran cukup tinggi dan sampai saat ini belum ada terget kapan dilakukan perbaikan.
	<ul style="list-style-type: none"> • Prasarana jaringan drainase 	<ul style="list-style-type: none"> • Pembangunan Jaringan Drainase <ul style="list-style-type: none"> - Drainase kompleks perumahan 100 - Drainase atau saluran pembuangan - - Drainase dan pendestrian - - Drainase dalam kota 100 	
	<ul style="list-style-type: none"> • Prasarana jaringan air bersih 	<ul style="list-style-type: none"> • Pembangunan Jaringan Bersih <ul style="list-style-type: none"> - Jaringan Pipa tersier 100 - Jaringan pipa transmisi 100 - Jaringan pipa pelintas 100 - Jaringan pipa distribusi 100 - Bendung 33,33 	
	<ul style="list-style-type: none"> • Prasarana jaringan sanitasi dan limbah 	<ul style="list-style-type: none"> • Pembangunan Jaringan Sanitasi & Limbah <ul style="list-style-type: none"> - Pembuatan Septic Tank 70 - IPAL Hibah Saing - - IPAL Komunal DAK - 	
	<ul style="list-style-type: none"> • Prasarana jaringan irigasi 	<ul style="list-style-type: none"> • Pembangunan Jaringan Irigasi <ul style="list-style-type: none"> - Pembangunan saluran irigasi primer - 	
	<ul style="list-style-type: none"> • Pembangunan jembatan 	<ul style="list-style-type: none"> • Pembangunan jembatan yang rusak 25 	
	<ul style="list-style-type: none"> • Sarana peribadatan 	<ul style="list-style-type: none"> • Pembangunan sarana peribadatan 90,90 <ul style="list-style-type: none"> - Jumlah peribadatan masjid yang rusak 	
	<ul style="list-style-type: none"> • Sarana pendidikan 	<ul style="list-style-type: none"> • Pembangunan sarana pendidikan 60,66 <ul style="list-style-type: none"> - TK 100 - SD 100 - SMP 100 - SMA 100 	
	<ul style="list-style-type: none"> • Sarana kesehatan 	<ul style="list-style-type: none"> • Pembangunan sarana kesehatan 100 <ul style="list-style-type: none"> - Puskesmas 100 - Lab Kesehatan Daerah 100 - Psc 119 Luwu Utara 100 	
	<ul style="list-style-type: none"> • Sarana perkantoran 	<ul style="list-style-type: none"> • Pembangunan sarana perkantoran 60,66 <ul style="list-style-type: none"> - Pembangunan jumlah perkantoran yang rusak 	

Pembangunan kembali sarana sosial masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> • Pembangunan fasilitas sosial dan fasilitas umum pasca bencana banjir bandang 	Pembangunan kembali fasilitas sosial yang rusak	60	Pembangunan fasilitas sosial yang rusak sudah 60% efektif, adapun kendala dalam hal ini yaitu terdapat beberapa fasilitas sosial yang berdampak tidak dapat dilakukan perbaikan karena ada beberapa berada pada zona merah, selain itu banyaknya kerusakan akibat banjir bandang mengakibatkan kebutuhan anggaran juga cukup tinggi .
Pembangkitan kembali kehidupan sosial budaya masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> • Pembangkitan kembali kehidupan masyarakat • Menghilangkan rasa trauma masyarakat 	<ul style="list-style-type: none"> • Pemberian bantuan baik berupa uang maupun material • Pemberian kegiatan trauma healing 	50 90	<ul style="list-style-type: none"> • Salah satu upaya yang dilakukan untuk membangkitkan kembali kehidupan masyarakat yaitu dengan cara memberikan bantuan baik itu berupa uang maupun material agar masyarakat yang terdampak dapat melakukan perbaikan tempat tinggal mereka, namun upaya tersebut belum efektif karena banyaknya masyarakat yang mengalami kerusakan tempat tinggal yang harus diberikan bantuan sedangkan anggaran yang ada cukup terbatas. • Kegiatan trauma healing untuk menghilangkan rasa trauma masyarakat pasca banjir sudah sangat efektif yaitu 90% adapun 10% kendalanya yaitu tidak semua masyarakat ikut dalam kegiatan tersebut sehingga masih terdapat beberapa masyarakat yang agak takut ketika hujan dan masih selalu mengingat kejadian banjir badang yang terjadi 2 tahun kemarin.
Penerangan rancang bangun yang tepat dan penggunaan peralatan yang lebih baik serta tahan bencana	<ul style="list-style-type: none"> • Memperhatikan peraturan bangunan, peraturan perencanaan, pedoman dan manual rancang bangun • Mengembangkan rancang bangun hasil penelitian dan pengembangan • Menyesuaikan dengan tata ruang 	Melakukan pembangunan kembali dengan memiliki persyaratan terhadap ketahanan terhadap bencana	50	Pemerintah berharap pembangunan yang dilakukan memiliki persyaratan terhadap ketahanan terhadap bencana alam, sehingga sangat perlu aplikator khususnya gempa, maka harus memiliki sertifikat rumah tahan gempa, dan harus memiliki rekomendasi oleh kementerian PUPR terkait rumah yang tahan bencana atau gempa makanya itu merupakan salah satu kendala yang dihadapi.

	<ul style="list-style-type: none"> • Memperhatikan kondisi dan kerusakan daerah • Menyesuaikan dengan tingkat kerawanan bencana 			
Peningkatan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya	<ul style="list-style-type: none"> • Menormalisasikan kehidupan masyarakat pasca bencana 	Melakukan pembangunan kembali baik itu tempat tinggal maupun sarana dan prasarana yang mengalami kerusakan	60	Kendala dalam hal pembangunan kembali sarana dan prasarana termasuk tempat tinggal yaitu anggaran yang dibutuhkan cukup tinggi
Peningkatan fungsi pelayanan publik	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan fungsi sarana dan prasarana pelayanan publik • Mengaktifkan kembali fungsi pelayanan publik pada instansi • Pengaturan kembali fungsi pelayanan publik 	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan fungsi sarana dan prasarana pelayanan publik • Mengaktifkan kembali fungsi pelayanan publik pada instansi • Pengaturan kembali fungsi pelayanan publik 	<p>90</p> <p>100</p> <p>80</p>	Dalam upaya peningkatan fungsi sarana dan prasarana publik pasti memerlukan waktu dan biaya sedangkan pasca bencana banyak hal yang memerlukan anggaran sehingga kendala lain yang dihadapi dalam hal ini yaitu biaya.
Peningkatan pelayanan utama dalam masyarakat		Mengembangkan pola-pola pelayanan masyarakat yang efektif dan efisien	75	Kurang perhatiannya masyarakat terhadap hal itu
Jumlah			68,58%	

Sumber: Hasil analisis peneliti, 2022

4. Arahan Rekomendasi Dalam Meningkatkan Efektivitas Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Banjir Bandang di Kabupaten Luwu Utara

Tabel 4.13 Arahan Rekomendasi Dalam Meningkatkan Efektivitas Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Banjir Bandang

Program	Indikator Program	Kegiatan	Skor (%)	Masalah	Arahan
Rehabilitasi					
Perbaikan lingkungan daerah bencana	<ul style="list-style-type: none"> Perbaikan lingkungan fisik kawasan permukiman Perbaikan lingkungan fisik kawasan usaha 	<ul style="list-style-type: none"> Perbaikan lingkungan fisik Kawasan Permukiman, meliputi: <ul style="list-style-type: none"> Perbaikan Jumlah Permukiman yang rusak Kebutuhan Lahan Perbaikan lingkungan fisik kawasan usaha <ul style="list-style-type: none"> Jumlah pertokoan yang rusak 	<p>31,76</p> <p>41,21</p> <p>40</p>	<ul style="list-style-type: none"> Masalah dari perbaikan kawasan permukiman yaitu anggaran yang sangat terbatas sedangkan rumah yang perlu dilakukan perbaikan cukup banyak yaitu 1105 unit rumah dengan jumlah anggaran dibutuhkan sebanyak Rp 63.350.000.000. Selain itu permasalahan lainnya yaitu keterbatasan lahan untuk membangun rumah masyarakat yang terdampak dengan kebutuhan lahan masih ada sekitar 4 ha di Kecamatan Masamba. Masalah dari perbaikan kawasan usaha yaitu masalah anggaran, dikarenakan anggaran mengenai perbaikan kawasan usahan baru ada akhir bulan tahun 2021 kemarin, sehingga proses penyalurannya masih sementara berjalan. 	<ul style="list-style-type: none"> Diharapkan anggaran yang telah diestimasikan sesuai kerusakan yang ada cepat terealisasi pada tepat waktu Diharapkan perbaikan rumah yang dibangun oleh BNPB sebanyak 805 unit di Bontomakaka terealisasi pada waktu yang sudah ditentukan yaitu sampai akhir tahun 2022 Anggaran perbaikan kawasan usaha yang sudah ada sejak akhir tahun 2021 diharapkan segera disalurkan sesuai prosedur yang ada
Perbaikan sarana dan prasarana umum	<ul style="list-style-type: none"> Prasarana jaringan jalan Prasarana jaringan air bersih 	<ul style="list-style-type: none"> Perbaikan Jaringan Jalan <ul style="list-style-type: none"> Jalan Nasional Jalan Kabupaten Jalan Lingkungan Perbaikan Jaringan Air Bersih <ul style="list-style-type: none"> Jaringan Pipa tersier 	<p>100</p> <p>60</p> <p>50</p> <p>100</p>	<ul style="list-style-type: none"> Masalah dari perbaikan jaringan jalan dalam hal ini jalan kabupaten dan lingkungan hanya perlu dilakukan peningkatan perbaikan jalan dari krikil ke aspal namun sampai saat ini belum dilakukan perbaikan karena kerusakan 	<ul style="list-style-type: none"> Diperlukan peningkatan terhadap jaringan jalan baik itu jalan kabupaten maupun jalan lingkungan Diharapkan 2 bendung yang mengalami dampak kerusakan segera ditangani, karena target waktu

	<ul style="list-style-type: none"> • Prasarana jaringan sanitasi dan limbah • Prasarana jaringan irigasi • Sarana peribadatan • Sarana pendidikan • Sarana kesehatan • Sarana perkantoran 	<ul style="list-style-type: none"> - Jaringan pipa transmisi - Jaringan pipa pelintas - Jaringan pipa distribusi - Bendung • Perbaikan Jaringan Sanitasi & Limbah <ul style="list-style-type: none"> - Perbaikan IPAL Hibah Saing - Perbaikan IPAL Komunal DAK • Perbaikan Jaringan Irigasi <ul style="list-style-type: none"> - Perbaikan saluran irigasi primer • Perbaikan sarana peribadatan <ul style="list-style-type: none"> - Jumlah peribadatan masjid yang rusak • Perbaikan sarana pendidikan <ul style="list-style-type: none"> - TK - SD - SMP - SMA • Perbaikan sarana kesehatan <ul style="list-style-type: none"> - Puskesmas - Lab Kesehatan Daerah - Psc 119 Luwu Utara • Perbaikan sarana perkantoran <ul style="list-style-type: none"> - Perbaikan jumlah perkantoran yang rusak 	<p>100</p> <p>100</p> <p>100</p> <p>33,33</p> <p>80</p> <p>30</p> <p>90,90</p> <p>60,66</p> <p>100</p> <p>100</p> <p>100</p> <p>100</p> <p>60,66</p>	<p>yang ada lumayan parah sehingga membutuhkan anggaran yang banyak</p> <ul style="list-style-type: none"> • Masalah perbaikan jaringan air bersih yaitu belum dilakukannya perbaikan pada beberapa bendung yang ada di Kecamatan Masamba yang mengalami kerusakan pasca banjir bandang seperti bendung Kurri-Kasambi, dan Kappuna-Lebannu dimana memerlukan anggaran sebanyak Rp 624.000.000 yang ditargetkan tahun 2021 namun sampai sekarang belum dilakukan perbaikan karena minimnya anggaran yang ada. • Permasalahan dari jaringan sanitasi dan limbah yaitu belum dilakukan perbaikan pada IPAL yang ada di Kelurahan Bone dan Bone Tua dikarenakan lokasi IPAL hancur tertimbun lumpur dan pasir • Permasalahan jaringan irigasi yaitu belum dilakukan perbaikan irigasi yang terdampak yaitu irigasi primer Kurri-Kasambi dan Kappuna-Lebannu karena terkendala dianggarkan dengan kebutuhan anggaran sebanyak Rp 16.000.000.000 . • Dari 11 unit peribadatan yang terdampak pasca banjir bandang hanya terdapat 1 masjid yang tidak dilakukan perbaikan karena kondisi masjid masih tertimbun tanah dan pasir selain itu karena letaknya berada di bantaran sungai masamba dan masuk dalam kategori zona merah sehingga tidak dilakukan perbaikan. 	<p>yang telah ditentukan tahun 2021 belum terealisasi dan diharapkan anggaran dana cair tepat waktu.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Diharapkan anggaran mengenai perbaikan IPAL yang ada di Kelurahan Bone dan Bone Tua dapat segera ada pada tepat waktu, agar IPAL tersebut dapat berfungsi lagi seperti semula. • Diharapkan anggaran irigasi yang rusak dapat segera cair tepat waktu, karena irigasi tersebut sangat dibutuhkan oleh masyarakat setempat untuk memenuhi kebutuhan air di daerah pertanian mereka khususnya sawah. • Diharapkan masjid yang masih tertimbun tanah dan pasir disekitar bantaran sungai segera dibersihkan dan dilakukan pengerukan. • Diharapkan dana untuk perbaikan ruang kelas di sekolah TK Asyiyah segera cair tepat waktu agar sekolah tersebut dapat digunakan kembali bagi masyarakat setempat. • Diharapkan dilakukan perbaikan secepatnya terhadap beberapa perkantoran yang mengalami kerusakan dan anggaran yang sudah ditentukan agar segera cair tepat waktu agar dapat dilakukan pembangunan secara bertahap.
--	---	---	--	---	--

				<ul style="list-style-type: none"> • Dari 10 unit pendidikan yang terdampak baik itu TK SD, SMP, dan, SMA hanya 1 sekolah yang belum dilakukan perbaikan yaitu TK Asiyah dengan kebutuhan anggaran sebanyak Rp 303.199.000 dan target dilakukan perbaikan tahun ini. • Masalah dari sarana perkantoran yaitu masalah anggaran yang dibutuhkan untuk dilakukan rehabilitasi sangat banyak dikarenakan ada beberapa unit perkantoran pemerintahan yang perlu dilakukan perbaikan. 	
Pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> • Masyarakat terdampak bencana banjir bandang di Kecamatan Masamba 	<ul style="list-style-type: none"> - Rusak Ringan - Rusak Sedang - Rusak Berat 	<p>50</p> <p>50</p> <p>50</p>	<p>Kendala dalam pemberian bantuan perbaikan rumah yaitu terkendala di anggaran, selain itu ada beberapa prosedur yang harus dilakukan masyarakat untuk mendapatkan bantuan seperti melengkapi beberapa persyaratan dan wajib melalui uji validasi BNPB RI</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Diharapkan agar masyarakat yang sudah tervalidasi datanya oleh BNPB RI agar segera diberikan bantuan perbaikan rumah sesuai tipe kerusakan yang dialami. • Diharapkan pemerintah setempat agar segera memenuhi fasilitas yang ada di beberapa huntap yang telah dibangun agar masyarakat segera tinggal di hunian mereka
Pemulihan sosial psikologis	<ul style="list-style-type: none"> • Pemulihan psikologis masyarakat pasca bencana banjir bandang 	Kegiatan Trauma healing	90	<p>Kegiatan pemulihan psikologis masyarakat sudah 90% dikategorikan efektif adapun 10% masalahnya yaitu masih terdapat beberapa masyarakat yang masih trauma atau ketakutan ketika kondisi hujan.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Perlu dilakukan penyuluhan terhadap masyarakat yang masih mengalami trauma pasca bencana
Pelayanan Kesehatan	<ul style="list-style-type: none"> • Pemulihan kembali SDM kesehatan • Pemulihan sarana dan prasarana kesehatan 	<ul style="list-style-type: none"> • Aktifnya kembali SDM pasca bencana • Perbaikan sejumlah sarana dan prasarana yang mengalami kerusakan 	<p>100</p> <p>100</p>	Tidak terdapat masalah	

Pemulihan sosial ekonomi budaya	<ul style="list-style-type: none"> • Pemulihan sosial ekonomi budaya masyarakat Kecamatan Masamba pasca banjir bandang 	Perbaikan pertokoan masyarakat yang rusak	50	Kendala yang dihadapi dalam perbaikan pertokoan masyarakat yaitu terkendala di anggaran karena banyaknya toko-toko yang terdampak mengakibatkan butuh anggaran yang banyak untuk melakukan perbaikan. Selain itu, kawasan pertokoan yang berada dekat dari bantaran sungai tidak diperbolehkan melakukan pembangunan lagi karena berada pada zona merah sehingga membuat masyarakat harus mencari tempat yang baru.	Diharapkan anggaran untuk perbaikan toko-toko masyarakat segera disalurkan agar masyarakat kembali melakukan aktivitas seperti sediakala.
Pemulihan fungsi pemerintahan	<ul style="list-style-type: none"> • Keaktifan kembali petugas pemerintahan • Terselamatkan dan terjaganya dokumen-dokumen • Konsolidasi dan pengaturan tugas pokok dan fungsi petugas pemerintahan • Pengaturan kembali tugas-tugas instansi yang saling terkait 	<ul style="list-style-type: none"> • Keaktifan kembali petugas pemerintahan <ul style="list-style-type: none"> - Melakukan tugas dan tanggung jawab pemerintahan • Terselamatkan dan terjaganya dokumen-dokumen • Konsolidasi dan pengaturan tugas pokok dan fungsi petugas pemerintahan • Pengaturan kembali tugas-tugas instansi yang saling terkait 	100 100 100 100	Tidak terdapat masalah	
Pemulihan fungsi pelayanan publik	<ul style="list-style-type: none"> • Pelayanan kesehatan • Pelayanan pendidikan • Pelayanan perekonomian 	<ul style="list-style-type: none"> • Aktifnya kembali pelayanan kesehatan <ul style="list-style-type: none"> - Perbaikan fasilitas yang rusak • Aktifnya kembali kegiatan pendidikan 	100	Tidak terdapat masalah	

	<ul style="list-style-type: none"> • Pelayanan peribadatan • Pelayanan pemerintahan 	<ul style="list-style-type: none"> - Perbaiki sekolah-sekolah yang terdampak • Kembalinya sisten perekonomian • Pelayanan peribadatan <ul style="list-style-type: none"> - Perbaiki masjid yang terdampak • Pelayanan pemerintahan 	100 100 100 100		
Jumlah			80,75%		
Rekonstruksi					
Pembangunan kembali sarana dan prasarana	<ul style="list-style-type: none"> • Prasarana jaringan jalan 	<ul style="list-style-type: none"> • Pembangunan Jaringan Jalan <ul style="list-style-type: none"> - Jalan Nasional - Jalan Kabupaten - Jalan Lingkungan 	100 60 50	<ul style="list-style-type: none"> • Jaringan jalan yang sudah dilakukan pembangunan sampai saat itu yaitu jaringan jalan provinsi/nasional sedangkan jalan kabupaten dan lingkungan belum dilakukan pembangunan karena anggaran yang dibutuhkan sangat banyak dikarenakan kondisi kerusakan yang ada cukup parah dan baru ditargetkan dilakukan pembangunan tahun ini. • Dari 4 titik kerusakan jaringan drainase yang ada baru 2 titik yang sudah dilakukan pembangunan yaitu drainase dalam kota dan drainase kompleks perumahan Griya Cendana Permai, dan 2 titik lagi belum dilakukan pembangunan padahal terget dilakukan tahun 2021 namun sampai sekarang belum dilakukan pembangunan karena anggaran yang dibutuhkan terlalu tinggi. • Permasalahan jaringan air bersih yaitu belum dilakukan pembangunan bendung yang ada di Kecamatan Masamba yang rusak akibat banjir bandang dan sampai sekarang belum ada terget kapan mau dilakukan 	<ul style="list-style-type: none"> • Diharapkan dilakukan pembangunan dan peningkatan secepatnya terhadap beberapa jaringan jalan kabupaten dan lingkungan yang masih mengalami kerusakan pasca bencana, dan anggaran yang sudah diestimasikan segera turun tepat waktu • Diharapkan dilakukan pembangunan segera terhadap jaringan drainase yang masih dalam keadaan rusak parah supaya drainase tersebut dapat berfungsi lagi, agar air yang ada tidak tergenang lagi akibat kondisi yang tidak memadai. • Diharapkan anggaran untuk pembangunan kembali beberapa bendung dapat cair tepat waktu • Diharapkan anggaran mengenai perbaikan IPAL yang ada di Kelurahan Bone dan Bone Tua dapat segera cair pada tepat waktu, agar IPAL tersebut dapat berfungsi lagi seperti semula. • Diharapkan anggaran irigasi yang rusak dapat segera cair tepat waktu, karena irigasi tersebut sangat
	<ul style="list-style-type: none"> • Prasarana jaringan drainase 	<ul style="list-style-type: none"> • Pembangunan Jaringan Drainase <ul style="list-style-type: none"> - Drainase kompleks perumahan - Drainase atau saluran pembuangan - Drainase dan pedestrian - Drainase dalam kota 	100 - - 100		
	<ul style="list-style-type: none"> • Prasarana jaringan air bersih 	<ul style="list-style-type: none"> - Drainase kompleks perumahan - Drainase atau saluran pembuangan - Drainase dan pedestrian - Drainase dalam kota 	100 - - 100		
	<ul style="list-style-type: none"> • Prasarana jaringan sanitasi dan limbah 	<ul style="list-style-type: none"> • Pembangunan Jaringan Bersih <ul style="list-style-type: none"> - Jaringan Pipa tersier - Jaringan pipa transmisi - Jaringan pipa pelintas - Jaringan pipa distribusi - Bendung 	100 100 100 100 33,33		
	<ul style="list-style-type: none"> • Prasarana jaringan irigasi 	<ul style="list-style-type: none"> • Pembangunan Jaringan Sanitasi & Limbah <ul style="list-style-type: none"> - Pembuatan Septic Tank - IPAL Hibah Saing - IPAL Komunal DAK 	70 - -		
	<ul style="list-style-type: none"> • Pembangunan jembatan 	<ul style="list-style-type: none"> - Pembuatan Septic Tank 	70		
	<ul style="list-style-type: none"> • Sarana peribadatan 	<ul style="list-style-type: none"> - IPAL Hibah Saing 	-		
	<ul style="list-style-type: none"> • Sarana pendidikan 	<ul style="list-style-type: none"> - IPAL Komunal DAK 	-		

	<ul style="list-style-type: none"> • Sarana kesehatan • Sarana perkantoran 	<ul style="list-style-type: none"> • Pembangunan Jaringan Irigasi <ul style="list-style-type: none"> - Pembangunan saluran irigasi primer • Pembangunan jembatan yang rusak • Pembangunan sarana peribadatan <ul style="list-style-type: none"> - Jumlah peribadatan masjid yang rusak • Pembangunan sarana pendidikan <ul style="list-style-type: none"> - TK - SD - SMP - SMA • Pembangunan sarana kesehatan <ul style="list-style-type: none"> - Puskesmas - Lab Kesehatan Daerah - Psc 119 Luwu Utara • Pembangunan sarana perkantoran <ul style="list-style-type: none"> - Pembangunan jumlah perkantoran yang rusak 	<p>-</p> <p>25</p> <p>90,90</p> <p>60,66</p> <p>100</p> <p>100</p> <p>100</p> <p>100</p> <p>100</p> <p>60,66</p>	<p>pembangunan karena selain itu anggaran juga menjadi salah satu penghambat dikarenakan banyaknya infrastruktur lain yang perlu juga dilakukan perbaikan.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Permasalahan sarana pendidikan yaitu belum dilakukan pembangunan kembali pada ruang kelas sekolah yang ada di TK Asyiyah karena terkendala dianggaran. • Banyaknya sarana perkantoran yang perlu dilakukan pembangunan kembali akibat banjir bandang dengan kebutuhan anggaran cukup tinggi dan sampai saat ini belum ada target kapan dilakukan perbaikan. 	<p>dibutuhkan oleh masyarakat setempat untuk memenuhi kebutuhan air di daerah pertanian mereka khususnya sawah</p> <ul style="list-style-type: none"> • Diharapkan segera dilakukan pembangunan jembatan agar dapat menghubungkan kembali beberapa desa yang aksesnya masih terputus • Diharapkan masjid yang masih tertimbun tanah dan pasir disekitar bantaran sungai segera dibersihkan dan dilakukan pengerukan • Diharapkan dana untuk perbaikan ruang kelas di sekolah TK Asyiyah segera cair tepat waktu agar sekolah tersebut dapat digunakan kembali bagi masyarakat setempat. • Diharapkan dilakukan perbaikan secepatnya terhadap beberapa perkantoran yang mengalami kerusakan dan anggaran yang sudah ditentukan agar segera cair tepat waktu agar dapat dilakukan pembangunan secara bertahap
<p>Pembangunan kembali sarana sosial masyarakat</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Pembangunan fasilitas sosial dan fasilitas umum pasca bencana banjir bandang 	<p>Pembangunan kembali fasilitas sosial yang rusak</p>	<p>60</p>	<p>Pembangunan fasilitas sosial yang rusak sudah 60% efektif, adapun kendala dalam hal ini yaitu terdapat beberapa fasilitas sosial yang terdampak tidak dapat dilakukan perbaikan karena ada beberapa berada pada zona merah, selain itu banyaknya kerusakan akibat banjir bandang mengakibatkan kebutuhan anggaran juga cukup tinggi .</p>	<p>Diharapkan anggaran untuk perbaikan fasilitas sosial agar segera cair tepat waktu supaya segera dilakukan pembangunan terhadap beberapa fasilitas yang masih terbengkalai pembangunannya sampai saat ini.</p>

<p>Pembangkitan kembali kehidupan sosial budaya masyarakat</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Pembangkitan kembali kehidupan masyarakat • Menghilangkan rasa trauma masyarakat 	<ul style="list-style-type: none"> • Pemberian bantuan baik berupa uang maupun material • Pemberian kegiatan trauma healing 	<p>50</p> <p>90</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Salah satu upaya yang dilakukan untuk membangkitkan kembali kehidupan masyarakat yaitu dengan cara memberikan bantuan baik itu berupa uang maupun material agar masyarakat yang terdampak dapat melakukan perbaikan tempat tinggal mereka, namun upaya tersebut belum efektif karena banyaknya masyarakat yang mengalami kerusakan tempat tinggal yang harus diberikan bantuan sedangkan anggaran yang ada cukup terbatas. • Kegiatan trauma healing untuk menghilangkan rasa trauma masyarakat pasca banjir sudah sangat efektif yaitu 90% adapun 10% kendalanya yaitu tidak semua masyarakat ikut dalam kegiatan tersebut sehingga masih terdapat beberapa masyarakat yang agak takut ketika hujan dan masih selalu mengingat kejadian banjir badang yang terjadi 2 tahun kemarin. 	<ul style="list-style-type: none"> • Diharapkan adanya bantuan terhadap masyarakat seperti pemberian bantuan tanaman pangan apalagi dominan masyarakat yang terdampak pasca banjir kemarin merupakan petani
<p>Penerangan rancang bangun yang tepat dan penggunaan peralatan yang lebih baik serta tahan bencana</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Memperhatikan peraturan bangunan, peraturan perencanaan, pedoman dan manual rancang bangun • Mengembangkan rancang bangun hasil penelitian dan pengembangan 	<p>Melakukan pembangunan kembali dengan memiliki persyaratan terhadap ketahanan terhadap bencana</p>	<p>50</p>	<p>Pemerintah berharap pembangunan yang dilakukan memiliki persyaratan terhadap ketahanan terhadap bencana alam, sehingga sangat perlu aplikator khususnya gempa, maka harus memiliki sertifikat rumah tahan gempa, dan harus memiliki rekomendasi oleh kementerian PUPR terkait rumah yang tahan bencana atau gempa makanya itu merupakan salah satu kendala yang dihadapi.</p>	<p>Diharapkan pemerintah melakukan pembangunan wajib memiliki syarat terhadap ketahanan terhadap bencana alam.</p>

	<ul style="list-style-type: none"> Menyesuaikan dengan tata ruang Memperhatikan kondisi dan kerusakan daerah Menyesuaikan dengan tingkat kerawanan bencana 				
Peningkatan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya	<ul style="list-style-type: none"> Menormalisasikan kehidupan masyarakat pasca bencana 	Melakukan pembangunan kembali baik itu tempat tinggal maupun sarana dan prasarana yang mengalami kerusakan	60	Kendala dalam hal pembangunan kembali sarana dan prasarana termasuk tempat tinggal yaitu anggaran yang dibutuhkan cukup tinggi	Diharapkan masalah anggaran untuk upaya menormalisasikan kehidupan masyarakat pasca bencana segera cair tepat waktu
Peningkatan fungsi pelayanan publik	<ul style="list-style-type: none"> Peningkatan fungsi sarana dan prasarana pelayanan publik Mengaktifkan kembali fungsi pelayanan publik pada instansi Pengaturan kembali fungsi pelayanan publik 	<ul style="list-style-type: none"> Peningkatan fungsi sarana dan prasarana pelayanan publik Mengaktifkan kembali fungsi pelayanan publik pada instansi Pengaturan kembali fungsi pelayanan publik 	90 100 80	Dalam upaya peningkatan fungsi sarana dan prasarana publik pasti memerlukan waktu dan biaya sedangkan pasca bencana banyak hal yang memerlukan anggaran sehingga kendala lain yang dihadapi dalam hal ini yaitu biaya.	Diharapkan target penyaluran anggaran segera disalurkan tepat waktu
Peningkatan pelayanan utama dalam masyarakat		Mengembangkan pola-pola pelayanan masyarakat yang efektif dan efisien	75	Kurang perhatiannya pemerintah dalam upaya peningkatan pelayanan terhadap masyarakat	Diharapkan pemerintah lebih memperhatikan dalam melakukan peningkatan pelayanan terhadap masyarakat
Jumlah			68,58%		

Sumber: Hasil analisis peneliti, 2022

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah di analisis terkait Efektivitas Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Banjir Bandang di Kabupaten Luwu Utara, maka kesimpulan yang dapat ditarik dari penelitian ini adalah :

1. Efektivitas program rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana banjir bandang di Kabupaten Luwu Utara, bahwa upaya program rehabilitasi yang dilakukan Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Utara sudah efektif dengan skor nilai efektivitas 80,75 persen sedangkan upaya program rekonstruksi yang dilakukan Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Utara juga dikategorikan sudah cukup efektif dengan skor nilai 68,58 persen. Meskipun demikian, masih ada beberapa indikator rehabilitasi dan rekonstruksi kawasan pasca bencana membutuhkan waktu yang lama. Kerusakan yang terjadi dan rehabilitasi dan rekonstruksi yang akan dilakukan belum dapat dipastikan dilakukan pada tahun dan jumlah kebutuhan dana rehabilitasi dan rekonstruksi infrastruktur yang tinggi juga menjadi alasan lainnya.
2. Kendala Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Banjir Bandang di Kabupaten Luwu Utara adalah target realisasi yang

ditentukan pada indikator program ini terbilang rendah. Hal ini disebabkan beberapa prosedur rehabilitasi dan rekonstruksi kawasan pasca bencana membutuhkan waktu yang lama. Kerusakan yang terjadi dan rehabilitasi dan rekonstruksi yang akan dilakukan belum dapat dipastikan dilakukan pada tahun yang sama, jumlah kebutuhan dana rehabilitasi rekonstruksi infrastruktur yang tinggi juga menjadi alasan lainnya serta pendanaan yang belum maksimal dalam merekonstruksi dan merehabilitasi kawasan.

3. Arahkan rekomendasi dalam meningkatkan efektivitas program rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana banjir bandang di Kabupaten Luwu Utara yaitu melakukan koordinasi dan pengajuan permohonan pendanaan baik pemerintah daerah, provinsi maupun pusat agar anggaran yang telah diestimasikan sesuai kerusakan infrastruktur yang ada cepat terealisasikan pada tepat waktu.

B. Saran

Menurut penelitian yang telah dilaksanakan, untuk efektivitas program rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana banjir bandang di Kabupaten Luwu Utara yang lebih progresif kedepannya, peneliti akan menyampaikan saran diantaranya :

1. Bagi pemerintah

a. Meningkatkan kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu

Utara bersama dinas terkait dalam rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana banjir bandang tahun 2020 yang berperan sebagai koordinator yang bekerjasama dengan berbagai pihak terkait agar tercapai secara maksimal dari tujuan yaitu penanggulangan bencana.

b. Dikarenakan tugas BPBD adalah penanggulangan bencana

dari pra bencana, saat bencana, dan sampai pasca bencana maka pada tahap pra bencana BPBD harus meningkatkan sosialisasi tentang penanggulangan bencana banjir bandang untuk masyarakat terutama yang tinggal di daerah rawan bencana banjir agar masyarakat pun dapat lebih berhati-hati, dan menjaga lingkungan sekitar agar meminimalisir terjadinya bencana banjir.

2. Bagi Akademisi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bacaan, menambah wawasan baru, dan dapat memberikan kontribusi positif bagi perkembangan keilmuan. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi para pembaca pada umumnya dan menjadi bahan rujukan atau pembandingan bagi penelitian-penelitian selanjutnya. Penelitian ini diharapkan dapat

memberikan pengetahuan tentang efektivitas program rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana banjir bandang di Kabupaten Luwu Utara, serta menyarankan kepada penelitian selanjutnya untuk dilanjutkan dari aspek perkotaan pasca bencana banjir bandang.



DAFTAR PUSTAKA

- Agus Joko Haryanto, 2012. *Manajemen Bencana Dalam Manghadapi Ancaman Industri di PT. Lautan Otsuka Chemical Cilegon Tahun 2012*. Tesis S2 Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Indonesia.
- Baseri, H., Jarmie, M. Y., & Anhar, D. (2017). Efektivitas komunikasi badan penanggulangan bencana daerah (BPBD) Kabupaten Banjar dalam mengurangi resiko bencana banjir di Kabupaten Banjar. *Al-Kalam Jurnal Komunikasi, Bisnis Dan Manajemen*, 4(1), 1-19.
- Budiharto, T. (2021). ARAHAN REKOMENDASI POLA RUANG IDEAL UNTUK PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN DI KABUPATEN POSO, PROVINSI SULAWESI TENGAH. *Jurnal Ilmiah Ecosystem*, 21(1), 138-157.
- Edi Suharto, 2015. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*. Bandung:Refia Aditama.
- Gibson, James (1985). *Organisasi*. Jakarta : Erlangga
- HARAHAP, N. (2019). KINERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD) DALAM PENANGGULANGAN BENCANA BANJIR DI KOTA PEKANBARU (Doctoral dissertation, Universitas Islam Riau).
- Hidayati, D. 2005. *Panduan Merintis Siaga Bencana Berbasis Masyarakat*. Jakarta: LIPI – Bidang Pendidikan Kelautan, CO REMAP.
- Indrawijaya (2008), *Perilaku Organisasi*. Bandung: Sinar Baru Algensindo
- JAMIN, N. H. PERUBAHAN SOSIAL EKONOMI MASYARAKAT PETANI PASCA BANJIR BANDANG DI DESA MELI KECAMATAN BAEBUNTA.
- Kodoatie, Robert J., dan Sjarief. 2006. *Pengelolaan Sumber Bencana Terpadu-Banjir, Longsor, Kekeringan dan Tsunami*. Jakarta: Yarsif Watampone (Anggota IKAPI).

Kodoatie, J. Dan Sugiyanto. Ri, (2002). *Banjir*. Yogyakarta: PustakaBelajar.

Kabupaten Luwu Utara Dalam Angka Tahun 2021

Mughron, M. M., Hariani, D., & Djumiarti, T. (2015). Efektifitas Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Dalam Pelaksanaan Program Kelurahan Siaga Becana Di Kota Semarang. *Journal of Public Policy and Management Review*, 5(1), 45-52.

Nuriasari, A., & Setyono, J. S. (2013). Efektivitas Dan Efisiensi Peran Pemerintah Dalam Tanggap Darurat Banjir Di Kabupaten Sragen. *Teknik PWK (Perencanaan Wilayah Kota)*, 2(3), 510-519.

Nurjanah, DKK.2012. *Manajemen Bencana*. Bandung: Alfabeta.

Nani, Nurrachman, 2007. *Pemulihan Trama: Panduan Praktis Pemulihan Trauma Akibat Bencana Alam*. LPSP3. UI Jakarta. Hal.4-5.

Modul Manajemen Penanggulangan Bencana Pelatihan Penanggulangan Bencana Banjir.

Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 5 Tahun 2011 tentang Penanggulangan Bencana Kabupaten Luwu Utara.

Peraturan BNPB Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pedoman Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana.

Perka BNPB Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pedoman JITU PASNA.

Permendagri No 54 Tahun 2010.

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008.

Riska, D. Peran Bpbd Dalam Program Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pasca Bencana Kebakaran Di Krukut Tamansari Jakarata Barat (Bachelor's thesis, Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta).

Ramli, Soehatman. 2010. *Sistem Manajemen Keselamatan & Kesehatan Kerja OHSAS 18001*. Jakarta : Dian Rakyat.

Rahayu, Dkk. (2009). *Banjir dan Upaya Penanggulangannya*. Jakarta: Promis Indonesia.

Steers. (1985). *Efektivitas Organisasi*. Jakarta : Erlangga

Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Suryani, E. (2021). Efektivitas Pelaksanaan Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Sektor Permukiman Pascabencana Gempabumi di Pulau Lombok. *JURNAL SOSIAL EKONOMI DAN HUMANIORA*, 7(2), 197-206.

SAKIP BPBD Kabupaten Luwu Utara Tahun 2020.

United Nations Internasional Strategy for Disaster Reduction, (2005) Hyago Framework for Action 2005-2015, United Nations Internasional Strategy for Disaster Reduction.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana

Wangka, A. S., Gosal, R., & Sumampouw, I. (2018). EFEKTIFITAS BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH DALAM MENANGGULANGI BENCANA BANJIR BANDANG DI KECAMATAN TAHUNA BARAT KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE. *JURNAL EKSEKUTIF*, 1(1).

Zagarino, A., Pratiwi, D. C., Nurhayati, R., & Hertati, D. (2021). Peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Dalam Manajemen Bencana Erupsi Gunung Semeru Di Kabupaten Lumajang. *Jurnal Syntax Admiration*, 2(5), 762-773.

Zafirah, Z. (2018). Peranan Taruna Siaga Bencana (Tagana) Dalam Penanggulangan Bencana, Studi pada Organisasi TAGANA Kabupaten, Pesawaran.

[https://www.researchgate.net/publication/333510978 Analisis peran pemerintah daerah dalam rangka percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana gempa bumi pada tahun 2018](https://www.researchgate.net/publication/333510978_Analisis_peran_pemerintah_daerah_dalam_rangka_percepatan_rehabilitasi_dan_rekonstruksi_pasca_bencana_gempa_bumi_pada_tahun_2018)

(diakses tanggal 27 Maret).



KUESIONER PENELITIAN
“EFEKTIVITAS PROGRAM REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI
PASCA BENCANA BANJIR BANDANG DI KABUPATEN LUWU UTARA”

Nama Responden :

Usia :

Jenis Kelamin :

Pendidikan :

Mohon diisi dengan memberi tanda (√) pada jawaban yang sesuai dengan pendapat anda.

No	Pertanyaan	Ya	Tidak
Rehabilitasi			
1	Apakah sudah efektif perbaikan lingkungan daerah bencana, pasca bencana banjir bandang?		
	a. Apakah ada perbaikan lingkungan fisik pada kawasan permukiman ?		
	b. Apakah ada perbaikan pada kawasan usaha?		
2	Apakah sudah ada perbaikan sarana dan prasarana pasca bencana banjir bandang?		
	a. Apakah ada perbaikan pada aspek prasarana jaringan jalan pasca bencana banjir bandang?		
	b. Apakah ada perbaikan pada aspek jaringan air bersih pasca bencana banjir bandang?		
	c. Apakah ada perbaikan pada aspek prasarana jaringan sanitasi dan limbah pasca bencana banjir bandang?		
	d. Apakah ada perbaikan pada aspek prasarana jaringan irigasi pasca bencana banjir bandang?		
	e. Apakah ada perbaikan pada aspek sarana peribadatan?		
	f. Apakah ada perbaikan pada aspek sarana pendidikan?		
	g. Apakah ada perbaikan pada aspek sarana kesehatan?		
	h. Apakah ada perbaikan pada aspek sarana perkantoran?		
3	Apakah ada pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat terhadap korban bencana banjir bandang?		
	a. Apakah semua masyarakat yang terdampak bencana banjir bandang mendapatkan bantuan perbaikan rumah ?		
4	Apakah ada kegiatan pemulihan sosial psikologis terhadap masyarakat yang terkena dampak bencana banjir bandang?		
	a. Kegiatan apa saja yang dilakukan pemerintah dalam upaya memulihkan kembali sosial psikologis masyarakat pasca bencana banjir bandang?		
	b. Apakah masyarakat sudah dapat kembali melakukan kegiatan sosial seperti semula sebelum terjadinya bencana?		
5	Apakah sudah efektif pemulihan pelayanan kesehatan pasca bencana banjir bandang?		

No	Pertanyaan	Ya	Tidak
	a. Apakah ada upaya yang dilakukan pada sistem pelayanan kesehatan untuk memulihkan kembali SDM kesehatan pasca bencana banjir bandang?		
	b. Apakah sudah efektif pemulihan sarana dan prasarana kesehatan pasca bencana banjir bandang?		
6	Apakah sudah efektif pemulihan dari aspek sosial ekonomi budaya masyarakat di daerah bencana banjir bandang ?		
	a. Apakah kegiatan masyarakat baik itu aspek sosial, ekonomi dan budaya sudah kembali efektif seperti semula pada saat sebelum terjadinya bencana?		
7	Apakah sudah efektif pemulihan fungsi pemerintahan di Kabupaten Luwu Utara pasca terjadinya bencana banjir bandang?		
	a. Apakah semua petugas pemerintahan sudah aktif kembali melakukan aktifitas pemerintahan pasca bencana banjir bandang?		
	b. Apakah semua dokumen-dokumen pemerintahan dalam kondisi aman dan terselamatkan pasca bencana banjir bandang?		
	c. Apakah ada kegiatan konsolidasi dan pengaturan tugas pokok dan fungsi petugas pemerintahan pasca bencana banjir bandang?		
	d. Apakah ada dilakukan kegiatan pengaturan kembali tugas-tugas instansi pasca bencana banjir bandang?		
8	Apakah sudah efektif pemulihan fungsi pelayanan publik pasca bencana banjir bandang?		
	a. Apakah sudah efektif pemulihan pada pelayanan pendidikan yang terdampak pasca bencana banjir bandang?		
	b. Apakah sudah efektif pemulihan pada pelayanan kesehatan, pasca bencana banjir bandang?		
	c. Apakah sudah efektif pemulihan pada pelayanan peribadatan, pasca bencana banjir bandang?		
	d. Apakah sudah efektif pemulihan pada pelayanan perekonomian masyarakat pasca bencana banjir bandang?		
	e. Apakah sudah efektif pemulihan pada pelayanan perkantoran yang terkena dampak di Kabupaten Luwu Utara pasca bencana banjir bandang?		
Rekonstruksi			
1	Apakah sudah ada dilakukan pembangunan kembali sarana dan prasarana pasca terjadinya bencana banjir bandang ?		
	a. Apakah sudah ada dilakukan pembangunan jaringan jalan?		
	b. Apakah sudah ada dilakukan pembangunan jaringan drainase?		
	c. Apakah ada dilakukan pembangunan jembatan pasca banjir bandang?		
2	Apakah sudah ada pembangunan kembali sarana sosial masyarakat pasca bencana banjir bandang?		
	a. Apakah sudah ada dilakukan pembangunan sarana dan prasarana umum/publik yang mengalami kerusakan pasca bencana banjir bandang?		
3	Apakah sudah efektif kembali kehidupan sosial budaya masyarakat di Kabupaten Luwu Utara pasca bencana banjir bandang?		
4	Apakah sudah ada pembangunan penerangan rancang bangun yang tepat dan penggunaan peralatan yang lebih baik serta tahan bencana?		

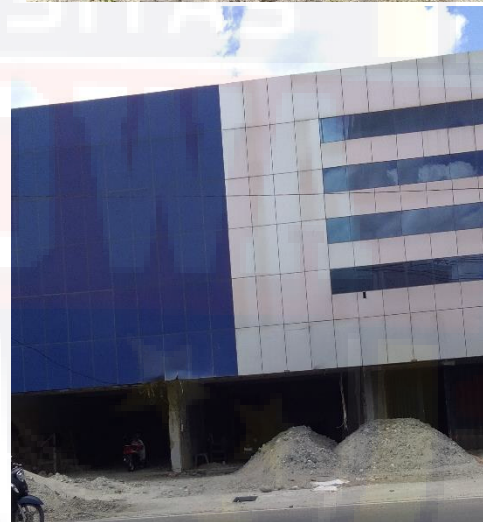
	a. Apakah sudah ada upaya yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan stabilitas kondisi dan fungsi sarana dan prasarana yang mampu mengantisipasi dan tahan bencana ?		
5	Peningkatan kondisi sosial, ekonomi dan budaya		
	a. Apakah sudah ada upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya untuk menormalisasikan kondisi dan kehidupan masyarakat pasca bencana banjir bandang?		
6	Peningkatan Fungsi Pelayanan Publik		
	a. Apakah sudah efektif fungsi pelayanan publik di Kabupaten Luwu Utara pasca bencana banjir bandang?		
7	Peningkatan pelayanan utama dalam masyarakat		
	a. Apakah sudah ada dilakukan peningkatan pelayanan utama dalam masyarakat yang dilakukan dalam mengembangkan pola-pola pelayanan yang efektif dan efisien pasca terjadinya bencana banjir bandang?		



Visualisasi Pembagian Kuesioner di Lokasi Penelitian



Dokumentasi Kondisi Pasca Bencana Banjir Bandang di Lokasi Penelitian





DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Irma Wahyuni lahir di Tingkara Kabupaten Luwu Utara Provinsi Sulawesi Selatan pada tanggal 6 April 2000, merupakan anak ke-2 dari 2 bersaudara dari pasangan Bapak Ambo Wakkang dan Ibu Hj. Marwah dan tinggal dan menetap di Desa Tingkara Kecamatan Malangke Kabupaten Luwu Utara, dengan riwayat pendidikan yaitu MI Muhammadiyah Tingkara (2006-2012); MTS Muhammadiyah Tingkara (2012-2015); SMA Negeri 11 Luwu Utara (2015-2018). Melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi di Universitas Bosowa Makassar melalui jalur ujian tulis dan tercatat sebagai Mahasiswa Program Studi Sarjana (S1) pada Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota, Fakultas Teknik, Universitas Bosowa Makassar. Selama masa perkuliahan penulis aktif mengikuti kegiatan-kegiatan baik intra kampus maupun ekstra kampus. Penulis juga aktif dalam organisasi pengurus di Himpunan Mahasiswa Perencanaan Wilayah dan Kota (HMPWK) Universitas Bosowa Makassar selama dua periode yakni menjabat sebagai anggota dibidang Keilmuan Periode 2020-2021 dan Periode 2021-2022. Penulis juga pernah aktif dikegiatan ekstra kampus seperti Ikatan Mahasiswa Perencanaan Indonesia (IMPI), dan Organisasi Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Komisariat Teknik Universitas Bosowa Makassar.